LAPORAN AKHIR

KAJIAN PDRB LINGKUNGAN HIDUP (PDRB HIJAU) KABUPATEN BANDUNG BARAT



BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Kajian Produk Domestik Regional Bruto Lingkungan Hidup (PDRB Hijau) Kabupaten Bandung Barat ini dapat terselesaikan dengan baik. Kajian ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memahami kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya integrasi antara ekonomi dan lingkungan dalam strategi pembangunan daerah. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat, seperti banyak daerah lain, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan berpotensi mempercepat degradasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan generasi saat ini dan masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam penyelesaian kajian ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi panduan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bandung Barat, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 7

1.3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 8

1.4. Keluaran Pelaksanaan Kegiatan 10

1.5. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN **13**

2.1. Tinjauan Teori 13

2.1.1. Pengertian PDRB Hijau 14

2.1.2. Deplesi Sumber Daya Alam 18

2.1.3. Degradasi Lingkungan 21

2.1.4. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Pengembangan Ruang dan Infrastruktur 23

2.1.5. Urgensi PDRB Hijau 25

2.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 26

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 26

2.2.2. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 33

2.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 35

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI **57**

3.1. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan 57

3.1.1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan 57

3.1.2. Pendekatan Perencanaan Di Indonesia 60

3.1.3.Pendekatan Teori Kelembagaan/ Institusionalisme 64
3.1.4.Pendekatan *Spatial Linkage* Dalam Perencanaan Ruang dan Infrastruktur 69
3.1.5.Pendekatan Pembangunan Kewilayahan 70
3.2. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 71
3.2.1.Kerangka Pemikiran Kerja 71
3.2.2.Metoda Pengumpulan Data 73
3.2.3 Metoda Analisis 74
3.3. Rencana Kerja 95
3.3.1. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan 95
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 98
4.1. Kondisi Fisik Kawasan Perencanaan 98
4.1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat 98
4.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng 101
4.1.3. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah 106
4.2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Bandung Barat 110
4.2.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk 110
4.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk 111
4.2.3. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 112
4.2.4 Ketenagakerjaan 115
4.3. Karakteristik Perekonomian 116
4.3.1. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 116
4.3.2. Pendapatan Per Kapita 126
BAB V PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 128
5.1. Kinerja Perekonomian Perubahan PDRB Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023 128
5.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 141

5.2.1 Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Periode 2019-2023 146
5.2.2 Analisis Sektor Unggulan 152
BAB VI NILAI DEPLESI DAN DEGRADASI SUMBER DAYA ALAM 165
6.1. Perkembangan Deplesi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat 165
6.1.1. Pengertian dan Perhitungan Deplesi 165
BAB VII PDRB COKLAT, PDRB SEMI HIJAU, DAN PDRB HIJAU KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 179
BAB VIII KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 187
8.1. Kesimpulan 187
8.1.1. Sisi Produksi 187
8.1.2. Sisi Pengeluaran/Penggunaan 190
8.2. Saran dan Rekomendasi 190
DAFTAR PUSTAKA 193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Klasifikasi Nilai Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Kerangka Total Economic Value 18
Gambar 2. 2. Pembangunan yang Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam 25
Gambar 2. 3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 41
Gambar 2. 4. Pusat- Pusat Pertumbuhan Wilayah Pengembangan Kabupaten Bandung Barat 42
Gambar 2. 5. Rencana Peningkatan Jalan Dan Pengembangan Terminal Di Kabupaten Bandung Barat 50
Gambar 2. 6. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 53
Gambar 2. 7. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat 56

Gambar 3. 1. Bagan Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 62
Gambar 3. 2. Alur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Sesudah PP 8/2008 & Permendagri 86/2017) 64
Gambar 3. 3. Kerangka Pemikiran 72
Gambar 3. 4. Klasifikasi Sektor PDRB Menurut Tipologi Klassen 77

Gambar 4. 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat 99
Gambar 4. 2. Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Bandung Barat 103
Gambar 4. 3 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Bandung Barat 105
Gambar 4. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 113

Gambar 5. 1 Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2015-2023 148
Gambar 5. 2. Tipologi Klassen LQ dan DLQ Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023 162

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Arahan Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Bandung Barat 43

Tabel 3. 1. Perkiraan Degradasi Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Kabupaten Bandung Barat 94

Tabel 4. 1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bandung Barat 100
Tabel 4. 2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Bandung Barat 102
Tabel 4. 3 Kemiringan Wilayah Kabupaten Bandung Barat 104
Tabel 4. 4. Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 107
Tabel 4. 5 Luas dan Proporsi Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bandung Barat 109
Tabel 4. 6 Kecamatan Dan Penduduk Wilayah Kabupaten Bandung Barat 111
Tabel 4. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 112
Tabel 4. 8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat 114
Tabel 4. 9 Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019–2023 (dalam Miliar Rp.) 120
Tabel 4. 10 Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019–2023 121
Tabel 4. 11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen), ... 124
Tabel 4. 12 Tabel Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023..... 126

Tabel 5. 1 Tabel Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2019 - 2023 (dalam Rp Miliar) 128
Tabel 5. 2 Tabel Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2019 – 2023..... 130
Tabel 5. 3 Tabel Struktur Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2019 – 2023..... 132

Tabel 5. 4 Tabel Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2019 - 2023 (dalam Miliar Rp.) 134
Tabel 5. 5. Tabel Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat 137
Tabel 5. 6 Tabel Struktur Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat 139
Tabel 5. 7 Tabel Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), Periode 2019-2023 141
Tabel 5. 8 Tabel Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), Periode 2019-2023 143
Tabel 5. 9 Tabel Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Periode Tahun 2019-2023 145
Tabel 5. 10 Tabel Analisis profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2023 147
Tabel 5. 11 Tabel Pergeseran Bersih Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019 - 2023 150
Tabel 5. 12 Tabel Analisis LQ Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023 153
Tabel 5. 13 Tabel Analisis DLQ Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023 157
Tabel 5. 14 Tabel rata-rata LQ dan DLQ 160

Tabel 6. 1. Perkembangan Nilai Deplesi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2022 (dalam Miliar Rp.) 167
Tabel 6.2. Perkembangan Tingkat Deplesi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2022 168
Tabel 6. 3. Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Air 172
Tabel 6. 4. Cakupan Pelayanan Perumda Tirta Raharja 2023 173
Tabel 6. 5. Besaran Nilai Deplesi Sumber Daya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2023 (dalam Miliar Rp.) 174
Tabel 6. 6. Perkembangan Nilai Degradasi SDA di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 176
Tabel 6. 7. Koefisien Degradasi PDRB HB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Bandung Barat 177
Tabel 6. 8. Besaran Nilai Degradasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat 2016-2023 (dalam Miliar Rp.) 178

Tabel 7. 1. Estimasi perkembangan PDRB Coklat (Konvensional) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 180
Tabel 7. 2. Perkembangan PDRB Coklat (Konvensional) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 .. 181
Tabel 7. 3. Estimasi Besaran PDRB Semi Hijau Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat 2020-2023 (dalam Miliar Rp.)..... 182
Tabel 7. 4. Estimasi Perkembangan PDRB Semi Hijau Atas Dasar Harga Konstan 2020 – 2023 (dalam Miliar Rp.) 183
Tabel 7. 5. PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2020 – 2023 (dalam Miliar Rp.) 185
Tabel 7. 6. PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 -2023 (dalam Miliar Rp.)..... 186

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim global dan kerusakan lingkungan kini menjadi isu yang sangat mendesak, memerlukan penanganan yang bijaksana dan strategis, khususnya dalam pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah. Tantangan ini semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan, yang sering disebut sebagai ekonomi hijau. Konsep ini mencerminkan komitmen sebuah wilayah untuk menjalankan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Keberhasilan penerapan ekonomi hijau dapat diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto Berbasis Lingkungan Hidup (PDRB Hijau), yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Penggunaan metode perhitungan PDRB Hijau patut diapresiasi sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, yang merupakan aset fundamental bagi keberlanjutan kehidupan dan kegiatan produksi di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tantangan berupa penurunan sumber daya alam (deplesi) dan kerusakan lingkungan (degradasi) dapat dikelola secara lebih efektif. Implementasi pendekatan ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak, mengingat pentingnya menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarukan, seperti hasil pertambangan dan penggalian, perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisasi. Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hutan, perkebunan, dan perikanan memerlukan regulasi ketat serta pendekatan berbasis

keberlanjutan untuk memastikan manfaatnya dapat terus dirasakan tanpa mengorbankan masa depan.

Konsep Produk Domestik Bruto Hijau (Green GDP) menjadi salah satu alternatif penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi sosial dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang, seperti yang ditegaskan oleh United Nations (2007). Sayangnya, metode perhitungan PDB atau PDRB konvensional sering kali mengabaikan dampak penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya akibat aktivitas produksi. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya tercermin dalam angka PDRB tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan dalam pengukuran ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama ini telah menjadi salah satu indikator utama dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator ini mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Namun, pengukuran PDRB konvensional, yang dikenal sebagai PDRB coklat, saat ini mulai bertransformasi menuju PDRB Hijau. Transformasi ini sejalan dengan diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

PDRB Hijau merupakan penyempurnaan dari metode konvensional dengan memasukkan faktor deplesi sumber daya alam serta degradasi lingkungan ke dalam perhitungan nilai ekonomi suatu daerah. Pada intinya, PDRB mengukur total nilai tambah (added value) yang dihasilkan oleh perekonomian daerah selama satu tahun. Nilai tambah ini diperoleh dari selisih antara total nilai produksi dan biaya input antar sektor, yang sekaligus menggambarkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor

produksi. Indikator ini memberikan gambaran lebih holistik tentang tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah, mencakup tidak hanya kinerja ekonomi tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan.

Laporan PDRB menyajikan informasi yang sangat penting terkait performa sektor-sektor ekonomi di suatu daerah. Namun, dalam menyusun laporan ini, kontribusi dari sumber daya alam dan lingkungan juga harus diperhitungkan. Banyak aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam sering kali mendorong eksploitasi berlebihan sehingga mengarah pada degradasi lingkungan. Oleh karena itu, laporan PDRB yang baik seharusnya mencakup penghitungan atas kehilangan sumber daya alam akibat aktivitas produksi. Hal ini bertujuan agar kinerja ekonomi tidak hanya mencerminkan nilai tambah dari sektor ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap cadangan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Penghitungan PDRB secara umum dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) pendekatan produksi yang menghitung total nilai tambah dari semua sektor ekonomi, (2) pendekatan pendapatan yang menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, dan (3) pendekatan pengeluaran yang mengukur total pengeluaran dari setiap sektor dalam perekonomian. Ketiga pendekatan ini, meskipun memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi, cenderung mengabaikan eksternalitas negatif yang dihasilkan dari aktivitas produksi, terutama dampak buruk terhadap lingkungan. Untuk mengatasi kekurangan ini, konsep PDRB Hijau hadir sebagai alternatif yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan dampak lingkungan ke dalam perhitungan, PDRB Hijau diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih akurat dan realistis mengenai kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Di Indonesia, terdapat sejumlah regulasi yang mendukung pengintegrasian aspek lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Kedua peraturan ini secara tegas mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mencakup penghitungan yang lebih komprehensif dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), agar dapat mencerminkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa instrumen perencanaan pembangunan ekonomi harus memuat neraca sumber daya alam serta perhitungan penyusutan nilai lingkungan hidup. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada pengembangan ekonomi semata, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam yang menjadi fondasi utama keberlanjutan ekosistem. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 memperkuat amanat ini dengan menegaskan bahwa aspek lingkungan hidup harus diinternalisasi ke dalam setiap tahap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pengintegrasian aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Regulasi ini menjadi langkah konkret untuk mengarahkan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak mengancam daya dukung lingkungan di masa depan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan neraca sumber daya alam dan penyusutan nilai lingkungan dapat dijadikan acuan utama dalam mengevaluasi kinerja ekonomi dan dampak lingkungan secara bersamaan, menciptakan perencanaan yang lebih holistik dan berwawasan lingkungan.

Penerapan PDRB Hijau di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan data BPS yang dirilis April 2024, Kabupaten Bandung Barat mencatat pertumbuhan ekonomi positif dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,34% (angka sementara Tahun 2022) dan sebesar 5% (angka sangat sementara Tahun 2023). Dari sumber data yang sama, nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 (angka sangat sementara) mencapai Rp 35.062.186,4 dan pada Tahun 2022 (angka sementara) mencapai Rp 35.062.186,4 berdasarkan harga konstan 2010.

Hasil analisis *Location Quotient* (*LQ*) menunjukkan bahwa sektor unggulan Kabupaten Bandung Barat tetap berada pada sektor-sektor seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun, sektor seperti pengadaan listrik, gas, akomodasi, makanan dan minuman, serta pendidikan menunjukkan kontribusi yang lebih besar terserap di Kota Bandung dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing lokal di sektor-sektor tersebut.

Semua sektor mengalami pergeseran bersih yang positif, kecuali sektor transportasi dan pergudangan yang menunjukkan pergeseran bersih negatif. Menurut analisis LQ PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, sektor-sektor seperti Pertanian dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya merupakan sektor non basis dengan nilai LQ < 1. Hal ini disebabkan oleh kegiatan di sekitar Kabupaten Bandung Barat yang masih banyak terserap di Kota Bandung, terutama dalam bidang perumahan, pariwisata, dan pendidikan. Angka sementara PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp.46.721,72 miliar atas dasar harga berlaku, dengan penurunan nilai PDRB Konvensional menjadi PDRB Semi Lingkungan Hidup sebesar 1,28% dan menjadi PDRB Lingkungan Hidup sebesar 4,19%. Sedangkan Angka sangat sementara PDRB

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 45.318,56 miliar atas dasar harga berlaku.

Untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam, diperlukan perencanaan pembangunan yang berfokus pada pelestarian SDA dan lingkungan. PDRB merupakan salah satu informasi relevan yang sangat diperlukan. Namun, PDRB yang selama ini dikenal sebagai PDRB coklat hanya mengukur aktivitas ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi. Untuk mengetahui apakah peningkatan PDRB berdampak positif terhadap keberlanjutan sumber daya alam, diperlukan PDRB Lingkungan Hidup yang mampu menunjukkan hasil kegiatan ekonomi serta dampak negatifnya terhadap kehilangan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang struktur perekonomian dan kontribusi nyata setiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu agar dapat melihat tingkat keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung Barat diperlukannya perhitungan PDRB Lingkungan Hidup dari 16 kategori lapangan usaha yang berkontribusi kepada PDRB Kabupaten Bandung Barat.

Penerapan PDRB Hijau memberikan berbagai manfaat penting bagi Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dampak ekonomi dari kegiatan pembangunan yang diimbangi dengan perhitungan kerugian ekologis, seperti kerusakan lingkungan dan penyusutan sumber daya alam. Data ini memberikan dasar yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang.

Kabupaten Bandung Barat kini memiliki peluang besar untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan PDRB Hijau, sambil tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan, kabupaten ini dapat mempersiapkan masa depan yang lebih

berkelanjutan dan berperan sebagai pelopor pembangunan hijau di tingkat nasional. Pendekatan ini juga dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

Selain itu, perhitungan PDRB Hijau memberikan informasi yang lebih detail tentang kontribusi ekonomi dari setiap sektor, serta dampak negatif yang dihasilkan terhadap lingkungan. Data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan, seperti sektor jasa dan teknologi hijau. Dengan demikian, penerapan PDRB Hijau diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi generasi mendatang.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dilaksanakannya pekerjaan Kajian Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup ini adalah memberikan gambaran kondisi perekonomian terkini Kabupaten Bandung Barat serta dampaknya terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Pelaksanaan Kajian PDRB hijau Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. Mendata ulang tentang potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai input produksi pada berbagai lapangan usaha baik yang bersifat renewable yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan, maupun yang bersifat unrenewable yaitu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang dan bahan galian, dengan memperhitungkan tingkat penyusutan (deplesi) dan tingkat kerusakan lingkungan (degradasi) ;
2. Mengembangkan pendekatan Ekonomi Hijau (Green economy approach) sebagai model pendekatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dengan demikian PDRB yang dibentuk oleh setiap lapangan usaha dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih realistis.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah antara lain:

1. Untuk menganalisis sektor-sektor dalam PDRB yang dapat memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam;
2. Menghitung PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat untuk 16 kategori berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2023;
3. Menganalisis hasil perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2023;
4. Tersusunnya PDRB Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang menggambarkan capaian kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat;
5. Memberikan gambaran tentang potensi ekonomi saat ini dan memberikan arah pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tingkat efisiensi dan daya saing tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta tercapainya PDRB Lingkungan Hidup.

1.3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Kajian Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup (PDRB Hijau) Kabupaten Bandung Barat, adalah wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dengan SKPD pelaksana yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ruang lingkup pekerjaan Kajian Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup (PDRB Hijau) Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Informasi kondisi kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan menampilkan:
   a. review atas trend kondisi historis dan kondisi saat ini dari sektor dan sub sektor yang terdapat di dalam PDRB; dan
   b. potensi dan proyeksi ke depan dari sektor-sektor yang terdapat di dalam PDRB.
2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dari PDRB Lingkungan Hidup.
3. Metode valuasi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.
4. Penghitungan PDRB Lingkungan Hidup tahun 2023.
5. Analisis PDRB Lingkungan Hidup.
6. Manfaat PDRB Lingkungan Hidup.
7. Kesimpulan dan Saran, yang diantaranya memuat hasil Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.

Tahap penyusunan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Pengumpulan Data, baik data primer maupun sekunder.
2. Analisis dan pengolahan Data.
3. Pelaporan.
4. Penyusunan Dokumen Kajian Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.

Secara lebih rinci ruang lingkup pekerjaan kajian dan penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat dimulai dengan studi pendahuluan mencakup hal hal sebagai berikut:

1. Kajian pendahuluan tentang perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan data PDRB Coklat, PDRB Semi Hijau, dan PDRB Hijau 4 tahun yang lalu sebagai referensi awal;

2. Review atas kinerja PDRB Kabupaten Bandung Barat dari sisi produksi menurut lapangan usaha, sisi pendapatan, dan sisi penggunaan atau pengeluaran;
3. Survey untuk mendapatkan data primer dan atau sekunder tentang perubahan pembentukan modal tetap bruto (investment) di setiap lapangan usaha, perubahan belanja pemerintah daerah (government expenditure), dan perubahan ekspor-impor (balance of trade) antara daerah pada periode waktu berjalan;
4. Menghitung/mengestimasi PDRB KBB tahun 2023 atas dasar harga berlaku (*current prices*);
5. Menghitung deflator PDRB atau indeks PDRB untuk mendeflasi PDRB harga berlaku menjadi PDRB Riil;
6. Menghitung/mengestimasi PDRB KBB tahun 2023 atas dasar harga konstan pada tahun dasar;
7. Menghitung/mengestimasi laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode 2019-2023;
8. Menghitung/mengestimasi nilai penyusutan SDA (deplesi) dan kerusakan lingkungan (degradasi);
9. Menghitung/mengestimasi PDRB KBB semi hijau tahun 2023 atas dasar harga berlaku (current prices);
10. Menghitung/mengestimasi PDRB KBB Hijau tahun 2023 atas dasar harga konstan;
11. Menghitung/mengestimasi distribusi PDRB Lingkungan Hidup tahun 2023 menurut lapangan usaha;
12. Kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

1.4. Keluaran Pelaksanaan Kegiatan

Keluaran dari pekerjaan Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kabupaten Bandung Barat

serta arahan rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil kajian PDRB Hijau.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada laporan pendahuluan Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta keluaran dari pelaksanaan kajian Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat.

BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan teori-teori pengembangan sektor pertanian yang menjadi sektor di dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pendekatan dan metodologi yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan kajian Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum wilayah kajian yaitu Kabupaten Bandung Barat dari sisi administrasi wilayah, kondisi fisik wilayah, kondisi kependudukan, kondisi sarana prasarana, kondisi perekonomian dan lainnya.

BAB V PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019-2023

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat menurut lapangan usaha dan pengeluaran baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010.

BAB VI NILAI DEPLESI DAN DEGRADASI SUMBER DAYA ALAM

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perkembangan deplesi sumber daya alam serta perkembangan degradasi sumber daya alam di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.

BAB VII PDRB COKLAT, PDRB SEMI HIJAU DAN PDRB HIJAU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi PDRB Coklat, PDRB Semi Hijau dan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat.

BAB VIII KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan, saran dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait penyusunan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat ke depan.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1. Tinjauan Teori

Untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau, Kementerian Lingkungan Hidup terus mengadakan sosialisasi dan menerbitkan peraturan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, terdapat berbagai arahan dan kewajiban yang bertujuan untuk mendukung dan membentuk ekonomi hijau. Kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau di Indonesia meliputi:

1. Pengembangan instrumen ekonomi yang berfokus pada lingkungan hidup, yang mencakup perencanaan pembangunan, insentif dan disinsentif, serta pendanaan untuk investasi lingkungan;
2. Pengembangan kajian dan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau;
3. Pengembangan panduan dan implementasi valuasi ekonomi terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) serta dampak lingkungan;
4. Pengembangan penerapan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle);
5. Pengembangan program investasi dalam pengelolaan Limbah B3;
6. Kajian mengenai ekonomi hijau, khususnya terkait pembangunan rendah karbon.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1), dijelaskan bahwa instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, mencakup neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penyusunan PDB dan PDRB yang memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

2.1.1. Pengertian PDRB Hijau

PDRB Hijau adalah suatu bentuk adaptasi dari PDRB konvensional yang memasukkan faktor-faktor pengurangan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam perhitungan output ekonomi suatu wilayah (Irawan, 2013). PDRB sendiri merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah dalam periode satu tahun. Nilai tambah ini dihitung dengan cara mengurangkan biaya input antara (*intermediate inputs*) dari total nilai produksi yang dihasilkan. Nilai tambah mencerminkan pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Melalui pengukuran nilai tambah atau PDRB suatu daerah, dapat diketahui sejauh mana kemajuan ekonomi di daerah tersebut (Samuelson & Nordhaus, 1995). PDRB Hijau mencerminkan bukan hanya pencapaian ekonomi, tetapi juga seberapa besar keberlanjutan ekonomi suatu daerah dalam memperhatikan aspek ekologis (BPS, 2020).

PDRB Hijau ini berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mendorong pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap masalah lingkungan. Melalui PDRB Hijau, diharapkan pengembangan ekonomi di suatu wilayah dapat lebih mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kerusakan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan (Soeharto & Prasetyo, 2016).

Untuk mencegah dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, perlu diterapkan paradigma baru yang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Paradigma pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan dalam cara mengukur kemajuan ekonomi, dengan tidak lagi bergantung pada indikator tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB yang dihitung menggunakan Sistem Akun Nasional (SNA). Sebagai gantinya, pengukuran ini beralih pada PDB Hijau atau PDRB Hijau (Green GDP atau *Green* GDP), yang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dalam menghitung nilai tambah ekonomi. PDB Hijau atau PDRB Hijau ini didasarkan pada pendekatan Sistem Penghitungan Terpadu Ekonomi dan Lingkungan (*System of Integrated Environmental and Economic Accounts*/SIEEA), yang mengintegrasikan data ekonomi dan lingkungan secara bersamaan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pembangunan berkelanjutan (Berkhout & Hertin, 2002).

Rekomendasi dari PBB mengarahkan setiap negara untuk mengembangkan sistem statistik pendapatan nasional yang memasukkan pertimbangan aspek lingkungan. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 1995-1996 memulai studi mengenai penyusunan neraca ekonomi dan lingkungan, yang mulai mengintegrasikan deplesi sumber daya alam ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Pada 2010, BPS merilis publikasi Sistem Terintegrasi Neraca Ekonomi dan Lingkungan Indonesia (SINERLING), yang mencakup sembilan komoditas sumber daya alam—termasuk batubara, minyak bumi, gas alam, bauksit, emas, perak, dan hutan—dalam perhitungan neraca ekonomi yang terintegrasi (BPS, 2012). PBB melalui *System of Environmental-Economic Accounting* (*SEEA*) menyarankan negara-negara menghitung dampak lingkungan dalam PDB dan PDRB, termasuk deplesi sumber daya alam (United Nations, 2014). Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Bank Dunia yang menyarankan penerapan akuntansi hijau untuk memperhitungkan nilai alam dan sumber daya alam dalam analisis ekonomi makro (World Bank, 2005). Dengan demikian, integrasi aspek lingkungan dalam perhitungan ekonomi tidak hanya memberikan gambaran yang lebih akurat tentang

keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan yang semakin mendesak.

Keberlanjutan pembangunan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan riil per kapita tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat antar generasi. Hal ini hanya mungkin terjadi jika rente ekonomi dari sumber daya alam yang belum dieksploitasi (deplesi sumber daya alam) dapat diinvestasikan kembali ke dalam perekonomian. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di suatu daerah selama periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Nilai tambah tersebut merupakan selisih antara total nilai produksi dan biaya input antara (*intermediate inputs*). Perhitungan PDRB di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 mengelompokkan ekonomi daerah menjadi 17 sektor yang mencakup berbagai bidang dengan pengelompokkan lapangan usaha sebagai berikut:

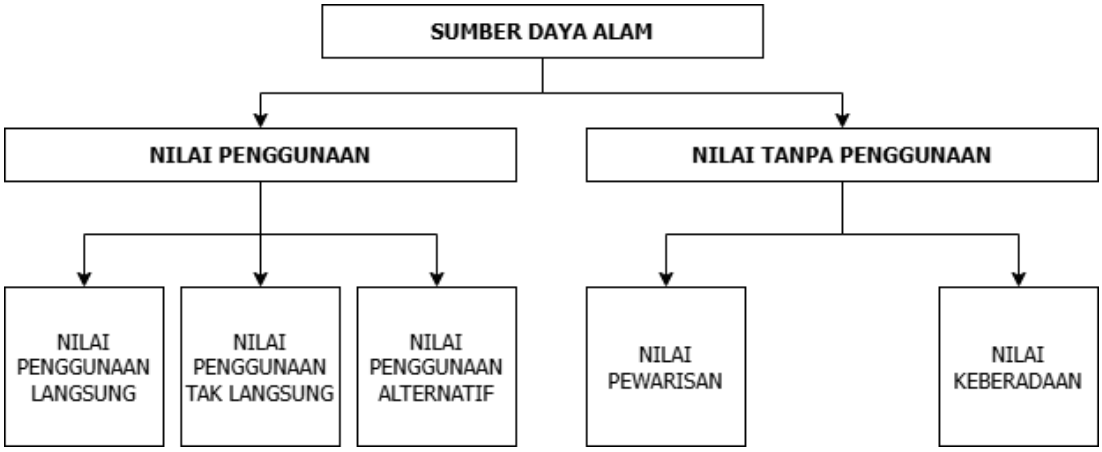
1. A : Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan
2. B : Pertambangan dan Penggalian
3. C : Industri Pengolahan
4. D : Pengadaan Listrik dan Gas
5. E : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. F : Konstruksi
7. G : Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. H : Transportasi dan Pergudangan
9. I : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. J : Informasi dan Komunikasi
11. K : Jasa Keuangan dan Asuransi
12. L : Real Estat
13. M, N : Jasa Perusahaan / Aktivitas Bisnis
14. O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. P : Jasa Pendidikan
16. Q : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. R, S, T, U : Jasa lainnya

Perhitungan PDRB ini berguna untuk:

1. Menilai tingkat kesejahteraan ekonomi;
2. Mengidentifikasi kontribusi sektor-sektor ekonomi;
3. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi per sektor;
4. Menyusun rencana pembangunan regional atau sektoral.

Namun, di banyak daerah di Indonesia, PDRB yang dihitung masih terbatas pada kontribusi nilai produk yang dipasarkan di setiap sektor ekonomi, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan sumber daya alam yang terdegradasi akibat aktivitas ekonomi. PDRB semacam ini dikenal dengan sebutan *PDRB Konvensional* atau *PDRB Coklat*, yang cenderung hanya mencerminkan hasil jangka pendek. PDRB Hijau, sebagai pengembangan dari PDRB Coklat, memasukkan dimensi lingkungan, khususnya depresiasi sumber daya alam, ke dalam perhitungan PDRB konvensional. PDRB Hijau, atau PDRB ramah lingkungan, memperhitungkan deplesi dan degradasi sumber daya alam sebagai bentuk *scarcity rent* yang timbul akibat pengambilan dan perusakan sumber daya alam tersebut.

Hal penting yang dapat difokuskan adalah kita dapat menghitung tingkat depresiasi sumber daya alam sebagai jumlah uang yang perlu diinvestasikan untuk menjaga agar total aset alam tetap tidak berkurang. Ketika PDRB Coklat yang telah dihitung kemudian memasukkan perhitungan nilai deplesi sumber daya alam, maka hal tersebut dikenal dengan istilah PDRB Semi Hijau. Selanjutnya, apabila PDRB juga memperhitungkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan, maka hasilnya disebut PDRB Hijau. Dengan mengintegrasikan unsur PDRB Hijau, kita akan memperoleh gambaran mengenai nilai Produk Domestik Bruto yang lebih akurat, tanpa terpengaruh oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.



Gambar 2. 1. Klasifikasi Nilai Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Kerangka Total Economic Value

Sumber: diolah dari Pearce & Turner (1992) dalam Djijono (2002) dan *The Economics of Ecosystems and Biodiversity* (2010)

2.1.2. Deplesi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) digolongkan sebagai aset tetap, yang juga dikenal sebagai *wasting asset*. Aset ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Penggunaan SDA terjadi melalui proses ekstraksi, seperti penambangan;
2. SDA tidak dapat diperbaharui atau digantikan, kecuali dalam hal kayu;
3. Proses penggantian SDA dilakukan secara ilmiah dan terukur.

Contoh SDA yang termasuk dalam kategori ini adalah bijih besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. SDA yang berasal dari pertambangan digolongkan sebagai aset tetap, bukan sebagai persediaan, karena yang diperdagangkan dalam aktivitas pertambangan adalah kandungan yang terdapat di dalam tanah, bukan tanahnya sendiri. Tanah yang mengandung sumber daya alam dikategorikan sebagai aset tetap, dan nilai tanah tersebut akan mengalami deplesi. Sebaliknya, hasil tambang seperti batubara baru dapat dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan merujuk pada SDA

yang telah diketahui secara pasti jumlah dan kualitasnya serta memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur, seperti dalam satuan ton, dan telah terbukti dapat dimanfaatkan.

Pencatatan dan penilaian SDA mengikuti prinsip harga pokok dan prinsip mempertemukan (*cost and matching principles*). Prinsip harga pokok mengharuskan bahwa pada saat perolehan, SDA harus dinilai dan dicatat berdasarkan harga pokoknya. Sementara itu, pada prinsip mempertemukan mengatur bahwa harga pokok SDA harus dideplesikan seiring dengan berjalannya waktu. Deplesi adalah proses pengurangan nilai perolehan SDA akibat pemanfaatannya, yang kemudian dibebankan secara rasional dan sistematis pada periode-periode yang memperoleh manfaat dari SDA tersebut.

Deplesi merujuk pada berkurangnya nilai atau harga perolehan SDA, seperti tambang dan hutan kayu, akibat dari perubahan atau pengolahan yang menjadikan SDA tersebut menjadi persediaan. Dalam konteks ini, deplesi dipandang sebagai alokasi biaya sumber daya alam ke dalam periode-periode yang menerima manfaat dari eksploitasi SDA. Metode perhitungan deplesi yang digunakan adalah metode satuan produksi, yang menghitung biaya deplesi berdasarkan jumlah satuan SDA yang dieksploitasi dalam suatu periode. Karena deplesi berhubungan erat dengan pengelolaan SDA yang tidak dapat diperbarui, proses ini sangat relevan dalam sektor pertambangan, dimana deplesi sering kali merujuk pada perhitungan akuntansi yang mencakup hasil residu dan estimasi perolehan SDA.

Harga pokok sumber daya alam mencakup semua biaya yang timbul dari proses perolehan sumber daya tersebut hingga siap untuk dieksploitasi. Terdapat tiga elemen utama dalam harga pokok sumber daya alam, yaitu:

1. Harga Perolehan : Semua pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak untuk mencari dan mengakses sumber daya alam.
2. Biaya Eksplorasi : Biaya yang terkait dengan upaya pencarian, penelitian, dan penemuan sumber daya alam di lokasi tertentu.

3. Biaya Pengembangan Nonfisik : Biaya yang muncul dalam rangka pengembangan sumber daya alam yang sudah ditemukan, agar bisa dieksploitasi secara maksimal.

Beban deplesi untuk setiap periode dihitung berdasarkan jumlah produksi yang diperoleh dalam periode tersebut. Deplesi merujuk pada pengurangan nilai sumber daya alam akibat eksploitasi selama periode tertentu. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, deplesi mengindikasikan pengurangan yang bersifat permanen terhadap stok sumber daya, sedangkan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, meskipun dapat diperlambat melalui usaha konservasi, dampak terhadap lingkungan tetap akan terasa dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih.

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan deplesi adalah:

1. Harga perolehan sumber daya;
2. Perkiraan nilai sisa setelah eksploitasi selesai;
3. Perkiraan potensi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara ekonomi.

Contohnya, pada tambang batubara yang menyebabkan kerusakan tanah, perhitungan deplesi lebih menekankan pada penurunan nilai tanah akibat eksploitasi, daripada penyesuaian nilai tanah itu sendiri. Sehingga, pencatatan lebih difokuskan pada deplesi, bukan pada nilai tanah.

Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, konsep yang dikenal sebagai *Hotelling rent* digunakan, dimana harga pasar dari sumber daya alam dikurangi dengan biaya marginal pengambilannya. Total *rent* dapat diperoleh dengan mengalikan satuan *rent* dengan volume sumber daya yang dieksploitasi. Meskipun metode ini dapat diterapkan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dalam praktiknya perhitungan ini sering tidak tepat karena sulitnya menentukan biaya marginal, sehingga biaya rata-rata sering digunakan sebagai pengganti untuk pendekatan yang lebih sederhana.

2.1.3. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan merujuk pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan, yang mengakibatkan terganggunya fungsi alami komponen-komponen lingkungan. Pada dasarnya, degradasi ini timbul akibat campur tangan manusia yang berlebihan terhadap sistem lingkungan, yang seharusnya berjalan sesuai dengan mekanisme alamiah. Salah satu bentuk degradasi yang sering terlihat adalah kerusakan pada lahan dan tanah, yang terjadi akibat aktivitas manusia dalam proses pembangunan. Penggunaan lahan secara intensif serta masuknya bahan pencemar, baik dalam bentuk padat maupun cair, ke lingkungan yang sebelumnya tidak terdapat substansi tersebut juga dapat memicu degradasi. Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti penambangan timah, batu bara, dan emas, juga turut berperan dalam proses degradasi lingkungan. Secara alami, tanah akan tercemar oleh erosi, tetapi proses alami ini biasanya diimbangi oleh pelapukan dan pembentukan tanah baru. Seperti halnya air, kualitas tanah pun bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Degradasi lingkungan merupakan fenomena penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pembangunan, yang berujung pada tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, degradasi ini terjadi ketika kondisi lingkungan alami terganggu, menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati dan membahayakan kesehatan lingkungan. Penyebab degradasi bisa bersumber dari faktor alam atau ulah manusia. Dampak yang ditimbulkan cukup luas, seperti penurunan hasil pertanian, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya ketahanan pangan.

Degradasi lingkungan menjadi penyebab utama penurunan kualitas lingkungan akibat tindakan manusia, yang membuat komponen lingkungan tidak berfungsi dengan baik. Intervensi manusia yang berlebihan terhadap lingkungan alami menyebabkan kerusakan yang terlihat pada pencemaran udara dan air. Untuk

mengukur dampak degradasi ini, kita dapat menghitung penurunan nilai dari aliran manfaat lingkungan yang dapat diperoleh. Perhitungan ini umumnya didasarkan pada nilai marginal yang diterima oleh konsumen akibat adanya pencemaran tambahan. Sebuah tantangan muncul dalam hal pengukuran nilai barang yang tidak diperdagangkan di pasar. Oleh karena itu, teknik penilaian langsung dapat digunakan, misalnya dengan mengukur kesediaan masyarakat untuk membayar (*willingness to pay*) atau untuk menerima kompensasi (*willingness to accept*) terkait dampak degradasi tersebut.

Degradasi lahan adalah salah satu jenis degradasi lingkungan yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk erosi, angin, dan aktivitas manusia yang bersifat mekanis. Meskipun ada banyak jenis degradasi lahan akibat ulah manusia, beberapa bentuk degradasi yang lebih umum dijumpai antara lain:

1. Pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pertanian, industri, pertambangan, dan kegiatan komersial lainnya;
2. Kehilangan lahan yang bisa digunakan untuk pertanian akibat konversi lahan menjadi permukiman atau area tempat tinggal manusia;
3. Pencemaran radioaktif akibat aktivitas manusia, yang biasanya terjadi secara tidak sengaja;
4. Kerusakan lahan sebagai dampak dari konflik bersenjata;
5. Dan sejumlah bentuk degradasi lainnya.

Sebagian besar penyebab degradasi lahan berkaitan dengan praktik pertanian. Beberapa penyebab utama degradasi lahan antara lain:

1. Pembersihan lahan yang tidak dikelola dengan baik;
2. Penggembalaan ternak yang berlebihan;
3. Pengelolaan irigasi yang tidak tepat dan pengambilan air yang berlebihan;
4. Pembajakan tanah secara berlebihan;
5. Dan faktor-faktor lainnya.

Selain degradasi pada aspek fisik lingkungan, kerusakan lingkungan juga dapat terjadi pada aspek sosial. Degradasi fisik mencakup pencemaran udara, air, dan suara yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Di sisi lain, degradasi sosial dapat terlihat dalam bentuk kemacetan lalu lintas yang parah, penumpukan sampah di berbagai tempat, serta berkembangnya pola hidup materialistis dan individualistis di masyarakat yang semakin meluas.

2.1.4. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Pengembangan Ruang dan Infrastruktur

Pembangunan yang hanya berfokus pada tujuan jangka pendek, akan berisiko menyebabkan pemborosan sumber daya yang tidak produktif. Jika pola ini terus dilanjutkan, suatu saat sumber daya yang ada akan habis, yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan menghentikan proses kehidupan itu sendiri. Untuk mencegah hal tersebut, maka dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan ruang dan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Lebih jauh, pembangunan berkelanjutan berupaya memastikan keberlanjutan dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Ekonomi Berkelanjutan: Pembangunan harus dijalankan dengan cara yang menjaga keseimbangan ekonomi jangka panjang, memastikan bahwa proses pembangunan dapat terus berlanjut tanpa merusak basis ekonomi itu sendiri.
2. Sosial, Budaya, dan Politik yang Berkelanjutan: Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan sosial dan budaya, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, budaya, atau politik.
3. Lingkungan yang Berkelanjutan: Setiap proses pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan cara mengelola sumber daya alam

secara bijak agar tidak merusak ekosistem dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Beberapa pendekatan yang perlu diperhatikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. **Pendekatan Terpadu dan Menyeluruh**

   Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan integratif, dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada di wilayah yang sedang direncanakan, serta dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini mengharuskan kita untuk melihat masalah tidak hanya dari perspektif lokal atau kawasan sempit, tetapi juga dengan melihat interaksi dan hubungan antar wilayah, baik yang lebih dekat maupun lebih jauh. Selain itu, pendekatan ini juga mengutamakan penyelesaian masalah secara holistik, yang tidak hanya dilakukan secara sektoral, namun dengan koordinasi dan keselarasan antar sektor untuk mencapai hasil yang optimal.

2. **Pendekatan Berdasarkan Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan**

   Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan tata ruang yang berfokus pada kapasitas daya dukung lingkungan. Pendekatan ini sangat penting dalam merancang pembangunan yang ramah lingkungan, karena lingkungan berperan kunci dalam keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan keterbatasan daya dukung dan kemampuan lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia.

3. **Pendekatan Berdasarkan Kesesuaian Ekologi dan Sumber Daya Alam**

   Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

   a. Daerah Rawah Banjir : Dalam merencanakan daerah rawan banjir, perencanaan dan pengelolaan saluran alam yang efisien sangat diperlukan untuk mencegah potensi bencana banjir. Saluran drainase harus dirancang mengikuti kemiringan tanah untuk memastikan aliran air yang lancar.

b. Topografi: Dalam perencanaan, kondisi topografi wilayah menjadi faktor penting untuk menentukan pemanfaatan lahan secara optimal, serta untuk memahami karakteristik alam dan potensi lahan yang ada di wilayah tersebut.

Pendekatan-pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya efisien, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak keseimbangan alam dan ekosistem.



Gambar 2. 2. Pembangunan yang Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam

Sumber: diadaptasi dari Model Ekonomi Neoklasik Solow-Swan, (1956)

2.1.5. Urgensi PDRB Hijau

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang kini dihadapkan pada tantangan yang signifikan, salah satunya adalah berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut terhadap lingkungan dan sumber daya alam, paradigma pembangunan harus bergeser menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan atau yang dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Sachs (2015), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan

mereka. Sebagai respons terhadap perubahan paradigma ini, indikator ekonomi yang selama ini digunakan, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung berdasarkan sistem akuntansi nasional (SNA), perlu digantikan dengan PDB Hijau (*Green GDP*). Konsep PDB Hijau ini menghitung output ekonomi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, yang menggabungkan ekonomi dan aspek keberlanjutan dalam satu sistem penghitungan terpadu (Sachs, 2015). Penerapan PDB Hijau juga semakin penting di tingkat lokal, seperti yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan akses informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (United Nations Environment Programme [UNEP], 2011).

2.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025

Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 mengenai Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat. Pembentukan kabupaten ini dianggap sebagai momen penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bandung Barat. Selain itu, visi ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap percepatan kemajuan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan bahkan secara nasional.

Visi pembangunan daerah merupakan wujud pelaksanaan amanat rakyat kepada pemerintah daerah dengan tujuan menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah yang: Cerdas, Maju, Makmur, dan Agamis. Penjabaran dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cerdas, Semua elemen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat, diharapkan memiliki pendidikan yang baik, akhlak mulia, integritas, dan kemampuan bersaing.
2. Maju, Kabupaten Bandung Barat harus terus berkembang dan semakin baik seiring berjalannya waktu, dengan perbaikan yang merata di berbagai sektor kehidupan.
3. Makmur, terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan hasil pembangunan.
4. Agamis, keyakinan agama menjadi landasan yang memperkuat ikatan kebersamaan dalam setiap aspek pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.

Melihat potensi, kondisi perekonomian, serta peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai serta aspirasi yang berkembang di masyarakat, visi pembangunan daerah untuk periode 2005-2025 adalah:

"**Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan**"

Arti dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Agroindustri, meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pertanian yang ada di Kabupaten Bandung Barat melalui proses diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian.
b. Wisata Ramah Lingkungan, mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan budaya, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Misi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai mandat dan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan lima misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif

Misi Kedua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Misi Ketiga : Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing dan berkeadilan

Misi Keempat : Memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Misi Kelima : Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.

Perwujudan Visi dan Misi

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat 2005-2025, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kawasan perkotaan di wilayah utara sebagai penyangga Kota Bandung, sementara wilayah selatan dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan permukiman.
2. Mengembangkan program-program kesehatan masyarakat dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan dan bantuan teknis dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga asing.
3. Komitmen politik dari pimpinan daerah dan seluruh masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah, guna mendukung prioritas pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan pelayanan prima dan penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur komunikasi dan transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah.

5. Mengembangkan program-program pendidikan masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai sumber pendanaan dan bantuan teknis, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga internasional.
6. Meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan mendorong kemitraan antara pengusaha besar dan industri kecil serta menengah. Selain itu, juga perlu adanya peningkatan investasi di daerah dan kerjasama antar daerah.
7. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk memastikan pertumbuhannya optimal.

Arah Pembangunan

I. Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kreatif

Sumber daya manusia adalah elemen yang sangat menentukan dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam semangat kewirausahaan, kreativitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, diarahkan pada tercapainya beberapa kondisi berikut:

a. Mewujudkan pemberdayaan perempuan dan pemuda yang lebih kreatif dan inovatif dalam pembangunan.
b. Menghasilkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan adil, yang mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal, dengan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah.
c. Menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
d. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan di berbagai jenjang.

e. Mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tampung dan kemampuan wilayah dalam mengelola sumber daya yang ada.
f. Mengubah sistem pendidikan dari Wajib Belajar 9 tahun menjadi Wajib Belajar Menengah 12 tahun yang berkualitas.

II. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah di era demokrasi saat ini. Dengan perubahan sosial yang pesat, yang ditandai dengan peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat menjadi lebih kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pembangunan di Kabupaten Bandung Barat difokuskan pada beberapa tujuan berikut:

a. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat.
b. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi, yang diperoleh melalui struktur organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur birokrasi yang kompeten.
c. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan pemerintahan.
d. Peningkatan kinerja kecamatan dan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.
e. Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

III. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Yang Produktif, Berkeadilan dan Berdaya Saing

Upaya yang terorganisir dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang tercermin dalam kualitas sumber daya manusia, serta perekonomian yang adil dan mampu bersaing ditingkat global dengan memanfaatkan potensi daerah. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk mencapai beberapa kondisi berikut:

a. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
b. Terciptanya iklim usaha yang mendukung investasi di sektor industri pengolahan.
c. Berkembangnya sektor wisata yang berbasis pada prinsip ramah lingkungan.
d. Tercapainya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
e. Terjaganya harga dan ketersediaan bahan pokok.
f. Berkembangnya industri pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
g. Meningkatnya daya beli masyarakat.

IV. Terpeliharanya Kondisi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta sumber daya alam.
c. Peningkatan upaya mitigasi risiko bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan pemeliharaan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembangunan daerah diorientasikan pada beberapa hal berikut:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan.
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung ketersediaan air baku.
c. Peningkatan upaya pencegahan serta pengurangan risiko bencana.
d. Pemeliharaan kawasan lindung yang ada.
e. Pembangunan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

V. Mengintegrasikan Kearifan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Dalam Pembangunan

Pembangunan daerah jangka panjang harus mencakup nilai-nilai agama dan budaya sebagai dasar dalam setiap proses berpikir, bertindak, dan berperilaku. Hal ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, interaksi antar manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Pengembangan serta pelestarian budaya lokal bertujuan menciptakan nilai-nilai yang konstruktif untuk membangun masyarakat yang sejalan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Dalam upaya mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya, pembangunan diarahkan pada tujuan-tujuan berikut:

a. Terwujudnya kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat, serta penguatan identitas dan jati diri masyarakat melalui pengembangan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Terwujudnya masyarakat yang beragama, dengan mengutamakan kerukunan antar umat beragama dan berakhlak mulia.
c. Peningkatan komunikasi antar kelompok masyarakat yang ada di daerah perkotaan dan pedesaan.
d. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat.

2.2.2. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, diperlukan partisipasi masyarakat yang aktif serta penguatan persatuan. Berdasarkan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024- 2026, Tujuan dan sasaran pembangunannya adalah sebagai berikut.

Tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tertib dan Tentram dalam Kerangka Demokrasi

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dari lima (lima) tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, perlu dijabarkan dalam target sasaran yang akan dicapai selama 3 (tiga) pada RPD tahun 2024-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
    1.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
    1.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan;
    1.3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk;
    1.4. Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender; dan
    1.5. Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan.
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan sasaran:
    2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
    2.2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    2.3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha;
    2.4. Terkendalinya Tingkat Kemiskinan;
    2.5. Meningkatnya Ketahanan Pangan; dan
    2.6. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan, dengan sasaran:
    3.1. Meningkatnya Infrastruktur Permukiman;
    3.2. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah;
    3.3. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
    3.4. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana;
    3.5. Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan; dan
    3.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan sasaran:
    4.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;
    4.2. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel;
    4.3. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalisme dan Iklim Kerja Aparatur;
    4.4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    4.5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan

4.6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah.

5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib Dan Tentram Dalam Kerangka Demokrasi, dengan sasaran:
   5.1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   5.2. Menurunnya Potensi Konflik Sosial; dan
   5.3. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat.

2.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat berfungsi sebagai pedoman operasional untuk mengelola dan menyelaraskan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk mengharmonisasikan kepentingan semua pihak terkait dan mengakomodasi pembangunan di tingkat regional maupun nasional dalam konteks daerah. Selain itu, RTRW ini juga menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan dan tata ruang di tingkat yang lebih rendah, dengan tetap memperhatikan perencanaan wilayah perbatasan seperti Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Subang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Tujuan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat

Tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung Barat adalah menciptakan kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Beberapa kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

a. Penetapan sistem pusat pelayanan yang sesuai dengan fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL.

b. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan agar tidak melebihi daya dukung dan daya tampung.
c. Pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri.
d. Mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk melalui peran Wilayah Pengembangan (WP).
e. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga kelestarian lingkungan.
f. Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan.
g. Penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah.
h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
i. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung serta pencegahan kerusakan pada kawasan tersebut.
j. Pengembangan pusat pelayanan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.
k. Mewujudkan keterpaduan dalam kawasan budidaya.
l. Pengendalian kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

Sedangkan strategi untuk setiap kebijakan-kebijakan tersebut antara lain yaitu:

1. Strategi untuk penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan dengan strategi meliputi:
   a. Meningkatkan peran kabupaten sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan. Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional;
   b. Meningkatkan peran PKL perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

c. Meningkatkan peran PKL perdesaan sebagai distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra proudsuatk sik doelenkgsain pdkant perkotaan;
d. Meningkatkan peran PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi PPK untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
e. Meningkatkan peran PPL sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

2. Strategi untuk pengembangan sistem pelayanan yang sesuai dengan kapasitas dan fungsi utama wilayah, antara lain:
    a. Mendorong pembangunan permukiman vertikal di daerah padat penduduk.
    b. Mengatur perkembangan permukiman besar di kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar.
3. Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara guna menjaga kelestarian lingkungan meliputi:
    a. Mengatur pemanfaatan ruang di WP Lembang dan WP Padalarang bagian utara.
    b. Memperkuat peran PKL, PPK, dan PPL untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
4. Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah selatan agar tidak melebihi daya dukung wilayah, mencakup:
    a. Membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko.
    b. Mengembangkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
    c. Membatasi pembangunan di perkotaan agar prasarana tetap memadai dan mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

5. Strategi untuk penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah meliputi:
    a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana yang menghubungkan antar Wilayah Pengembangan (WP).
    b. Membangun sistem transportasi massal serta meningkatkan fasilitas perkotaan dan perdesaan di setiap WP.
    c. Memperbaiki infrastruktur air berbasis DAS untuk mendukung kebutuhan kota, industri, dan pertanian.
    d. Meningkatkan pengelolaan sampah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota.
    e. Meningkatkan pelayanan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kegiatan.
6. Strategi untuk memperkuat peran Wilayah Pengembangan (WP) dalam mendukung pemerataan pertumbuhan dan distribusi penduduk mencakup:
    a. Menetapkan empat WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah.
    b. Memaksimalkan peran masing-masing WP agar tercipta keselarasan pembangunan.
    c. Mengarahkan pengembangan wilayah sesuai dengan potensi dan kendala yang ada di tiap WP.
    d. Memastikan bahwa PKL, PPK, dan PPL berfungsi dengan baik di setiap WP.
    e. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP.
7. Strategi untuk menjaga kelestarian kawasan lindung mencakup:
    a. Merehabilitasi kawasan yang kritis.
    b. Menghentikan kerusakan kawasan hutan.

c. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang mencakup minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

8. Strategi untuk mencegah kerusakan kawasan lindung mencakup:
   a. Melakukan sosialisasi terkait rencana kawasan lindung.
   b. Menegakkan hukum yang terkait dengan perlindungan kawasan lindung.
9. Strategi untuk mengintegrasikan pengelolaan kawasan budidaya mencakup:
   a. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan dengan dukungan prasarana yang berkelanjutan untuk mendorong perekonomian wilayah.
   b. Menyesuaikan kegiatan budidaya dengan kebutuhan di bidang politik, pertahanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
   c. Melestarikan kawasan pertanian pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
   d. Meningkatkan daya saing kecamatan agar dapat memaksimalkan skala ekonomi.
   e. Mengelola sumber daya air di waduk dan danau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
10. Strategi untuk mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah mencakup:
   a. Membatasi ekspansi lahan terbangun di bagian utara kabupaten.
   b. Mengatur penggunaan lahan pertanian, hortikultura, dan perkebunan untuk mengendalikan erosi dan aliran air.
   c. Mengontrol pembangunan di area yang melebihi kapasitas daya dukungnya.
   d. Mengatur kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
11. Strategi untuk mengembangkan pusat kegiatan agroindustri mencakup:
   a. Membangun pusat agroindustri berbasis florikultura di Lembang.
   b. Membangun pusat agroindustri berbasis hortikultura di Cililin.

12. Strategi untuk pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan mencakup:
    a. Mengembangkan wisata alam di jalur utara.
    b. Mengembangkan kawasan wisata di jalur selatan.
    c. Mengembangkan kawasan wisata di jalur barat.
13. Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan mencakup:
    a. Mendukung penetapan kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan.
    b. Mengembangkan kegiatan budidaya selektif di sekitar kawasan pertahanan.
    c. Menetapkan kawasan lindung atau tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona pemisah.
    d. Memelihara aset-aset pertahanan.

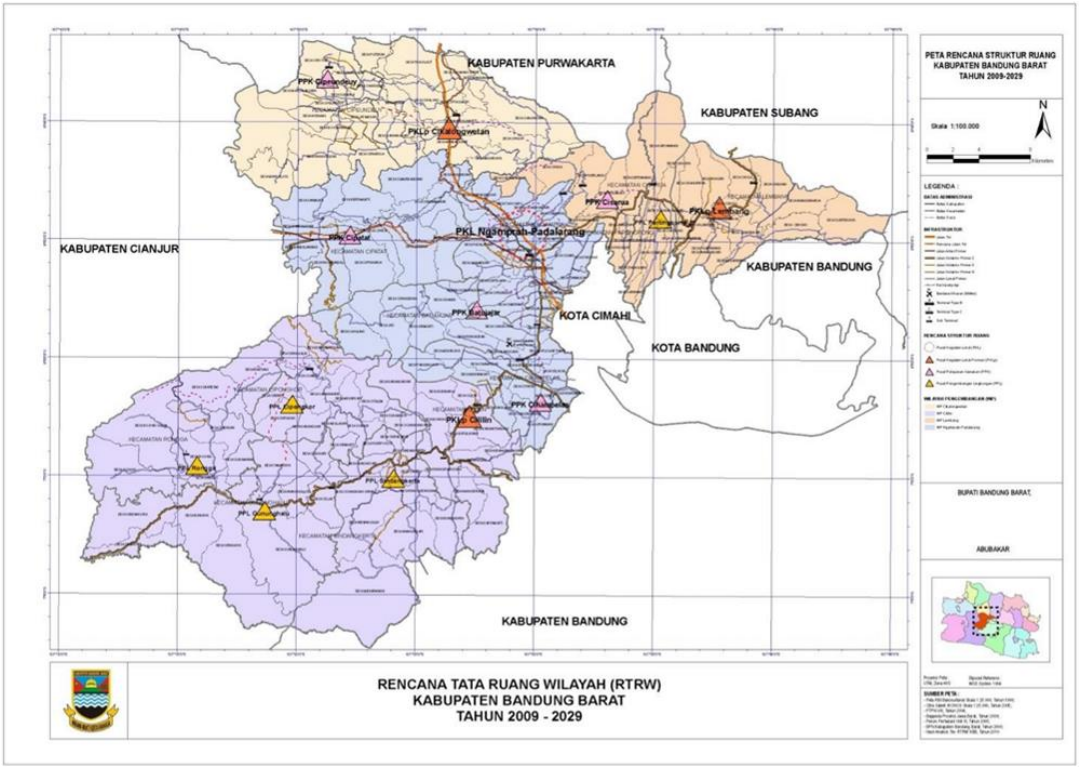
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan.
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Untuk mendistribusikan pembangunan, Kabupaten Bandung Barat memerlukan pusat-pusat yang mendukung perkembangan wilayah, antara lain:

1. Ngamprah : Pusat utama yang berfokus pada pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.
2. Padalarang : Pusat dengan fokus pada industri, perdagangan, dan permukiman.
3. Lembang : Pusat di bagian utara yang mengutamakan pariwisata, permukiman, pertanian, serta kawasan lindung dan konservasi.
4. Cikalongwetan : Pusat di bagian barat utara dengan fokus pada perkebunan dan industri.
5. Cililin : Pusat di bagian selatan yang mengembangkan pariwisata, perkebunan, konservasi, dan permukiman.



Gambar 2. 3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat

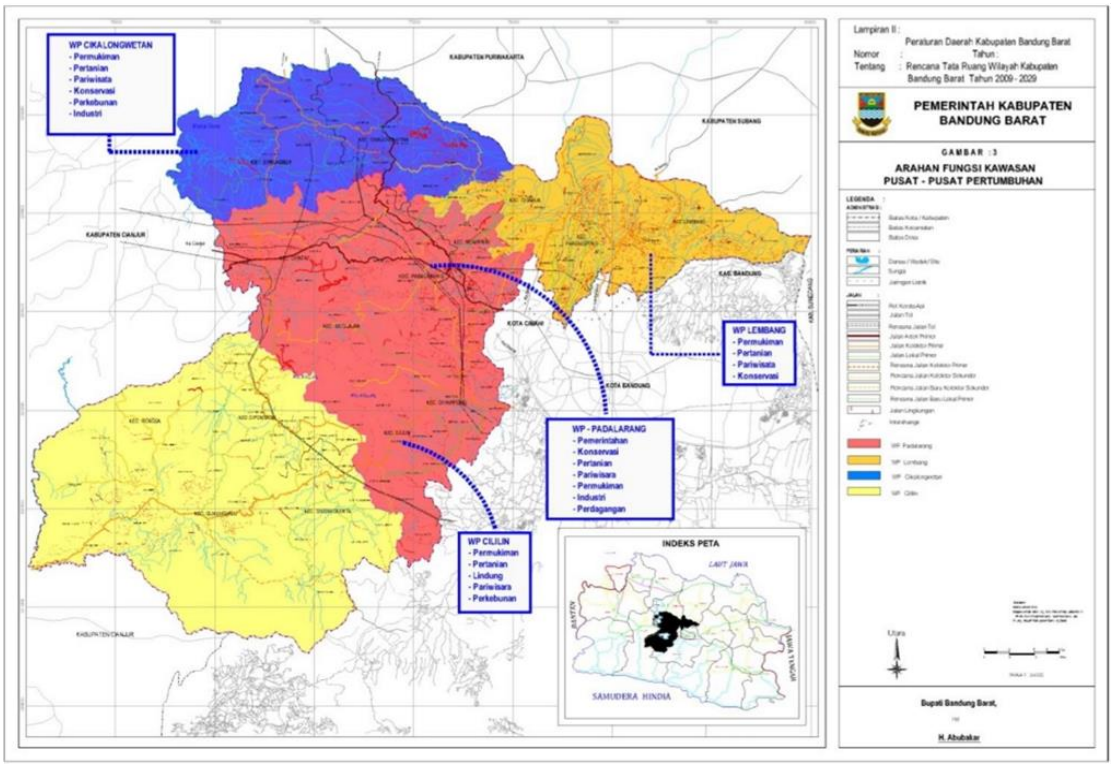
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Berdasarkan struktur ruang tersebut, pembagian sistem pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

a. PKL mencakup Kecamatan Padalarang dan Ngamprah.
b. PKLp meliputi Kecamatan Lembang, Cililin, dan Cikalongwetan.
c. PPK mencakup Kecamatan Cisarua, Batujajar, Cipatat, Cipeundeuy, dan Cihampelas.
d. PPL meliputi:
    1) Desa Pasirpogor, Puncaksari, Cikadu, Cintakarya, Cicangkan Girang, dan Sindangkerta di Kecamatan Sindangkerta.
    2) Desa Cijenuk, Sarinagen, dan Cilangsari di Kecamatan Gununghalu.

3) Desa Sinarjaya, Bunijaya, dan Cilangari di Kecamatan Gununghalu.
4) Desa Cinengah, Cibitung, dan Cibedug di Kecamatan Rongga.
5) Desa Cihanjuang Rahayu di Kecamatan Parongpong.

e. DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) adalah desa yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan, dengan potensi untuk meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya. Desa ini dilengkapi dengan sarana dasar seperti pasar dan sub-terminal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 2. 4. Pusat- Pusat Pertumbuhan Wilayah Pengembangan Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Pembagian Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bandung Barat terbagi ke dalam satu (1) pusat inti wilayah pengembangan dan empat (4) wilayah pengembangan (WP), yaitu:

1. Pusat inti WP berada di Kecamatan Ngamprah-Padalarang dengan fungsi Ngamprah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan Pasalarang sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Cipatat, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Cihampelas;
2. WP Lembang dengan pusat Kota Lembang yang melayani Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;
3. WP Cikalongwetan dengan pusat Kota Cikalongwetan yang melayani Kecamatan Cipeundeuy:

WP Cililin dengan pusat Kota Cililin yang menjadi sub pusat kota yang melayani kecamatan sekitarnya yaitu Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu, dan Kecamatan Rongga.

Tabel 2. 1. Arahan Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Bandung Barat

Wilayah Pengembangan	Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pelayanan	Fungsi Utama Kawasan
Pusat WP Ngamprah -Padalarang	Padalarang Ngamprah	➢ Cihampelas ➢ Batujajar ➢ Cipatat	Pemerintahan, Perumahan dan Permukiman, Konservasi, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Jasa
WP Lembang	Lembang	➢ Parongpong ➢ Cisarua	Perumahan dan Permukiman, Konservasi, Pertanian, Pariwisata
WP Cikalongwetan	Cikalongwetan	➢ Cipeundeuy	Perumahan dan Permukiman, Konservasi, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perkebunan

Wilayah Pengembangan	Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pelayanan	Fungsi Utama Kawasan
WP Cililin	Cililin	➢ Cipongkor ➢ Rongga ➢ Gununghalu ➢ Sindangkerta	Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Pariwisata, lindung, Perkebunan

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Rencana pengembangan infrastruktur utama di Kabupaten Bandung Barat mencakup:

1. Jaringan transportasi darat
2. Jaringan kereta api

Jaringan jalan di Kabupaten Bandung Barat memiliki pola radial yang mengarah ke Kota Bandung, dengan jalan utama yang membentang langsung dari pusat kota tersebut. Pola ini mencerminkan bahwa arah perkembangan wilayah terpusat ke Kota Bandung. Konsep pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. Membangun jaringan yang terhubung dengan perkembangan wilayah di masa depan:
   a. Meningkatkan akses antara Kecamatan Ngamprah (PKL-1) dan Kawasan Perkotaan Bandung Raya.
   b. Meningkatkan konektivitas Kabupaten Bandung Barat dengan PKN Jabodetabek.
   c. Memperkuat hubungan Kabupaten Bandung Barat dengan PKL di wilayah sekitar.
2. Jaringan jalan harus menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan memperhatikan pentingnya fungsi konservasi.

3. Pengaturan hirarki jalan sesuai dengan peran kota atau kawasan yang dihubungkan.
4. Melakukan pengembangan lebih lanjut pada jaringan jalan.

Berdasarkan konsep tersebut, rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari:

A. Pengembangan Jaringan Jalan Primer

1. Jalan Tol, jalan tol yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah:
   a. Tol Cipularang;
   b. Jalan Akses Tol Padalarang;
   c. Jalan Akses Tol Cikamuning.

   Rencana jalan tol yang akan dikembangkan adalah:
   a. Interchange Warungdomba;
   b. Jalan Tol Padalarang-Ciranjang-Sukabumi;
   c. Underpass tol Cipularang dan Stasiun Padalarang.
2. Peningkatan ruas jalan alternatif Bandung Lembang:
   a. Ruas jalan Padalarang - Stasiun Cisarua; dan
   b. Ruas jalan Hajigopur - Pakuhaji.
3. Peningkatan dan pengembangan fungsi jalan arteri dan kolektor 1 bukan tol:
   a. Ruas Citarum - Rajamandala Batas Kota Padalarang:
   b. Eks Tol Rajamandala, dan
   c. Jalan Raya Rajamandala.
4. Rencana pembangunan dan peningkatan fungsi ruas jalan menjadi arteri:
   a. Cimahi Gadobangkong Padalarang Cipatat Cianjur,
   b. Padalarang - Cikalongwetan - Purwakarta;
   c. Cisomang-Batas Kota Padalarang.
5. Pengembangan fungsi jalan kolektor 2:
   a. Ruas jalan Raya Cimareme Batujajar,

b. Jalan Batujajar - Selacau;
c. Jalan Cangkorah - Batas Kota Cimahi;
d. Jalan BBS-Patrol: dan
e. Jalan Raya Bandung - Lembang.

B. Pengembangan Jaringan Kolektor Primer

Rencana peningkatan jalan kolektor primer berdasarkan status dan fungsi jalan adalah sebagai berikut:

1. Lembang - Parongpong - Cimahi
2. Selacau - Cililin - Cisokan
3. Cihampelas - Cipatik
4. Jelekong - Cimahi
5. Lembang - Subang
6. Akses Tol Cikalong
7. Akses Tol Cikalong Lanjutan
8. Cicalengka - Sawahbera
9. Gununghalu - Datarpuspa
10. Rancapanggung - Cijenuk
11. Cijenuk - Saguling
12. Saguling - Rajamandala
13. Cikalongwetan - Cipeundeuy - Rajamandala
14. Cisomang - Cipada
15. Cipada - Pasirlagu - Barukai

Rencana jalan baru kolektor primer:

1. Akses Tol Cikaleng
2. Cijeunjeung - Kertajaya
3. Sudimampir - Pos Kidul

4. Ciapadangmanah - Sudimampir
5. Babakanloa - Sudimampir
6. Cebek - Gor Soreang
7. Kb. Kalapa - Curugagung
8. Lingkar Selatan Padalarang - Cigintung
9. Lingkar Selatan - Padalarang

C. Pengembangan Jaringan Kolektor Sekunder

Rencana peningkatan jalan kolektor sekunder di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Simpang Orion - Cihaliwung
2. Rancabali - Purabaya
3. Purabaya - Jati - Saguling
4. Gantungan - Purabaya
5. Cisarua - Cipada - Cisomang
6. H. Gofur - Pakuhaji
7. Cangkorah - Giri Asih
8. Cangkorah - Cimerang
9. Cibacang Hilir - Kota Baru Parahyangan
10. Wangsa Puspa - Sidomampir Kidul - GA Manulang - Jalan Raya Padalarang
11. Purabaya - Babakanloa - Cipadangmanah - Jalan Raya Padalarang
12. Datarpuspa - Ciwidey
13. Cipatik - Lawi Sapi
14. Batujajar - SMP Batujajar
15. Bunijaya - Rongga
16. Rongga - Cipari
17. Cipeundeuy - Cipicung

18. Salakuning - Cipada
19. Kb. Kalapa - Pasar Calung
20. Cihanjuang - Batas Gegerkalong
21. Cikole - Cikarumbi
22. Lembang - Maribaya
23. Maribaya - Patrol - Cibodas - Palintang
24. Cihampelas - Tanjungjaya
25. Kertamukti - Sarimukti
26. Cimanggu - Pasirlanggu
27. Lembang - Genteng
28. Puncrut - Pagerwangi
29. Cijenuk - Puncaksari / Pasirpogor
30. Celak - Sodong
31. Jalan Gedong Lima
32. Jalan H. Gofur - Jalan Cibodas - Jalan Pasir Halang
33. Jalan Pakuhaji - Jalan Cibodas - Jalan Pasir Halang
34. Jalan Pangkalan - Jalan Cibayun
35. Jalan Raya Cihaliwung - Cihaliwung Wetan - Jalan Ngamprah
36. Jalan Raya Purwakarta - Tegallaja - Jalan Pangkalan
37. Jalan Raya Purwakarta - Desa Mekarjaya - Desa Cipada 1
38. Purabaya - Batujajar

Rencana jalan baru kolektor sekunder:

1. Kertamukti - Mangunjaya
2. Mandalamukti - Cipada
3. Jalan Lingkar Batujajar Timur - Selacau
4. Jalan PLTA Cisokan

5. Ciburuy - Ngamprah
6. Mandalasari - Cipada
7. Sandangmekar - Cipada II

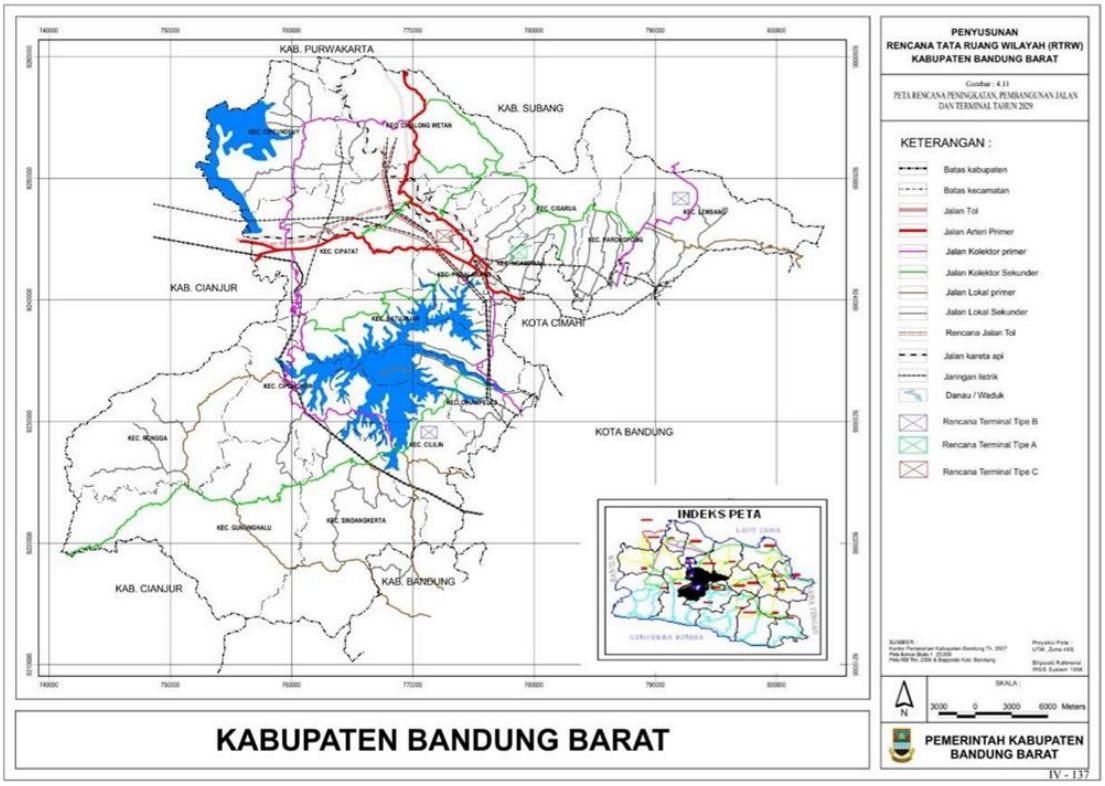
D. Pengembangan Jaringan Lokal Primer

Rencana peningkatan jalan lokal primer di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Kertawangi - Mangunjaya
2. Mandalamukti - Cipada
3. Ciririp - Bangsaya
4. Cikadu - Rancasenggang
5. Sindangkerta - Weninggalih
6. Cisarongge - Sodong
7. Gununghalu - Tamanjaya - Cibenda
8. Selacau - Margaasih
9. Tipar - Cibeber

Rencana jala baru lokal primer di Kabupaten Bandung Barat, meliputi:

1. Situ Enda-Gembol
2. Maribaya-Sekebulu
3. Curugagung-Panaris
4. Curugagung
5. Panaris



Gambar 2. 5. Rencana Peningkatan Jalan Dan Pengembangan Terminal Di Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung Barat

Rencana pola ruang di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas:

A. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung seluas ± 19.956 Ha (15,28%):
   a. Kecamatan Lembang ±3.477 Ha;
   b. Kecamatan Parongpong ±1.663 Ha;
   c. Kecamatan Cisarua +1.309 Ha;

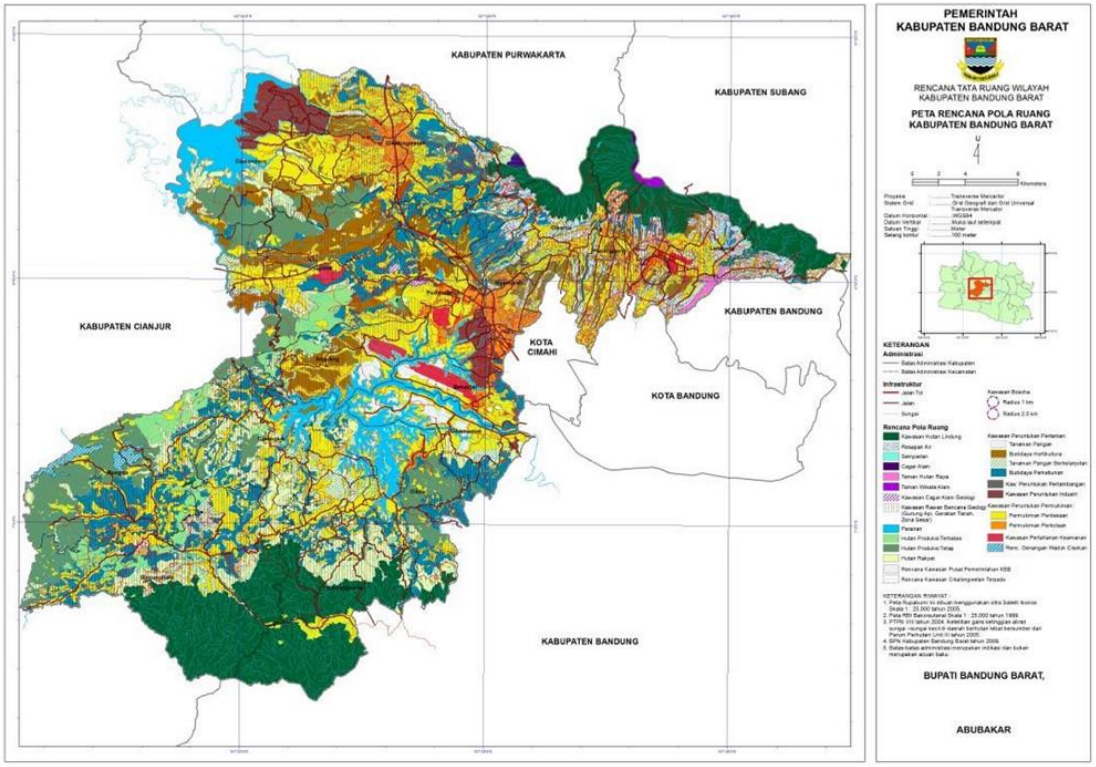
d. Kecamatan Cikalongwetan ± 383 Ha.
e. Kecamatan Cipatat± 5 Ha;
f. Kecamatan Cililin±312 Ha;
g. Kecamatan Rongga ± 25 Ha;
h. Kecamatan Sindangkerta± 6.481 Ha;
i. Kecamatan Gununghalu+ 6.301 Ha.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air seluas±14.908 Ha:
   a. Kecamatan Cikalongwetan ± 3.416 Ha;
   b. Kecamatan Cisarua ±3.412 Ha;
   c. Kecamatan Lembang ± 4.784 Ha;
   d. Kecamatan Ngamprah±1.076 Ha;
   e. Kecamatan Padalarang 496 Ha;
   f. Kecamatan Cipatat + 39 Ha;
   g. Kecamatan Parongpong ±1.685 Ha.
3. Kawasan perlindungan setempat sempadan sungai di seluruh DAS Citarum dan sungai-sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
4. Kawasan perlindungan setempat sempadan danau/situ/waduk, meliputi:
   a. Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy;
   b. Waduk Saguling di Kecamatan Saguling, Kecamatan Cililin, Cihampelas, Batujajar, dan Cipongkor,
   c. Waduk Cisokan di Kecamatan Rongga;
   d. Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang,
   e. Situ Lembang di Kecamatan Parongpong; dan
   f. Situ Lembang Dano dan Situ Cibanteng di Kecamatan Cikalongwetan.
5. Kawasan perlindungan setempat sekitar mata air di wilayah perbukitan utara, timur dan selatan;

6. Kawasan Cagar Alam seluas + 164 Ha, meliputi:
    a. Cagar Alam Yung Hun dengan luas kurang lebih 2 Ha di Kecamatan Lembang:
    b. Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu ± 76 Ha di Kecamatan Cisarua dan Parongpong; dan
    c. Cagar Alam Gunung Burangrang ±86 Ha di Kecamatan Cikalongwetan.
7. Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda ± 271 Ha;
8. Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Perahu + 136 Ha;
9. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan:
    a. Kawasan Obervatorium Bosscha di Kecamatan Lembang;
    b. Kawasan Kampung Budaya Goa Pawon di Kecamatan Cipatat;
    c. Kawasan Gua Terusan Air Sanghiang Tikoro di Kecamatan Cipatat;
    d. Kawasan Objek Wisata Situs Batu Payung di Kecamatan Cililin;
    e. Kawasan Objek Wisata Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin; dan
    f. Kawasan Objek Wisata Ziarah Makam Tiga Walilyullah di Kecamatan Cipongkor.
10. Kawasan Rawan Bencana Alam:
    a. Bagian utara KBB di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan dan Cipatat,
    b. Bagian selatan KBB di Kecamatan Cililin, Cipongkor, dan Sindangkerta.
11. Kawasan Cagar Alam Geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon;
12. Kawasan Karst di Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Lembang;
13. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi:
    a. Kawasan rawan bencana alam letusan gunung api Tangkubanperahu±1.038 Ha di Kecamatan Lembang, Ngamprah, Parongpong, dan Cisarua;
    b. Kawasan rawan gempa bumi tektonik di daerah rawan gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bumi;
    c. Kawasan rawan gerakan tanah ± 37.141 Ha;

d. Kawasan zona sesar aktif Cimandiri (Pelabuhanratu-Padalarang) dan sesar lembang±196 Ha di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua.

B. Kawasan Budidaya



Gambar 2. 6. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Rencana pola ruang kawasan budidaya ditentukan sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 3.521 Ha, meliputi Kecamatan Cililin, Cipatat, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Parongpong, Rongga dan Saguling;
b. Kawasan hutan produksi tetap seluas 10.214 Ha, meliputi Kecamatan Cihampelas, Cikalongwetan, Cililin, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Parongpong, Rongga, dan Saguling;

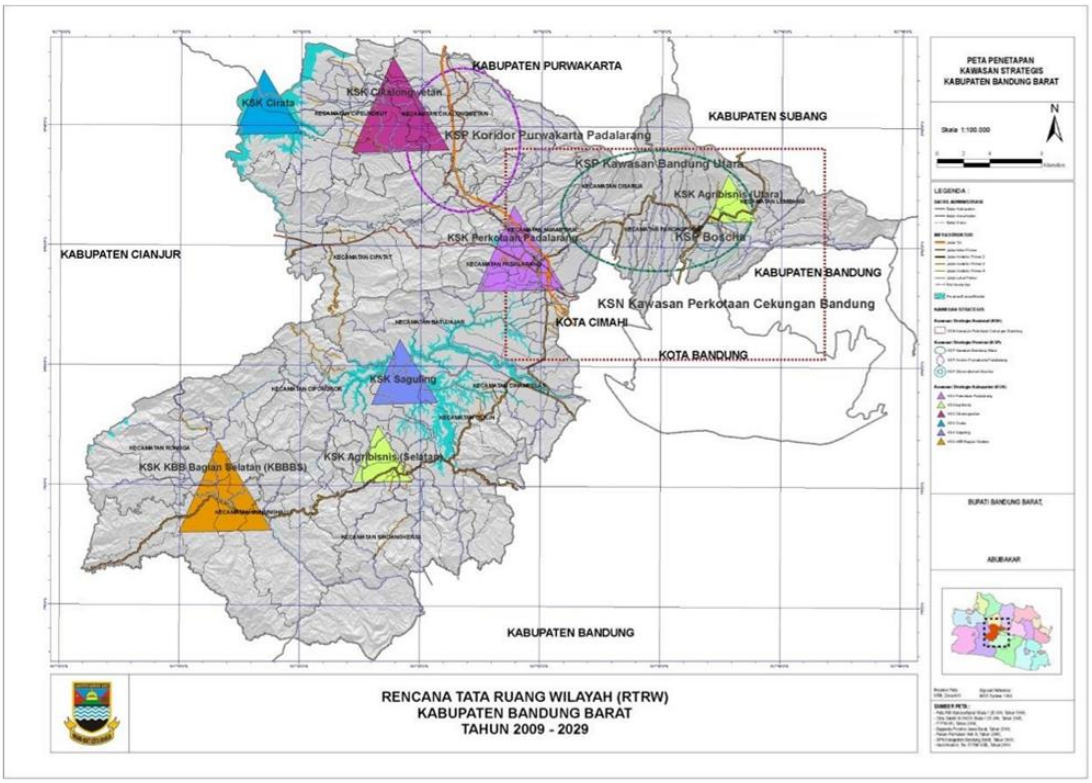
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat seluas ± 3.441 Ha.
3. Kawasan Peruntukan Pertanian
   a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas ±1.731 Ha, meliputi Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cikalongwetan, Cililin, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Lembang, Ngamprah, Padalarang, Parongpong, Saguling, dan Sindangkerta;
   b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas ± 8.039 Ha, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Cisarua, Lembang, Ngamprah, Padalarang, Parongpong dan Saguling;
   c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas + 3.701 Ha di Kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy, Rongga, Sindangkerta, dan Gununghalu;
   d. Kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cipongkor, Sindangkerta dan Gununghalu;
   e. Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas±1.026 Ha di Kecamatan Cihampelas, Cililin, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Gununghalu dan Sindangkerta.
4. Kawasan Peruntukan Perikanan di Waduk Saguling, Waduk Cirata, Kecamatan Cipatan, Padalarang dan Cipeundeuy
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cipatat, Padalarang, dan Saguling

6. Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 2.266 Ha di Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cikalongwetan, Cipatat, Cipeundeuy, Ngamprah, dan Padalarang
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Sindangkerta, Cililin, Rongga, Padalarang, Cipatat, Ngamprah, Cikalongwetan dan Cipeundeuy
8. Kawasan Peruntukan Permukiman
    a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas 2.823 Ha di Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cikalongwetan, Cililin, Lembang, Ngamprah dan Padalarang;
    b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan± 14.922 Ha;
    c. Kawasan perumahan mandiri di Kecamatan Padalarang.
9. Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas ± 1.250 Ha di Kecamatan Batujajar, Saguling, Lembang, Parongpong, Padalarang, Cisarua dan Cipatat.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

Penetapan kawasan strategis kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi Kawasan Bandung Utara (KBU), KSP Koridor Purwakarta - Bandung, dan KSP Observatorium Boscha.

1. KSK dari sudut kepentingan sosial ekonomi: KSK Padalarang, KSK Cikalongwetan, dan KSK Agribisnis Lembang dan Cililin;
2. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan tekonologi tinggi: KSK KBB Bagian Selatan; kawasan PLTA Cisokan;
3. KSK dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup: Kawasan Saguling dan Cirata.



Gambar 2. 7. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

BAB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

3.1.1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Pendekatan Perencanaan Teknokratis

Teknokrasi, yang berasal dari kata *techné* (teknik) dan *kratein* (memerintah), merujuk pada sistem pemerintahan yang mengutamakan prinsip-prinsip teknologi, seperti efisiensi, produktivitas, perencanaan yang terstruktur, dan penerapan teknik-teknik terkini (*state of the art*). Dalam konteks pembangunan, pendekatan teknokratis menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan demi kepentingan publik, dengan dasar pertimbangan teknis yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Model ini sering dikaitkan dengan pendekatan pembangunan *top-down,* dimana keputusan-keputusan pembangunan dibuat oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara langsung pada masyarakat serta pemerintah daerah di bawahnya.

Perencanaan yang mengadopsi pendekatan teknokratis lebih menekankan penggunaan metode ilmiah dan kerangka berpikir analitis untuk mengevaluasi kondisi objektif dan merancang berbagai kemungkinan skenario pembangunan. Ini dilakukan oleh lembaga atau struktur yang memang memiliki fungsi khusus dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan dengan pendekatan teknokratik termasuk dalam kategori non-partisipatif, karena masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut Stone (2005), perencanaan teknokratis adalah proses yang menggunakan data dan analisis yang dilakukan oleh para profesional atau ahli dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Para pengamat ini, yang mungkin tidak langsung mengalami situasi tersebut, menggunakan pengetahuan dan keahlian

mereka untuk menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar, dan merumuskan perspektif akademis yang mendasari strategi pembangunan yang lebih efektif. Pendekatan ini mengandalkan keahlian teknis untuk merancang kebijakan yang lebih rasional dan berbasis data.

Pengamat dalam konteks ini bisa berasal dari berbagai pihak, baik pejabat pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun akademisi dari perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan teknokratik dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan metode analitis yang diterapkan oleh lembaga atau satuan kerja yang memiliki tugas fungsional terkait hal ini. Proses ini melibatkan harmonisasi antara rancangan teknokratik Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dengan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sinkronisasi ini dilakukan melalui pertemuan trilateral antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMN yang mengacu pada RPJPN 2005-2025, khususnya untuk periode pembangunan 2024 - 2026 harus memastikan bahwa visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang direncanakan untuk lima tahun ke depan fokus pada pencapaian target-target RPJMN 2018-2023. Dalam proses penyusunan Renstra K/L dengan pendekatan teknokratis, penting untuk memasukkan data hasil evaluasi pembangunan yang ada, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah pembangunan yang akan datang.

Pendekatan Perencanaan Partisipatif

Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, termasuk dalam penyediaan lahan untuk

mendukung ketahanan pangan. Saat ini, konsep partisipasi telah menjadi elemen penting dalam setiap proyek pembangunan dan harus tercantum dalam kebijakan serta proposal yang diajukan. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif, kolaborasi, atau proses bersama dimana individu atau kelompok masyarakat saling berinteraksi, merencanakan, menganalisis, dan bertindak bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kusumawati (2010), partisipasi berakar pada adanya pemahaman bersama antara anggota masyarakat yang terbentuk melalui komunikasi dan interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Agar partisipasi berjalan efektif, diperlukan dua kondisi utama: (1) terciptanya ruang yang demokratis atau terbuka, dan (2) terbentuknya rasa kebersamaan di antara semua pihak yang terlibat. Sementara itu, menurut Suryana (2008), partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencakup keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, serta dalam menikmati manfaat yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Bove (2003) dalam Mulyana (2011) mengidentifikasi tiga bentuk utama partisipasi dalam konteks pembangunan demokratis, yakni: 1) partisipasi politik (Political Participation), 2) partisipasi sosial (Social Participation), dan 3) partisipasi warga negara (Citizen Participation).

Pendekatan Perencanaan Top Down

Pendekatan perencanaan top-down adalah metode yang mengubah rencana induk menjadi rencana yang lebih rinci. Rencana yang lebih detail di tingkat bawah berfungsi sebagai implementasi dari rencana induk yang ada di tingkat atas. Pendekatan ini sering diterapkan dalam perencanaan sektoral, dimana tujuan nasional dijabarkan ke dalam aktivitas di berbagai daerah untuk mencapai sasaran tersebut. Pada fase awal pembangunan, pendekatan top-down lebih dominan, terutama karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam model ini,

keputusan diambil oleh pihak atasan tanpa memperhitungkan seluruh aspirasi dari kelompok yang lebih luas, dengan bawahan hanya berperan sebagai pelaksana.

Dalam konteks pemerintahan, perencanaan top-down merujuk pada proses dimana pemerintah merumuskan rencana yang kemudian disampaikan kepada masyarakat, yang hanya berperan sebagai pelaksana. Pendekatan ini menekankan agar pihak bawah mengikuti arahan atasannya tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di tingkat bawah. Proses perencanaan ini bisa berlangsung cepat, tetapi sering kali ada informasi yang terlewat karena terbatasnya komunikasi dan forum diskusi. Hal ini sering mengarah pada kepatuhan yang terpaksa, meskipun pendekatan ini mungkin efektif dalam jangka pendek.

Pendekatan Perencanaan Bottom Up

Bottom-up planning adalah pendekatan perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh pihak bawah, dimana atasan berperan untuk menetapkan kebijakan atau keputusan dan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam konteks pemerintahan, perencanaan bottom-up merujuk pada proses yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat atau pihak terkait, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan merupakan hasil kesepakatan bersama, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen penuh untuk pelaksanaan. Namun, kekurangan dari pendekatan ini adalah kebutuhan akan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk menyusun perencanaan.

3.1.2. Pendekatan Perencanaan Di Indonesia

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu mekanisme perencanaan yang dirancang untuk menghasilkan rencana pembangunan di berbagai periode waktu—jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan—yang melibatkan

pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Proses pembangunan nasional dilakukan dengan menerapkan prinsip demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan sosial, keberlanjutan, kesadaran terhadap lingkungan, dan kemandirian, sambil memastikan tercapainya keseimbangan antara kemajuan dan persatuan negara.

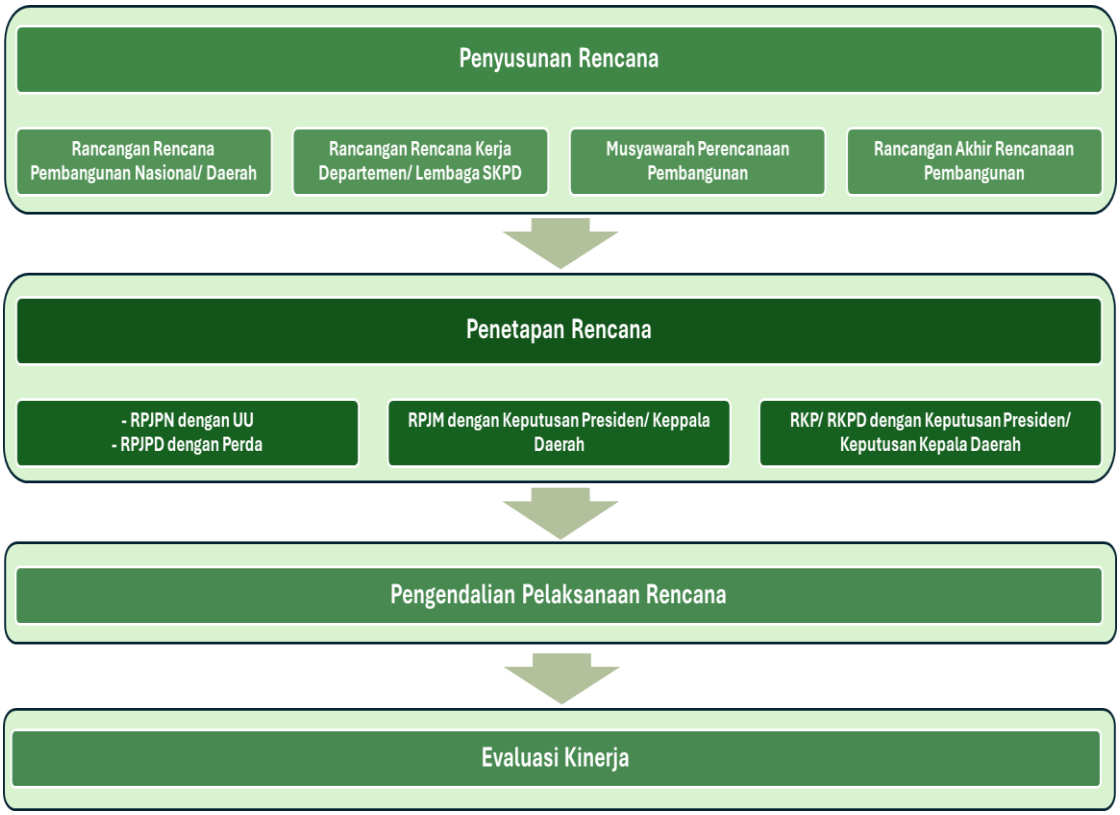
Perencanaan pembangunan nasional disusun dengan pendekatan yang sistematis, terarah, dan komprehensif, serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berikut: (1) kepastian hukum; (2) keteraturan dalam penyelenggaraan negara; (3) prioritas pada kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) keseimbangan proporsionalitas; (6) profesionalisme; dan (7) akuntabilitas.

Adapun tujuan utama dari SPPN antara lain adalah:

- Memfasilitasi koordinasi antar pelaku pembangunan;
- Memastikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara pemerintah pusat dan daerah;
- Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan; dan
- Memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.

Proses perencanaan dalam SPPN melibatkan beberapa tahapan, yang meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta proses perencanaan top-down dan bottom-up. Pendekatan politik menghasilkan rencana pembangunan yang berasal dari hasil proses politik, terutama dalam mengartikulasikan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Proses teknokratik dilakukan

dengan menggunakan metode dan pendekatan ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang memiliki tugas terkait. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa semua pihak terkait, terutama masyarakat, terlibat melalui mekanisme seperti musrenbang. Sementara itu, proses top-down dan bottom-up dilakukan berdasarkan jenjang struktur pemerintahan yang ada, dengan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan.



Gambar 3. 1. Bagan Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Sumber: diolah dari UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memilki beberapa tahapan perencanaan seperti berikut:

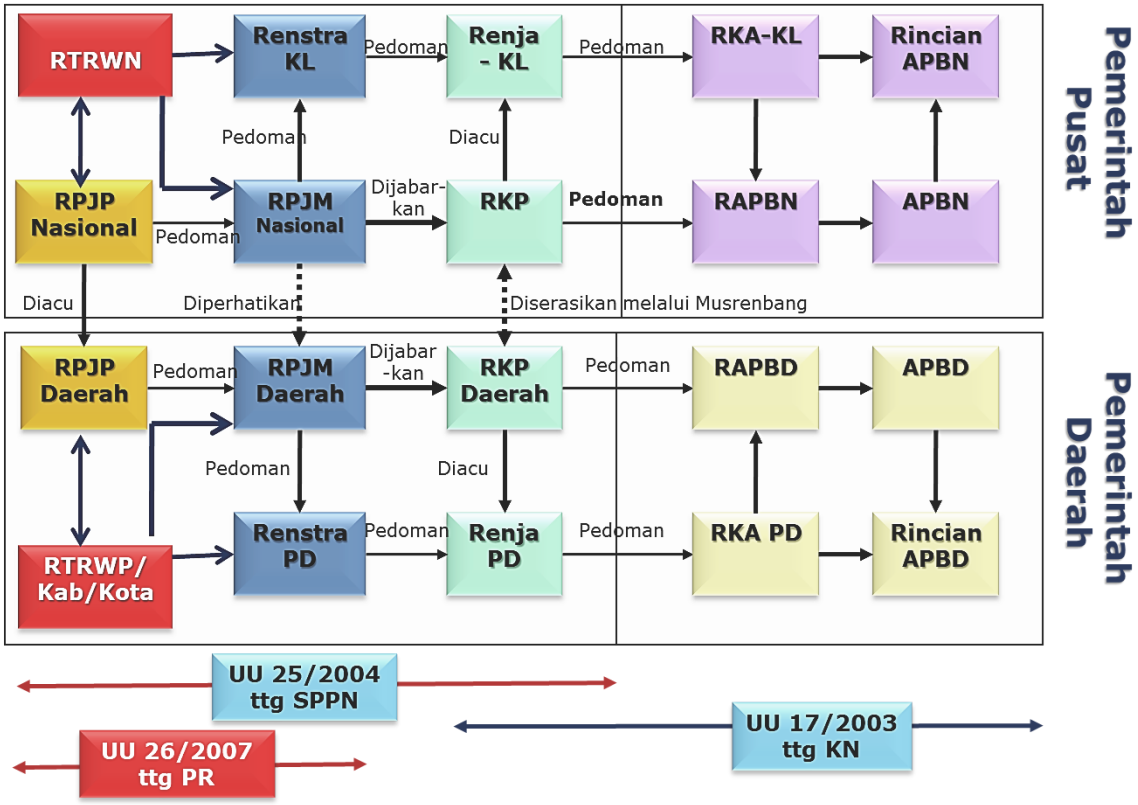
a. Penyusunan Rencana
   - Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /Daerah;
   - Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga SKPD;
   - Musyawarah Perencanaan Pembangunan,
   - Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

b. Penetapan Rencana
   - RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda,
   - RPJMN/ RPJMD dengan Peraturan Presiden/ Kepala Daerah,
   - RKP/RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara pengendalian terhadap implementasi rencana pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing pimpinan kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah. Menteri atau Kepala Bappeda bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, lembaga, atau SKPD, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Pimpinan kementerian, lembaga, atau Kepala SKPD melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Kemudian, Menteri atau Kepala Bappeda menyusun laporan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pimpinan kementerian, lembaga, atau SKPD tersebut. Hasil dari evaluasi ini menjadi bahan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode yang akan datang.



Gambar 3. 2. Alur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Sesudah PP 8/2008 & Permendagri 86/2017)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2023)

3.1.3.Pendekatan Teori Kelembagaan/ Institusionalisme

Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf sudah menyadari bahwa berbagai institusi saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada abad ke-19, Max Weber mengkaji birokrasi dan institusi secara lebih terstruktur. Weber memandang politik sebagai hal yang terkait dengan tata kelola negara. Dalam pandangannya, negara adalah kelompok manusia yang berhasil mengontrol penggunaan kekuatan fisik yang sah di wilayah tertentu. Negara dianggap sebagai entitas yang memiliki hak monopoli untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Menurut Weber, politik adalah perjuangan untuk memperoleh atau mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik di

tingkat negara maupun antar kelompok dalam negara itu sendiri. Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah struktur administratif yang nyata, yang tujuannya adalah untuk memaksakan kepatuhan melalui kekuatan fisik.

Berdasarkan pandangan Weber, negara memiliki tiga ciri utama:

1. Terdapat berbagai struktur dengan fungsi yang berbeda, seperti jabatan, peran, dan lembaga, yang memiliki tugas yang jelas dan terorganisir dengan batasan yang formal, kompleks, dan permanen.
2. Negara memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan fisik yang sah dan berwenang untuk mengambil keputusan final yang mengikat seluruh warga negara. Pejabat negara memiliki hak untuk menegakkan keputusan ini, seperti menjatuhkan hukuman atau mencabut hak milik, dan negara menggunakan aparatur seperti polisi, militer, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan kewenangan tersebut.
3. Kekuasaan negara untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayahnya sendiri.

Saat ini, banyak kajian dalam aliran institusionalisme baru yang berfokus pada bagaimana institusi membentuk perilaku individu melalui aturan dan norma yang diberlakukan. Dalam hal pengaruh institusi terhadap perilaku individu, terdapat dua pandangan utama: pertama, individu berusaha untuk memaksimalkan manfaat dari aturan yang ada dalam institusi tersebut, dan kedua, perilaku individu cenderung sebatas mengikuti kewajiban yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Institusionalisme baru juga menambahkan dimensi kognitif, dengan menekankan bahwa individu dalam institusi berperilaku tidak hanya karena takut dihukum atau merasa memiliki kewajiban, tetapi juga karena pemahaman mereka terhadap norma sosial dan nilai yang berlaku dalam institusi tersebut. Seiring waktu, aliran ini berkembang dalam berbagai pendekatan yang saling berbeda.

John W. Meyer (2008) mengembangkan pandangan bahwa organisasi dan institusi berfungsi dalam sebuah kerangka "makro" untuk menggambarkan proses pembuatan keputusan dalam sistem sosial yang lebih besar, sedangkan Philip Selznick memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan analisis "mikro" mengenai bagaimana institusi sesungguhnya beroperasi secara internal. Selznick juga menekankan pentingnya memahami struktur organisasi sebagai sistem yang hidup dan organik, bukan hanya alat formal yang rasional. Dalam pandangannya, organisasi tidak hanya bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga berusaha bertahan dalam menghadapi tekanan eksternal. Ia berpendapat bahwa "struktur formal organisasi tidak dapat sepenuhnya mengatasi dimensi perilaku yang lebih irrasional dan informal dalam keputusan-keputusan yang diambil". Pemikiran ini menunjukkan bahwa organisasi lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan interaksi dengan lingkungan daripada sekadar mengikuti struktur formalnya.

Di sisi lain, Peter Hall (2012) menekankan bahwa analisis terhadap institusi harus mengkaji "aturan formal, prosedur, dan pelaksanaan praktik yang mendasari hubungan antar individu dalam berbagai unit pemerintahan dan ekonomi". Pendekatan Hall bertujuan memperluas pemahaman mengenai interaksi antara negara, masyarakat, dan ekonomi internasional, yang memberikan kerangka untuk menganalisis pembuatan keputusan dalam konteks historis dan komparatif. Pendekatan ini juga memberi wawasan baru dalam memandang bagaimana kekuatan sosial dan politik dapat membentuk keputusan yang dibuat dalam institusi.

Teori kelembagaan menggabungkan berbagai pendekatan yang mencakup disiplin ilmu yang berbeda, seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru memiliki banyak variasi dan aspek, diantaranya institusionalisme dalam bidang sosiologi dan ekonomi. Istilah "institusionalisme baru" digunakan karena pendekatan ini menyimpang dari teori kelembagaan lama. Institusionalisme baru memandang institusi negara sebagai struktur yang dapat diperbaiki dan disesuaikan untuk

mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan masyarakat yang lebih makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan rencana yang jelas dan langkah-langkah konkret yang praktis.

Secara umum, institusi dapat dianggap sebagai organisasi yang beroperasi dengan pola perilaku yang diatur oleh aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Jan-Erik Lane dan Svante Ersson mengidentifikasi beberapa aspek institusi, seperti (1) struktur fisik, (2) struktur demografis, (3) perkembangan historis, (4) jaringan sosial, dan (5) struktur yang bersifat sementara. Institusi merupakan seperangkat aturan yang stabil yang memungkinkan individu, yang pada dasarnya bersifat egois, untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama.

Institusi mempengaruhi cara aktor-aktor mencapai tujuannya, serta menentukan siapa yang berhak bertindak, berapa banyak aktor yang terlibat, dan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Institusi memberikan stabilitas karena aturan-aturan yang ada tidak mudah berubah, dan juga memiliki kekuasaan yang otonom. Oleh karena itu, aktor yang ingin mengubah institusi harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin tidak selalu dapat diprediksi.

Bagi para penganut institusionalisme baru, inti permasalahan terletak pada bagaimana membentuk institusi yang efektif dalam mengumpulkan berbagai preferensi dari aktor-aktor yang terlibat, guna menentukan kepentingan kolektif. Dalam mencari institusi yang paling tepat, terdapat diskusi yang berkembang di masyarakat mengenai cara-cara yang bisa ditempuh untuk merombak institusi yang ada agar lebih demokratis. Jika dibandingkan dengan institusionalisme lama, institusionalisme baru lebih berfokus pada analisis dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal, moneter, serta dampak dari globalisasi dan pasar. Sementara itu, institusionalisme lama lebih menitikberatkan perhatian pada isu konstitusional dan aspek hukum. Ilmu politik, dengan mengembalikan fokus pada negara, termasuk aspek legal dan institusional, telah berkembang melengkapi pemahaman

sebelumnya. Pendekatan institusional sering kali berfokus pada gambaran mengenai struktur formal lembaga pemerintahan, prosedur kekuasaan legal, serta fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut.

Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan hubungan formal antara lembaga atau institusi, meskipun terkadang kurang memerhatikan bagaimana lembaga tersebut beroperasi dalam kenyataannya, serta hubungan yang ada antara lembaga. Dalam pendekatan ini, lebih ditekankan pada struktur formal lembaga yang berfungsi untuk mengatur pola perilaku manusia yang berlangsung sepanjang waktu. Pola perilaku yang terbentuk ini menjadi pembeda antara satu institusi dengan institusi lainnya, yang disesuaikan dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Namun, hubungan antara kebijakan publik sangatlah erat, karena kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan oleh instansi publik yang beroperasi dalam suatu sistem birokrasi besar. Output yang dihasilkan oleh satu instansi publik akan menjadi input bagi instansi lainnya, sehingga menciptakan hubungan yang saling mendukung dalam sistem birokrasi tersebut.

Ciri khas dari paradigma institusionalisme terletak pada pemahamannya mengenai hakikat organisasi. Organisasi, menurut paham ini, dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang terbentuk oleh pengaruh sistem simbolis, budaya, dan faktor sosial lainnya yang melingkupi organisasi tersebut. Scott (1987) menjelaskan bahwa pandangan konstitusional dan instrumental saling melengkapi, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara kerja institusi dalam masyarakat.

Meskipun demikian, kajian yang dilakukan oleh para ahli institusionalisme menunjukkan bahwa struktur organisasi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai respons rasional terhadap faktor-faktor kontinjensi dalam kerangka teknikal dan instrumental, melainkan juga harus mengacu pada norma, kewajiban legitimasi, mitos, kepercayaan, dan elemen-elemen budaya lainnya (North, 1990). Tentu saja,

norma, mitos, kepercayaan, dan faktor budaya lainnya dapat saja selaras atau bertentangan dengan aspek teknikal dan instrumental. Yang paling penting adalah tidak ada asumsi apriori bahwa kedua elemen tersebut harus selalu konsisten atau saling bertentangan. Namun, karena sifatnya yang independen, teori-teori institusional seringkali menjadi alternatif terhadap teori kontinjensi struktural. Penelitian empiris para pendukung institusionalisme, terutama mereka yang mengusung teori kontinjensi, menggambarkan organisasi sebagai entitas yang bersifat irasional. Hal ini tidak berarti bahwa teori institusional memberikan penjelasan yang setara dengan teori-teori non-fungsional lainnya. Pada kenyataannya, pendekatan institusional sering kali berseberangan dengan pendekatan Marxis dalam memahami organisasi dan struktur sosial (Powell & DiMaggio, 1991).

3.1.4. Pendekatan *Spatial Linkage* Dalam Perencanaan Ruang dan Infrastruktur

Pada tahap awal, *spatial linkage* adalah konsep dasar dalam memahami kawasan koridor sebagai area perencanaan. Menurut Rondinelli (1983: 141-147), ada tujuh bentuk keterkaitan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah:

1. Keterkaitan fisik, menghubungkan manusia melalui jaringan transportasi alami atau buatan.
2. Keterkaitan ekonomi, berfokus pada pemasaran dan aliran barang, komoditas, serta modal antar sektor ekonomi.
3. Keterkaitan pergerakan penduduk.
4. Keterkaitan teknologi, yang mengharuskan integrasi peralatan dan metode produksi sesuai dengan kebutuhan lokal.
5. Keterkaitan sosial, dimana pasar mempengaruhi pola hubungan sosial, terutama di wilayah pedesaan.
6. Keterkaitan pelayanan sosial, memperluas jaringan fasilitas pelayanan seperti rumah sakit dan sekolah.

7. Keterkaitan administrasi, politik, dan kelembagaan, yang tercermin dalam struktur pemerintahan dan pengelolaan anggaran pembangunan.

3.1.5.Pendekatan Pembangunan Kewilayahan

Dalam pendekatan kewilayahan, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan analisis keruangan serta potensi wilayah tetangga, sambil mengutamakan integrasi infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Beberapa pendekatan yang relevan antara lain:

1. Pendekatan Pertumbuhan Wilayah

Pendekatan ini berakar pada teori ekonomi Neo-Klasik, yang menyatakan bahwa pembangunan di wilayah strategis akan merangsang pertumbuhan di wilayah lain melalui mekanisme "penetasan" yang bersifat hierarkis (Misra, 1981). Proses ini terjadi melalui ekspansi kegiatan ekonomi dari pusat besar ke pusat lebih kecil, serta pergeseran industri ke lokasi dengan biaya lebih rendah. Meskipun demikian, pendekatan ini dapat menyebabkan kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, sehingga perlu disertai dengan upaya pemerataan pembangunan.

2. Pendekatan Pemerataan Perkembangan Wilayah

Pendekatan ini menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan secara merata ke seluruh wilayah, bukan hanya terfokus pada kota besar. Menurut Stohr (1981), pemerataan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di semua wilayah. Pendekatan ini muncul akibat kegagalan teori pertumbuhan wilayah, yang gagal mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar, serta memperburuk pengangguran dan kemiskinan.

3. Pendekatan Pemerataan Kesejahteraan

Pemerataan kesejahteraan bertujuan agar hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Adelman

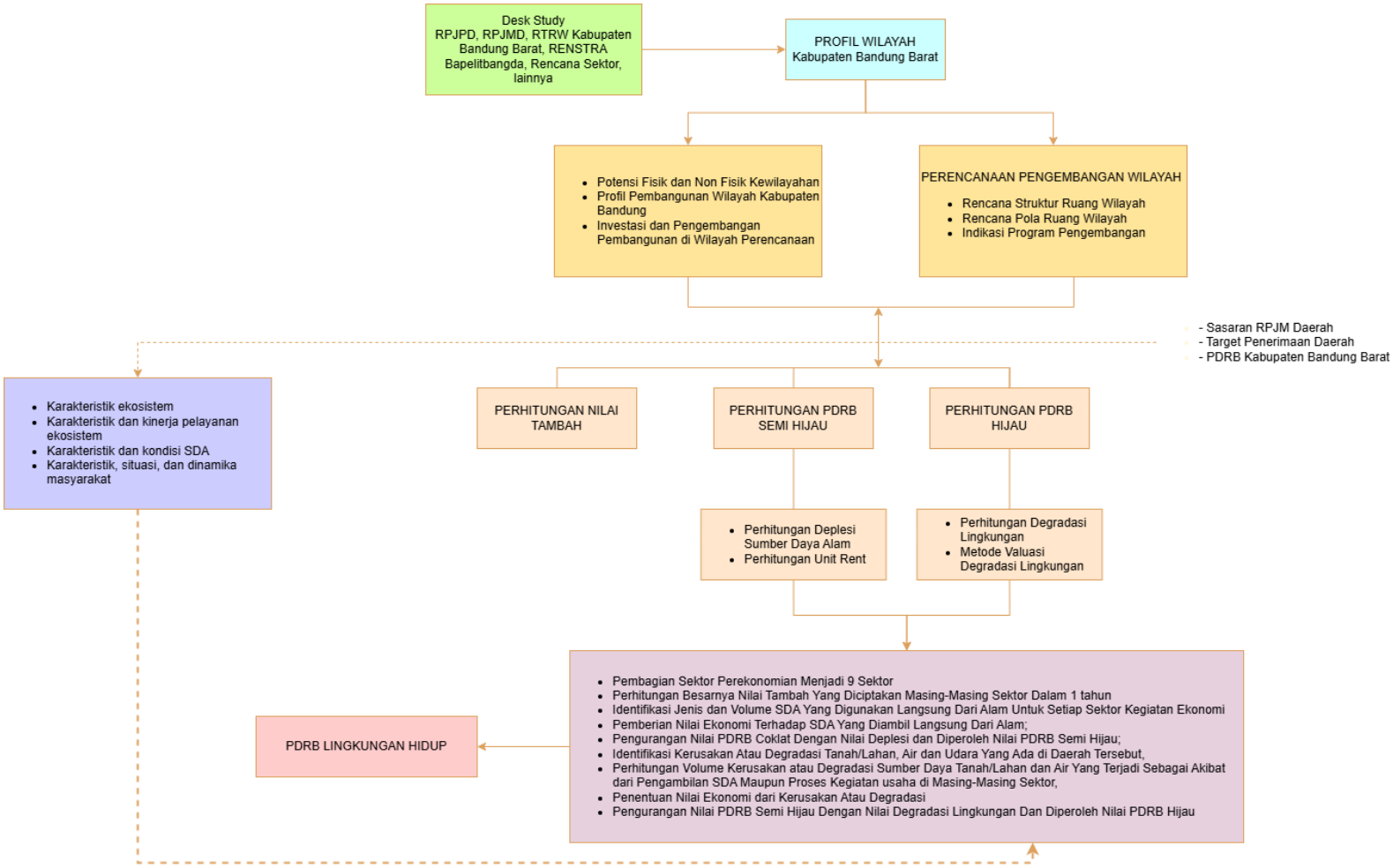
(1979), distribusi faktor-faktor produksi harus dilakukan agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Pada wilayah perkotaan, keberhasilan pembangunan lebih dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, infrastruktur, dan lokasi geografis, bukan hanya kualitas sumber daya alam.

Pembangunan wilayah harus dilaksanakan dengan pendekatan yang terpadu antara sektor dan kawasan, serta melibatkan semua stakeholder. Pendekatan ini mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan, investasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berfokus pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha.

3.2. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

3.2.1. Kerangka Pemikiran Kerja

Penyusunan Kajian PDRB Lingkungan Hidup (PDRB Hijau) Kabupaten Bandung Barat dilakukan dalam 45 hari. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah kajian literatur mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta PDRB Lingkungan Hidup dari kabupaten/ kota lain sebagai referensi pelaksanaan. Diagram alir berikut ini menjelaskan lebih lanjut.



Gambar 3. 3. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2024

3.2.2.Metoda Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan stakeholder terkait, sementara data sekunder diperoleh melalui inventarisasi kebijakan dan kajian literatur lain.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Proses ini melibatkan pihak-pihak terkait dalam Kajian PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan responden, menggunakan panduan wawancara sebagai acuan (Kvale, 1996).

Berbeda dengan percakapan sehari-hari, wawancara memiliki ciri-ciri tertentu, seperti:

1. Pewawancara dan responden umumnya tidak saling mengenal.
2. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara.
3. Pewawancara bertanya, tanpa mengarahkan jawaban.
4. Pertanyaan mengikuti panduan yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara sebagai metode pengumpulan data bersifat sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian (Cohen & Crabtree, 2006). Wawancara dapat digunakan sebagai metode utama, pelengkap, atau untuk memverifikasi data yang diperoleh dari metode lain. Menurut Seidman (2006), wawancara sangat efektif untuk menggali perasaan, pengalaman, dan motivasi seseorang secara langsung.

Wawancara juga didefinisikan sebagai proses komunikasi yang bertujuan untuk bertukar informasi, yang difokuskan pada topik tertentu dan dilakukan dengan cara tanya jawab. Hasil wawancara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterampilan pewawancara, kualitas jawaban responden, serta situasi wawancara itu sendiri.

Pewawancara yang baik harus memiliki keterampilan wawancara yang tinggi dan mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi responden untuk memberikan jawaban yang baik dan jelas (Gillham, 2000).

2. Survei Instansional

Survei instansional adalah metode pengumpulan data sekunder yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Data yang diperoleh mencakup hasil penelitian terdahulu, kebijakan serta peraturan pemerintah yang relevan, serta informasi terkait sektor pertanian seperti database pertanian dan peta lahan pangan. Selain itu, data mengenai infrastruktur pendukung pertanian yang disediakan oleh instansi terkait juga dikumpulkan. Survei ini juga memanfaatkan data statistik dasar wilayah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografis suatu daerah yang diperlukan dalam perencanaan dan analisis lebih lanjut.

3.2.3 Metoda Analisis

Dalam kajian ini, digunakan analisis *shift share* dan sektor unggulan untuk membandingkan kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan perekonomian Jawa Barat. Selanjutnya, dilakukan analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi lapangan usaha yang menjadi unggulan di daerah tersebut. Untuk analisis PDRB Hijau, dilakukan *desk study* dan evaluasi terhadap aplikasi panduan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat. *Desk study* berfokus pada teori penyusunan PDRB Hijau dan mengkaji tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam proses tersebut.

Analisis aplikasi panduan PDRB Hijau bertujuan untuk memastikan implementasi yang efektif dari panduan tersebut. Dalam kajian ini, sektor unggulan diidentifikasi berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB, dengan menilai sektor dan komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Untuk itu,

digunakan analisis shift share dan *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor basis, yaitu sektor dengan kontribusi relatif terbesar terhadap PDRB.

Proses pengolahan data dimulai dengan pengumpulan angka-angka PDRB yang disediakan oleh BPS dan dinas terkait. Data ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data mencakup identifikasi sumber daya alam yang digunakan oleh setiap sektor, dengan informasi awal diperoleh dari Buku Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka dan Laporan PDRB. Sumber daya alam yang digunakan akan diberi nilai ekonomi, menggunakan nilai pasar atau metode lain seperti *contingent valuation* untuk menilai kesediaan membayar.

Selain itu, dihitung juga dampak kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam dan proses produksi industri. Beberapa metode seperti observasi langsung dan perkiraan dengan *benefit transfer* digunakan untuk mengukur dampak tersebut. Nilai ekonomi untuk kerusakan atau pencemaran dapat dihitung dengan menggunakan metode *replacement costs* atau *forgone income*. Setelah menghitung nilai deplesi dan degradasi lingkungan, nilai-nilai tersebut akan digabungkan dengan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, menghasilkan perhitungan PDRB Hijau.

A. Analisis Shift-Share

Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis perubahan dan pergeseran sektor-sektor dalam perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari analisis ini akan menggambarkan kinerja sektor-sektor di PDRB Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang muncul dari perbandingan tersebut. Jika penyimpangan menunjukkan nilai positif, berarti sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah acuan.

Menurut Arsyad, analisis Shift Share membagi perubahan pertumbuhan (Dij) menjadi tiga komponen utama:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi regional (Nij), yang mengukur perubahan sektor-sektor agregat di daerah studi dibandingkan dengan perubahan sektor yang sama di perekonomian acuan.
2. Pengaruh pergeseran proporsional atau bauran industri (Mij), yang mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan sektor di daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar sebagai acuan. Dengan cara ini, dapat diketahui apakah ekonomi daerah lebih terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian acuan.
3. Pengaruh pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif (Cij), yang mengukur sejauh mana daya saing sektor lokal dibandingkan dengan sektor yang sama di perekonomian acuan. Jika pergeseran diferensial positif, itu berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor sejenis di perekonomian acuan.

Menurut Soepono dalam jurnal Basuki dan Gayatri (2009), bentuk umum analisis shift - share dan komponen-komponennya adalah:

$$Dij = Nij + Mij + Cij \quad Nij = Eij \cdot rn \quad Mij = Eij\,(rin - rn) \quad Cij = Eij\,(rij - rin)$$

Keterangan:

i	= Sektor-sektor ekonomi yang diteliti
j	= Variabel wilayah yang diteliti (Kabupaten Bandung Barat)
Dij	= Perubahan sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Nij	= Pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Mij	= Bauran industri sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Cij	= Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Eij	= PDRB sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
rij	= laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
rin	= laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Jawa Barat)
rn	= Laju pertumbuhan PDRB di daerah n (Provinsi Jawa Barat)

B. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Metode ini membantu menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan dua indikator utama: tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Kontribusi PDRB (y) / Laju Pertumbuhan (r)	$y_{ik} > y_i$	$y_{ik} < y_i$
$r_{ik} > r_i$	Kuadran I Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Kuadran III Sektor Maju Tapi Tertekan
$r_{ik} > r_i$	Kuadran II Sektor Potensial Tapi Masih Bisa Berkembang	Kuadran IV Sektor Relative Tertekan

Gambar 3. 4. Klasifikasi Sektor PDRB Menurut Tipologi Klassen

Sumber: diadaptasi dari Sjafrizal (1997)

C. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan atau basis aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang dan jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Secara umum metode LQ digunakan untuk mengukur suatu sektor atau komoditas (misalnya sektor x atau komoditas x) menjadi kegiatan/komoditas basis atau non basis pada suatu wilayah tertentu (misalnya i) (Budiharsono, 2001). Nilai LQ diketahui dengan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini.

$$LQ_X = \frac{Si/Ni}{Sj/Nj}$$

Dengan keterangan sebagai berikut,

LQx : Nilai sektor basis/non basis
Si : Jumlah PDRB sektor x diwilayah i (Rp)
Sj : Jumlah PDRB total komoditas sektor x di wilayah j, dimana wilayah i merupakan bagian dari wilayah j (Rp)
Ni : Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditas ataupun sektor pada wilayah i (Rp)
Nj : Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditas ataupun sektor pada wilayah j (Rp)

Berdasarkan formulasi dan asumsi yang berlaku, nilai LQ dapat bervariasi, diantaranya:

LQx> : Menunjukkan bahwa komoditas/ sektor x merupakan komoditas/ sektor basis atas kegiatan ekspor
LQx=1 : Menunjukkan bahwa komoditas/ sektor x tidak mengekspor, tetapi mampu mencukupi permintaan lokal atau dengan kata lain komoditas/sektor x telah mencapai tingkat swasembada
LQx<1 : Menunjukkan bahwa komoditas/ sektor x bukan merupakan komoditas/sektor basis ataupun kegiatan ekspor

Menurut Kadariah (1985) bahwa metode LQ dengan kesederhanaannya sangat tepat digunakan untuk tahap permulaan dan pemula. Meskipun demikian metode ini memiliki beberapa kekurangan, karena sering terjadi pelanggaran terhadap asumsi yang berlaku, diantaranya:

a. Selera dan pola pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat berbeda tiap daerah;
b. Tiap konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak sama di setiap wilayah, sehingga wilayah yang konsumsinya tinggi mungkin saja mengimpor, meskipun LQ lebih dari satu (demikian pula sebaliknya);
c. Kebutuhan impor untuk proses produksi dan produktivitas tenaga kerja berbeda di tiap wilayah yang membutuhkan lebih banyak input, mungkin saja mengimpor meski LQ lebih dari satu (demikian pula sebaliknya).

D. Analisis Perhitungan PDRB Hijau

Penentuan nilai PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu:

1. Penelusuran Data dan Informasi Awal

a. Pembagian sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat menjadi 17 sektor, yaitu:
   - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
   - Pertambangan dan Penggalian;
   - Industri Pengolahan;
   - Pengadaan Listrik dan Gas;
   - Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang;
   - Konstruksi;
   - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
   - Transportasi dan Pergudangan;
   - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
   - Informasi dan Komunikasi;
   - Jasa Keuangan dan Asuransi;
   - Real Estate;
   - Jasa Perusahaan;
   - Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib:
   - Jasa Pendidikan;
   - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
   - Jasa Lainnya.

b. Pengumpulan data PDRB Kabupaten Bandung Barat 2023,

c. Identifikasi sumber daya yang mengalami deplesi berdasarkan kegiatan-kegiatan di 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang telah ditentukan, seperti:
   - Sumber daya lahan;

- Sumber daya air.

d. Identifikasi aspek lingkungan yang mengalami degradasi berdasarkan kegiatan-kegiatan di 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang telah ditentukan, seperti:
   - Degradasi sumber daya air,
   - Degradasi lahan;
   - Degradasi akibat limbah dan pencemaran udara dan air.

2. Penelusuran dan Pencarian Data Primer dan Sekunder

a. Pengumpulan data terdiri dari:
   - Data Primer dilakukan dengan survey dan penelusuran data pemanfaatan sumber daya air tanah dari sampel masing-masing sektor. Serta pengambilan kerugian akibat kemacetan jalan yang ada di Kabupaten Bandung Barat:
   - Menentukan suku bunga tahun 2023 yang akan dipergunakan dalam perhitungan unit rent,
   - Menghitung unit rent masing-masing sumber daya yang terdeplesi;
   - Unit rent masing-masing sumber daya alam yang telah diperoleh dikalikan volume sumber daya alam yang terdeplesi.

Nilai deplesi diperoleh dengan mengalikan volume pengambilan masing-masing jenis sumber daya alam dengan unit rent atau unit net price. Pernyataan ini dapat dinyatakan dalam persamaan di bawah ini.

$$D_X = Q_X U_X$$

Dengan keterangan,
D_x = nilai deplesi
U_x = unit rent
Q_x = volume sumber daya alam x yang diambil

Cara menghitung unit rent itu adalah dengan mengurangkan seluruh biaya pengambilan dari nilai jual sumber daya alam termasuk nilai laba (balas jasa pengeluaran investasi) yang layak diterima. Adapun nilai laba yang layak itu dianggap sama dengan tingkat bunga pinjaman di bank sebagai biaya alternatif

dari modal yang ditanam untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah yang bersangkutan (lihat Kotak berikut).

Penerimaan Kotor	Rp .....
Biaya Produksi	Rp ..... -
(Bahan, tenaga kerja, sewa, dsb)	
Laba Kotor	Rp .....
Laba Layak (Suku Bunga Bank = Balas Jasa Investasi)	Rp ..... -
Rente Ekonomi (RE)	**Rp .....**

$$\text{Unit Rent} = \frac{RE}{Q}$$

Adapun deplesi sumber daya alam per sektor di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai berikut:

Sektor Pertanian

Tanaman Pangan	:	Konversi lahan dan air
Hutan	:	Konversi lahan, penebangan kayu dan pengambilan produk non kayu (hewan buruan, obat-obatan, air)
Perikanan	:	Ikan tangkap di waduk dan sungai
Peternakan	:	Air, pakan alami
Perkebunan	:	Konversi lahan dan air

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Deplesi tambang non migas	:	Air tanah, dsb
Deplesi bahan galian	:	Batu kali, pasir, batu kapur, kerikil

Sektor Industri dan Pengolahan

Industri Migas	:	Air
Non-migas	:	Air, tanah

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Listrik : Air

Air : Air

Gas : Air

Sektor Bangunan

Bangunan : Air

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Perdagangan Besar & Eceran : Air

Hotel : Air

Restoran : Air

Sektor Angkutan dan Komunikasi

Angkutan : Air

Komunikasi : Air

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Bank : Air

Lembaga keuangan : Air

Sewa Bangunan : Air

Jasa Perusahaan : Air

Sektor Jasa-Jasa

Pemerintahan Umum : Air

Swasta : Air

3. **Perhitungan nilai ekonomi terhadap sumber daya alam yang di ambil** dari alam disebut sebagai nilai deplesi. Valuasi dapat menggunakan nilai pasar untuk produk-produk yang dipasarkan, atau menggunakan nilai dari barang pengganti dan barang pelengkapnya, ataupun dengan contingent valuation dengan kesediaan menerima

pembayaran. Data harga dapat diperoleh dari perusahaan yang terlibat dalam proses produksi dan penggunaan sumber daya alam (data primer), atau dari data sekunder;

4. Menghitung PDRB Semi Lingkungan Hidup

Perhitungan PDRB Semi Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengurangi nilai PDRB konvensional dengan nilai deplesi (lihat Kotak).

Nilai Produksi		Rp ……..
Intermediate Inputs (Bahan - bahan)		Rp …….. (-)
Nilai Tambah atau PDRB Konvensional		Rp ……..
Deplesi SDA		Rp ……..
Laba Layak		Rp ……..
PDRB Semi Lingkungan Hidup	Rp …….. (-)	
Unit Rent		Rp ……..

5. Menghitung Kerusakan (Degradasi Lingkungan)

Pada tahap ini, harus dilakukan identifikasi tanah/lahan, air dan udara Kabupaten Bandung Barat yang mengalami degradasi akibat aktivitas ekonomi dari 16 (enam belas) sektor ekonomi.

a. Menghitung volume kerusakan

Degradasi sumber daya tanah/lahan dan air yang terjadi sebagai akibat dari pengambilan sumber daya alam maupun proses kegiatan usaha di masing-masing sektor dihitung dengan menggunakan beberapa metode pendekatan seperti metode observasi langsung dan metode perkiraan. Misalnya berapa volume tanah yang tererosi, berapa volume tanah yang menjadi sedimentasi, berapa luas hutan yang hilang karena ditebang, berapa kapasitas menyerap karbon yang hilang, dan sebagainya.

b. Menentukan Nilai Ekonomi dari Kerusakan atau Degradasi Lahan dan Air

Untuk menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lahan dan air dapat digunakan metode biaya pengganti (replacement costs) dan/atau metode pendapatan yang hilang (forgone income).

Langkah ini merupakan langkah identitas. Langkah berikutnya adalah mengkuantifikasi besaran atau luasan degradasi yang bersangkutan. Akhirnya terhadap degradasi tersebut dapat diperkirakan besarnya nilai degradasi yang bersangkutan. Cara penilaian untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan sumber daya ekstraktif dapat didekati dengan menggunakan harga pasar dan unit rent. Misalnya: luas lahan yang tererosi dinilai harga pupuk. Untuk hal-hal yang merupakan jasa lingkungan dan jasa keanekaragaman hayati penilaiannya didekati dengan menggunakan biaya pengganti (*replacement cost*) atau biaya kerusakan (dam*age costs*), atau nilai kesengan (hedonik) ataupun dengan biaya perjalanan (*travel cost*). Dapat pula valuasinya dengan cara survey (*contingent valuation*) dengan meneliti tentang kesediaan membayar (*willingness to pay*), atau kesediaan untuk menerima ganti rugi (*willingness to accept*). Adapun cara pendekatan dan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

a) Pendekatan Harga Pasar

Pendekatan harga pasar merupakan pendekatan yang utama yang harus dicari oleh seorang peneliti. Jika dampak kegiatan ekonomi memiliki harga pasar, maka penggunaan harga pasar dapat dikatakan wajib. Formula perhitungan harga pasar adalah sebagai berikut:

$$\text{NED} = \sum_{n=1}^{i} K\ P$$

Keterangan:

NED = Nilai Ekonomi Dampak;

K = Kuantitas manfaat dan dampak (orang, luasan wilayah, dll);

P = Harga pasar.

b) Nilai Hilangnya Pendapatan

Perhitungan nilai pendapatan dihitung berdasarkan nilai penerimaan dikurangi dengan nilai pengeluaran. Adapun perhitungan nilai dampak kegiatan ekonomi terhadap hilangnya pendapatan seseorang adalah sebagai berikut:

Dimana : NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\Delta\pi)$

Jadi : $\Delta\pi = \pi_t - \pi_0$

NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\pi t\ -\ \pi 0)$

NED = Nilai Ekonomi Dampak

K = Kuantitas dampak (orang, unit, waktu dll)

π_0 = Total pendapatan sebelum terjadinya pencemaran

π_t = Total pendapatan saat terjadinya pencemaran

c) Biaya tambahan (surcharge cost)

Dampak kegiatan ekonomi terkadang memberikan dampak terhadap meningkatkannya biaya-biaya untuk tetap memanfaatkan sumber daya dan lingkungan, walaupun sumber pencemarannya masih terus terjadi. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dimana : NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\Delta Tc)$

Jadi : $\Delta Tc = Tc_0 - Tc_t$

Keterangan

NED = Nilai Ekonomi Dampak;

K = Kuantitas dampak (orang, unit, dll);

Tc = Biaya tambahan;

Tc_0 = Total biaya pemanfaatan jasa sebelum terjadinya pencemaran;

Tc_t = Total biaya pemanfaatan saat terjadinya pencemaran.

d) Biaya Pencegahan Pencemaran (*Prevention*)

Biaya pencegahan pencemaran (cost of prevention) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Biaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti biaya pembuatan turap di sepanjang aliran sungai karena tidak adanya

pepohonan di area DAS, biaya pembelian alat peredam mesin sehingga tidak menimbulkan kebisingan, biaya pembuatan pengolahan air limbah (water treatment unit) agar limbah cair yang terbuang tidak mencemari lingkungan.

Biaya-biaya tersebut dapat dijadikan acuan nilai dari dampak kegiatan kegiatan ekonomi terhadap sumber daya dan lingkungan. Adapun formulanya sebagai berikut:

NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\mathrm{Cp})$

Keterangan:

NED = Nilai Ekonomi Dampak;

K = Kuantitas manfaat dan dampak (orang, unit, dll);

Cp = Biaya pencegahan pencemaran.

e) Biaya Penggantian (*Replacement Cost*)

Biaya penggantian (*replacement cost*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk menganti manfaat yang hilang yang dinilai berdasarkan nilai pada barang lainnya yang memiliki manfaat yang sama.

Contoh dari biaya penggantian seperti: melakukan pemupukan tanah agar kesuburan tanah kembali seperti semula sebelum adanya aktivitas pertambangan, hilangnya manfaat pemakaian air sungai untuk mandi digantikan dengan pemanfaatan air PDAM.

NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\mathrm{Cr})$

Keterangan:

NED = Nilai Ekonomi Dampak;

K = Kuantitas dampak (orang, unit, dll);

Cr = Biaya penggantian.

f) Biaya penyembuhan penyakit (*cost of illness*)

Biaya penyembuhan penyakit adalah biaya yang dikeluarkan akibat dampak kerusakan sumber daya dan lingkungan hidup. Adanya kegiatan pertambangan

juga akan berdampak terhadap timbulnya beberapa penyakit seperti ISPA, demam berdarah, dan penyakit lainnya yang disebabkan rusaknya sumber daya dan lingkungan. Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\mathrm{Ci})$

Jadi, Ci =$\sum_{h=1}^{i} T\ (\mathrm{CT})$

Keterangan:

NED = Nilai Ekonomi Dampak;

K = Kuantitas dampak (orang);

Ci = Total biaya penyembuhan penyakit;

T = Jumlah hari perawatan;

C_T = Biaya perawatan/penyembuhan per hari.

g) Biaya Perjalanan (*Travel Cost Method*)

Biaya perjalanan (travel cost method) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seseorang dari lokasi keberangkatan ke lokasi tujuan hingga kembali pulang (catatan: seseorang tersebut hanya mengunjungi satu lokasi tujuan). Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

NED =$\sum_{n=1}^{i} K\ (\mathrm{Tc})$

Dimana :

Tc = $C_1 + C_2 + C_3 + \ldots\ldots C_n$

Keterangan:

NED= Nilai Ekonomi Dampak;

K = Kuantitas dampak (orang/wisatawan);

Tc = Total biaya perjalanan;

Cn = Item biaya perjalanan.

h) Contingent *Valuation Method* (CVM)

Contingent valuation method merupakan salah satu metode menghitung nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan melalui penilaian preferensi

masyarakat.CVM merupakan metode dengan melakukan pertanyaan kepada masyarakat mengenai keinginan membayar (willingness to pay) atau keinginan untuk menerima (willingness to accept) masyarakat terhadap keberlangsungan manfaat sumber daya alam dan lingkungan.

Langkah-langkah melakukan analisis CVM untuk dampak yang bersifat intangible menurut Grigalunas et al (1998) adalah:

Mengidentifikasi populasi yang terkena dampak

1) Mengembangkan instrumen survey untuk CVM, antara lain:
   - Memperjelas komoditas sumber daya alam atau jasa lingkungan yang akan dinilai;
   - Menyeleksi alat pembayaran yang tepat untuk komoditas atau jasa tersebut (misalnya pajak, fee atau biaya yang lebih tinggi);
   - Memilih metode untuk penentuan nilai (misalnya open ended, take it or leave it, dll);
   - Melakukan tes validitas.
2) Melakukan survey secara acak kepada populasi yang terkena dampak baik dengan bertemu langsung, melalui telpon atau email
3) Menganalisis data
4) Memperluas kajian dari hasil sampel menjadi seluruh populasi yang terkena dampak.

   Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

   NED =$\sum_{n=1}^{i} K$ CVM

   NED = Nilai Ekonomi Dampak;

   K = Kuantitas dampak (orang/wisatawan).

   CVM = Rata-rata nilai CVM.

i) Transfer Manfaat (*benefit transfer*)

Transfer manfaat (benefit transfer) adalah penilaian sumber daya dan lingkungan hidup melalui penggunaan nilai di lokasi yang memiliki kedekatan karakteristik sumber daya dan lingkungan hidupnya. Benefit transfer merupakan metode yang digunakan setelah metode lainnya.

Namun demikian perlu adanya kaidah dalam penggunaan metode ini yaitu:

1) Nilai benefit yang akan digunakan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama (seperti: jenis, ekosistem, jumlah, dll);
2) Mengetahui kapan nilai benefit diperoleh dan melakukan penyetaraan dengan nilai saat dilakukan penelitian (memperhatikan kondisi ekonomi makro);
3) Sumber nilai benefit yang dipergunakan didapat dari hasil penelitian dengan metodologi ilmiah.

Dalam perhitungan valuasi ekonomi, terkadang kita menggunakan nilai dalam transfer benefit dalam bentuk nilai mata uang dollar Amerika (US S). Oleh karena itu dibutuhkan konversi nilai mata uang tersebut kedalam mata uang rupiah. Adapun nilai kurs dollar merupakan nilai yang diambil pada tahun tersebut, yang merupakan dasar perhitungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun langkah-langkah dalam valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi jenis ekosistem (habitat);
2) Identifikasi macam fungsi SDAL dalam ekosistem;
3) Mengkuantifikasi setiap fungsi SDAL dalam ekosistem;
4) Valuasi ekonomi setiap fungsi SDAL

6. Menghitung PDRB Lingkungan Hidup

Perhitungan nilai PDRB Lingkungan Hidup diperoleh dengan mengurangkan nilai PDRB semi lingkungan hidup dengan nilai kerusakan atau degradasi lingkungan (lihat Kotak Berikut).

PDRB Semi Lingkungan Hidup	Rp .....
Degredasi Lingkungan	Rp ..... (-)
PDRB LINGKUNGAN HIDUP	Rp .....

Perhitungan nilai degradasi lingkungan lebih kompleks, karena perlu menggunakan berbagai perkiraan sesuai dengan jenis sumber daya alam dan lingkungan yang terdegradasi. Sebagai contoh, penebangan hutan akan menyebabkan terjadinya erosi sumber daya tanah, sehingga lapisan tanah yang subur (top soil) akan hilang. Dalam hal ini terdapat degradasi sumber daya lahan. Selanjutnya kalau tanah yang terbawa erosi itu dibawa melalui sungai akan terjadi pendangkalan sungai maupun menambah kekeruhan air sungai sehingga terjadi degradasi sumber daya air, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

E. Valuasi Ekonomi Degradasi Lingkungan

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan tidak dibuat oleh manusia. Di samping itu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai ekonomi. Kegunaan tersebut tergantung pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi dimana keadaan ini berubah terus sepanjang waktu. Pada akhirnya semakin banyak barang serta flora dan fauna yang dinyatakan sebagai sumber daya alam. Hal itu menunjukkan bahwa ada peningkatan apresiasi terhadap sistem ekologi dan pola kehidupan saling ketergantungan. Untuk memulai haruslah dipilih sumber daya alam yang paling banyak berperan bagi suatu negara atau suatu daerah serta sesuatu yang seiring dengan perkembangan waktu, semakin langka keberadaannya.

a. Sebagai alternatif pengukuran kerusakan

Apabila kerusakan dan kehilangan jasa pelayanan telah dapat dikuantifikasi, ada dua pendekatan utama untuk mengetahui besarnya kerusakan yaitu:

1) Melalui valuasi ekonomi

2) Biaya rehabilitasi atau restorasi sumber daya alam dan lingkungan.

Yang pertama, Perhitungan atas dasar nilai jasa lingkungan yang hilang sampai saatnya kondisi lingkungan dan sumber daya alam itu pulih kembali dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya nilai kerusakan. Dana yang terkumpul sebagai pembayaran yang diterima dari penyebab timbulnya kerusakan dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang rusak atau untuk mengkompensasi (ganti rugi) pihak-pihak yang terkena dampak Yang kedua adalah pendekatan untuk menghitung dampak kerusakan dengan memperkirakan biaya rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan yang rusak.

b. Jasa lingkungan dan degradasinya

1) Jasa Lingkungan

Layanan yang diberikan oleh lingkungan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Layanan-layanan yang digunakan secara langsung lebih mudah diidentifikasi, seperti dalam hal penangkapan ikan dan pengambilan kayu mangrove. Selanjutnya, penggunaan yang tidak langsung mencakup aktivitas seperti penangkapan ikan yang terjadi jauh dari hutan mangrove, meskipun hutan mangrove memberikan fungsi penting dalam pemijahan dan pengasuhan ikan sebelum ikan tersebut tumbuh besar dan pindah ke laut yang jauh dari hutan mangrove.

Lebih sulit lagi untuk divaluasi, yaitu menghitung jasa yang diberikan oleh lingkungan yang menimbulkan penggunaan pasif atau tanpa penggunaan (*non-use value*) dimana melibatkan penilaian oleh manusia terhadap pengetahuan

bahwa sumber daya alam dan lingkungan di suatu lokasi cukup terpelihara, walaupun orang yang bersangkutan tidak pernah mengunjungi ataupun menggunakan sumber daya alam tersebut secara langsung.

Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai terganggunya fungsi lingkungan sebagai akibat dari pencemaran atau pengambilan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dapat meliputi kerusakan sumber daya biologis seperti kematian ikan, kerang, dan binatang langka, termasuk kerusakan hutan mangrove maupun terumbu karang. Sumber daya alam non-biologis terganggu bila air pantai yang tercampur minyak menghalangi penggunaannya oleh para wisatawan. Kemudian sumber daya alam dan lingkungan yang tercemar itu akan memberikan pelayanan atau jasa yang lebih rendah baik kepada manusia maupun kepada lingkungan sendiri.

Contoh jasa lingkungan yang diberikan oleh alam adalah:

- Pantai yang bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- Kualitas air untuk rekreasi maupun untuk diusahakan secara komersial;
- Permukaan air yang tidak terganggu untuk transportasi
- Ekosistem atau habitat, seperti mangroves dan terumbu karang yang mendukung kehidupan ikan baik untuk kepentingan komersial maupun untuk rekreasi;
- Jasa ekologi ada tanpa pertimbangan apakah jasa tersebut digunakan langsung oleh manusia.

2) Nilai Degradasi Lingkungan

Nilai degradasi atau nilai kerusakan didefinisikan sebagai jumlah uang yang kalau dibayarkan kepada pihak yang terkena dampak dari pencemaran atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akan membuat pihak yang bersangkutan menjadi pulih tidak mengalami keadaan yang lebih buruk dibanding dengan keadaan sebelum terkena pencemaran atau kerusakan.

Jadi nilai degradasi lingkungan adalah sama dengan sejumlah uang yang kalau dibayarkan akan membuat masyarakat tidak menjadi lebih buruk dibanding dengan keadaan sebelum terjadinya kerusakan dan atau pencemaran.

Sumber daya alam dan lingkungan apabila dipelihara dengan baik akan memberikan aliran manfaat yang bernilai sepanjang waktu. Rusaknya sumber daya alam dan lingkungan karena pencemaran akan mengurangi aliran manfaat yang dapat diberikan lingkungan itu sendiri. Kurangnya nilai sumber daya alam dan lingkungan adalah karena kemampuan mereka untuk memberikan jasa kepada manusia maupun kepada lingkungan itu sendiri juga berkurang atau mengalami degradasi.

Nilai ekonomi total kerusakan (degradasi) sumber daya alam dan lingkungan adalah nilai sekarang (present value) dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sepanjang umur kerusakan itu sendiri.

$$NTD = \sum D_t / (1 + i)^t$$

Dengan keterangan,

NTD : nilai total degradasi;

D : nilai degradasi;

t : jumlah tahun,

i : tingkat bunga,

Σ : tanda penjumlahan;

Dalam hal ada degradasi sumber daya alam seperti hilangnya ikan, menurunnya fungsi pantai, dan habitat laut, maka nilai kerusakan atau degradasi itu merupakan penjumlahan nilai degradasi per tahun sepanjang masa degradasi tersebut. Jadi sebaiknya masa degradasi dapat diketahui atau diperkirakan.

Nilai ekonomi adalah jumlah maksimum nilai atau harga dimana seseorang sanggup membayar untuk mengkonsumsi suatu barang. Atau nilai ekonomi itu dapat diukur sebagai jumlah minimum yang seseorang bersedia untuk menerima pembayaran (*willing to accept*) sebagai kompensasi atau ganti rugi karena harus kehilangan barang atau jasa. Adapun degradasi yang berpeluang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Perkiraan Degradasi Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Kabupaten Bandung Barat

No	SEKTOR PDRB	DEGRADASI LINGKUNGAN
1	Sektor Pertanian	→ Pencemaran air sungai akibat penggunaan pestisida; → Berkurangnya kesuburan lahan akibat penggunaan pupuk anorganik; → Polusi udara akibat pembakaran lahan atau biomass; → Pencemaran danau atau waduk dan sungai; → Tanah longsor akibat kegiatan pertanian; → Emisi yang dihasilkan pertanian.
2	Sektor Pertambangan dan Penggalian	→ Pencemaran perairan sungai, danau dan lainnya; → Polusi udara akibat emisi dari aktivitas pertambangan; → Tanah longsor akibat kegiatan pertambangan dan penggalian; → Berkurangnya kesuburan lahan pasca tambang; → Kerusakan lingkungan dan berubahnya bentang alam.
3	Sektor Industri dan Pengolahan	→ Pencemaran sungai, danau, dan lainnya; → Polusi udara akibat emisi buang sisa produksi.

No	SEKTOR PDRB	DEGRADASI LINGKUNGAN
4	Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	→ Emisi gas buang.
5	Sektor Bangunan	→ Polusi udara dari debu yang dihasilkan.
6	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	→ Produksi sampah; → Polusi udara, air dan lainnya.
7	Sektor Angkutan dan Komunikasi	→ Pencemaran perairan sungai, danau dan lainnya; → Polusi udara dari emisi gas buang.
8	Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	→ Polusi udara akibat emisi gas buang.
9	Jasa - jasa	→ Pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sumber: analisis Peneliti, 2024

3.3. Rencana Kerja

3.3.1. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Secara umum tahap-tahap penyelesaian pekerjaan Kajian PDRB Lingkungan Hidup (PDRB Hijau) Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan lingkup kajian meliputi:

1. **Tahap persiapan**

Tahap persialan dari kegiatan ini merupakan tahap awal dari suatu perencanaan dan memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- Pemahaman KAK
- Penyelesaian administrasi pekerjaan
- Persiapan peralatan dan personil
- Persiapan peralatan
- Penyusunan dan penajaman metodologi studi
- Penyusunan pendekatan dan metodologi dijabarkan dalam bentuk naratif serta bagan alir yang mencakup seluruh tahapan kegiatan yang akan dilakukan.
- Penyusunan detail rencana kerja
- Penyusunan rencana kerja dilakukan agar rangkaian tahapan proses pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terarah sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran pekerjaan.
- Kegiatan persiapan/perijinan

- Perijinan dilakukan sebagai persiapan awal untuk melakukan survei.
- Inventarisasi dan persiapan perangkat survey
- Persiapan peralatan meliputi peralatan untuk kepentingan survei lapangan.
- Mobilisasi tim

2. Tahap pengumpulan data dan informasi

Kegiatan ini dilakukan terutama pada pengumpulan data yang bersifat data sekunder yang datanya banyak beredar di lembaga pemerintah maupun non pemerintah ataupun data-data yang banyak beredar di internet. Beberapa data yang dikumpulkan pada tahap ini diantaranya sebagai berikut:

- Review terhadap regulasi/kebijakan pembangunan nasional;
- Review kebijakan pengembangan infrastruktur,
- Review skema pembiayaan;
- Tinjauan literatur,
- Pengumpulan data studi terkait pada lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. Tahap pengolahan dan analisis data

a. Entry Data; Pihak Konsultan akan melakukan entry data primer yang telah diperoleh dalam kegiatan wawancara. Data entri selanjutnya akan dilakukan melakukan double entry, validasi dan recoding data. Hasil input data entry juga merupakan bagian dari laporan.

b. Pengolahan Data; Setelah survey lapangan dan entry data dilakukan, tim Konsultan akan melakukan pengolahan data dan sekaligus melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil pengolahan.

4. Tahap perumusan PDRB Lingkungan Hidup

Penyusunan implikasi atau rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan nantinya disusun berdasarkan sektor mana saja yang memiliki peranan penting dalam ekonomi dan sektor yang memberikan ancaman terhadap

lingkungan. Hasil tersebut nantinya akan disusun rekomendasi kebijakan agar Kabupaten Bandung Barat terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya dan lingkungan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

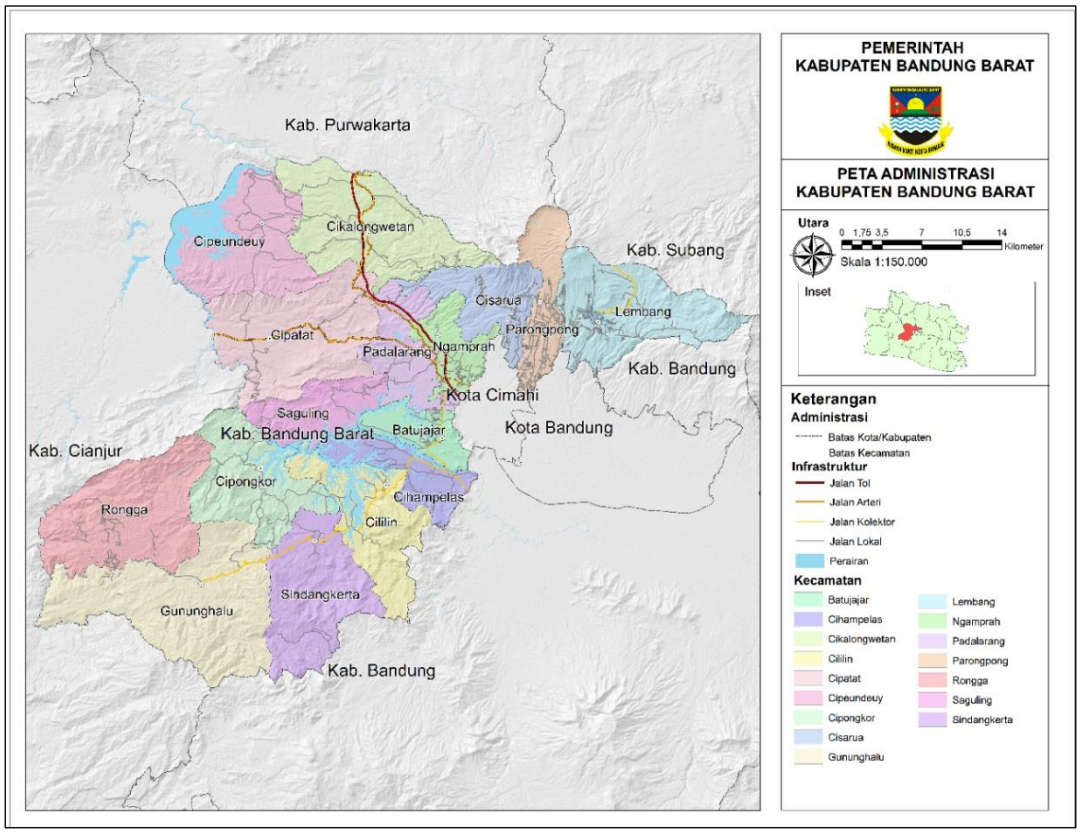
4.1. Kondisi Fisik Kawasan Perencanaan

4.1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat secara astronomis berada pada 6° 41' hingga 7° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' hingga 108° 05' Bujur Timur. Kabupaten Bandung Barat memiliki luas total wilayah sebesar 1.287,41 km² atau 130.577,40 hektare dan terbagi menjadi 16 kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu, dan Saguling.

Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan dan 165 desa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cikalong Kulon); Kabupaten Purwakarta (Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Wanayasa); Kabupaten Subang (Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, dan Kecamatan Cisalak); serta Kabupaten Sumedang (Kecamatan Sukasari).
- Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Bandung (Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang); Kota Bandung (Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Cidadap); serta Kota Cimahi (Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan).
- Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Bandung (Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali); serta Kabupaten Cianjur (Kecamatan Pagelaran).
- Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur (Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Mande).



Gambar 4. 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan, mencakup wilayah dengan total luas 1.287,41 km² yang terbagi dalam 165 desa. Kecamatan Gununghalu menjadi yang terluas dengan luas wilayah mencapai 155,47 km² atau sekitar 12,08% dari total luas kabupaten. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Batujajar, yang hanya mencakup 31,11 km² atau 2,42% dari keseluruhan wilayah.

Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Gununghalu, Sindangkerta, Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy, dan Rongga memiliki luas yang relatif besar (di atas 100

Ha). Sisanya memiliki luas di bawah 100 Ha, secara garis besar, hal ini mencerminkan keberagaman karakteristik geografis di Kabupaten Bandung Barat. Tidak hanya luas wilayah yang bervariasi, jumlah desa di tiap kecamatan juga menunjukkan keragaman. Lebih lanjut lagi, terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah desa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah desa sesuai ketentuan Undang-Undang. Misalnya, Kecamatan Saguling yang baru dibentuk hanya memiliki enam desa. Awalnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kecamatan Batujajar, tetapi karena letak geografisnya yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Saguling terisolir, pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan serta untuk memperluas cakupan pelayanan publik. Dengan demikian, langkah pemekaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat.

Tabel 4. 1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luasan Wilayah (%)	Jumlah Desa
1.	Rongga	11.264,00	8,75	8
2.	Gununghalu	15.547,00	12,08	9
3.	Sindangkerta	10.630,00	8,26	11
4.	Cililin	7.783,00	6,05	11
5.	Cihampelas	4.704,00	3,65	10
6.	Cipongkor	8.016,00	6,23	14
7.	Batujajar	3.111,00	2,42	7
8.	Saguling	5.158,00	4,01	6
9.	Cipatat	12.598,00	9,79	12
10.	Padalarang	5.163,00	4,01	10
11.	Ngamprah	3.565,00	2,77	11
12.	Parongpong	4.502,00	3,5	7
13.	Lembang	9.822,00	7,63	16
14.	Cisarua	5.563,00	4,32	8
15.	Cikalong Wetan	11.094,00	8,62	13

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luasan Wilayah (%)	Jumlah Desa
16.	Cipeundeuy	10.219,00	7,94	12
17.	**Total**	128.739,00	**100**	**165**

Sumber: Data BPS, Kab. Bandung Barat Dalam Angka 2024

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Bandung Barat memiliki posisi strategis dalam lingkup nasional karena berada di kawasan Cekungan Bandung. Kawasan ini diunggulkan untuk beberapa sektor, yaitu industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung, dengan pusat aktivitas utama berada di Kota Bandung. Tidak hanya itu, kabupaten ini juga memiliki sejumlah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berkembang, seperti di Padalarang, Lembang, dan Cililin.

Pada tingkat provinsi, Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah pengembangan Cekungan Bandung yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Kawasan ini mengalami perkembangan pesat, sehingga diperlukan pengelolaan ruang yang baik, terutama di area yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Pengembangan di kawasan Cekungan Bandung diarahkan untuk mengendalikan pencemaran, baik air, udara, maupun sampah. Selain itu, pembangunan juga dipusatkan pada sektor unggulan seperti perdagangan dan jasa yang ramah lingkungan, sambil tetap mendukung sektor pertanian hortikultura, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan.

4.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Distribusi elevasi topografi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang mencakup sekitar 68.760,6 hektar atau 53,52% dari total area. Selanjutnya, wilayah dengan ketinggian antara 1000 hingga 1500 mdpl memiliki luas 32.532,2 hektar atau 25,32%, sementara area dengan elevasi 0-500

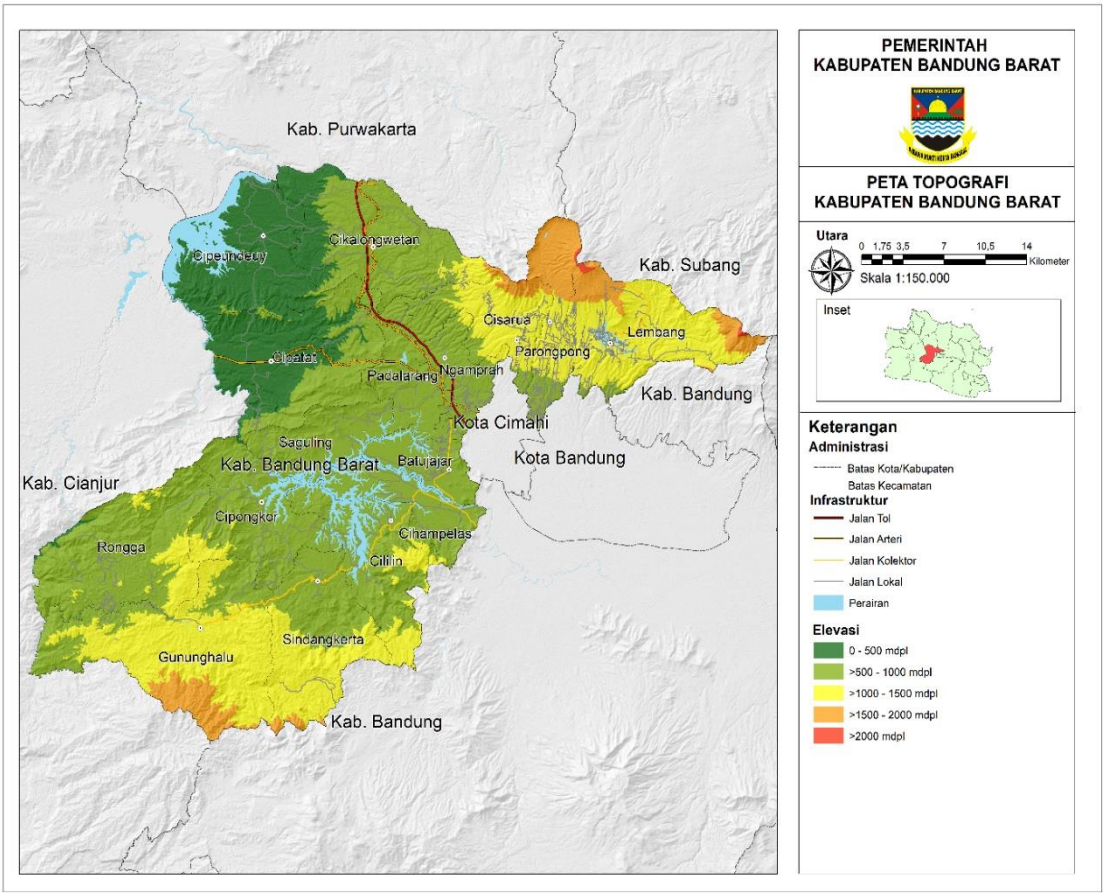
mdpl mencakup 20.288,8 hektar atau 15,79%. Wilayah pada ketinggian antara 1500 hingga 2000 mdpl hanya mencakup 6.744,04 hektar atau 5,25%, dan area di atas 2000 mdpl memiliki luas yang sangat kecil, yaitu 142,57 hektar atau 0,11% dari keseluruhan wilayah.

Tabel 4. 2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	Elevasi (mdpl)	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	0 - 500	20.288,80	15,79
2	>500 - 1000	68.760,60	53,52
3	>1000 - 1500	32.532,20	25,32
4	>1500 - 2000	6.744,04	5,25
5	>2000	142,57	0,11

Sumber: diolah dari Dinas Lingkungan Hidup - Kajian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 dalam Laporan Kajian PDRB Hijau KBB Tahun 2022

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh wilayah dengan kemiringan datar hingga landai, yang mencakup 31,72% atau 40.735,16 hektar untuk kemiringan datar (0-8%) dan 28,36% atau 36.429,87 hektar untuk kemiringan landai (>8-15%). Kemudian, wilayah dengan kemiringan agak curam (>15-25%) mencakup 27,52% dari total luas kabupaten, yaitu sebesar 35.351,28 hektar. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan curam (>25-45%) hanya mencakup 12,28% atau seluas 15.777,25 hektar. Adapun wilayah dengan kemiringan sangat curam (>45%) hanya memiliki luas yang sangat kecil, yaitu 145,85 hektar atau 0,11% dari total luas kabupaten.



Gambar 4. 2. Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Kemiringan wilayah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan variasi yang signifikan, mulai dari datar hingga sangat curam. Secara umum, kemiringan lereng Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki kemiringan yang memungkinkan untuk berbagai kegiatan produktif, terutama pada lahan datar dan landai, meskipun terdapat sebagian wilayah yang memerlukan pendekatan konservasi dan pengelolaan yang hati-hati pada area dengan kemiringan yang lebih curam.

Tabel 4. 3 Kemiringan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	Klasifikasi	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	0 - 8% (Datar)	40.735,16	31,72%
2	>8 - 15% (Landai)	36.429,87	28,36%
3	>15 - 25% (Agak Curam)	35.351,28	27,52%
4	>25 - 45% (Curam)	15.777,25	12,28%
5	>45% (Sangat Curam)	145,85	0,11%
6	**Total**	**128.439,40**	**100%**

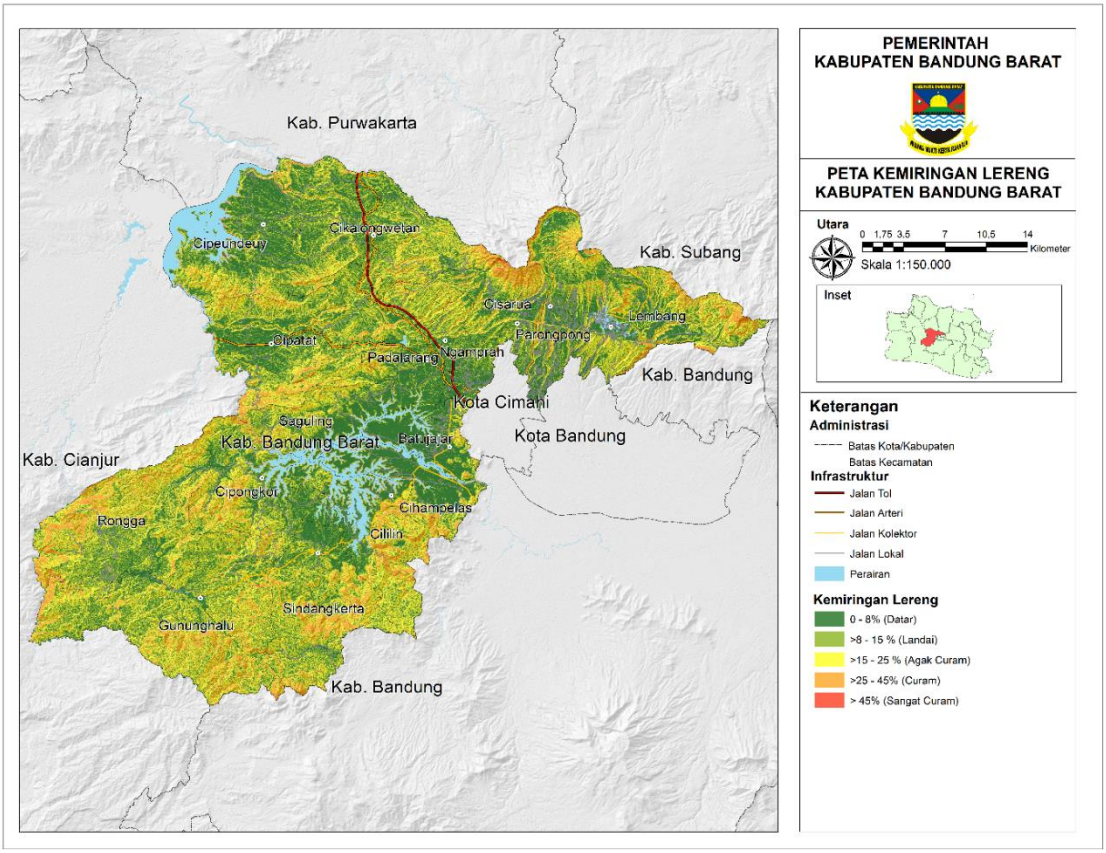
Sumber: Sumber: diolah dari Dinas Lingkungan Hidup - Kajian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 dalam Laporan Kajian PDRB Hijau KBB Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis, wilayah dengan kemiringan datar (0-8%) mencakup beberapa kecamatan dengan luas terbesar berada di Cipeundeuy, yang mencapai 5.518,44 hektar. Selain itu, Kecamatan Cipatat dan Cikalongwetan juga memiliki luas wilayah datar yang cukup besar, masing-masing seluas 3.448,70 hektar dan 3.403,61 hektar. Kemudian pada kemiringan landai (>8-15%), Kecamatan Gununghalu memiliki area terluas dengan total 4.940,19 hektar. Kemiringan landai ini juga cukup banyak ditemukan di Cikalongwetan dan Cipatat, dengan luas masing-masing 4.250,06 hektar dan 3.978,34 hektar.

Sedangkan kecamatan dengan kemiringan agak curam (>15-25%) tersebar di beberapa wilayah, dengan Gununghalu kembali mencatat luas terbesar mencapai 6.092,45 hektar. Selain itu, Kecamatan Rongga dan Cipatat juga memiliki area dengan kemiringan yang cukup luas pada kategori ini. Kemiringan agak curam ini memerlukan pendekatan khusus dalam penggunaannya, seperti penerapan teknik konservasi tanah dan pengelolaan air. Kegiatan yang paling sesuai di area ini adalah hutan produksi atau pariwisata alam yang menjaga keberlanjutan ekosistem.

Berdasarkan hasil analisis, wilayah dengan kemiringan curam (>25-45%) juga cukup luas di Kabupaten Bandung Barat, dengan Kecamatan Gununghalu dan Rongga sebagai yang terbesar, masing-masing seluas 2.409,11 hektar dan 2.133,15 hektar.

Area dengan kemiringan ini cenderung lebih cocok untuk konservasi lingkungan, karena risiko erosi dan longsor yang lebih tinggi. Pengelolaan yang hati-hati diperlukan agar tidak merusak lingkungan sekitar.



Gambar 4. 3 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Data Demnas BIG dengan hasil analisis, 2024

Adapun kemiringan sangat curam (>45%) ditemukan dalam luas yang lebih kecil di sebagian besar kecamatan. Kecamatan Cipeundeuy memiliki area terbesar pada kemiringan ini, yaitu 42,99 hektar. Wilayah dengan kemiringan sangat curam umumnya diarahkan untuk kawasan konservasi dan hutan lindung, yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis.

4.1.3. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

4.1.3.1. Kondisi Geologi

Secara geologis, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi bencana alam berupa gempa bumi, khususnya tipe tektonik dan vulkanik. Wilayah yang berpotensi gempa tektonik terkait dengan sesar Lembang, sedangkan gempa vulkanik berpotensi terjadi di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah tanah di Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi beberapa zona:

- Zona kritis adalah wilayah dengan pengambilan air tanah terbatas hingga 100 m^3 per bulan, yang hanya digunakan untuk kebutuhan air minum dan rumah tangga. Zona ini sebagian besar berada di Kecamatan Batujajar.
- Zona rawan memungkinkan pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan batas maksimum debit 100 m^3 per bulan. Daerah ini tersebar di Kecamatan Batujajar, dengan area resapan air tanah di Kecamatan Lembang dan Cisarua.
- Daerah aman memperbolehkan pengambilan air tanah baru dengan debit hingga 170 m^3 per hari, namun dengan jumlah sumur yang terbatas. Zona ini meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
- Daerah resapan tidak dikembangkan untuk pengambilan air tanah, kecuali untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan batas pengambilan maksimal 100 m^3 per bulan. Zona resapan ini berada di Kecamatan Lembang dan Cisarua.
- Zona bukan cekungan air tanah memiliki produktivitas akuifer rendah, sehingga kurang sesuai untuk pengembangan, kecuali untuk akuifer dangkal di lembah guna memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m^3 per bulan per sumur. Wilayah ini meliputi Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, dan Rongga.

Dari data formasi geologi Kabupaten Bandung Barat, terlihat bahwa formasi "Produk Gunungapi Tua" mendominasi wilayah ini dengan luas sebesar 28.851,79 hektar atau 22,55% dari total area. Formasi ini diikuti oleh "Batugamping Terumbu," yang mencakup 22.038,85 hektar atau 17,23%, serta "Formasi Beser" yang memiliki luas 14.660,97 hektar atau 11,46%. Ketiga formasi ini mencakup lebih dari setengah total wilayah, menunjukkan bahwa formasi geologis utama di kabupaten ini berfokus pada formasi vulkanik dan batuan kapur.

Tabel 4. 4. Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	Formasi	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Produk gunungapi tua	28.851,79	22,55%
2	Batugamping Terumbu	22.038,85	17,23%
3	Formasi Beser	14.660,97	11,46%
4	Tufa pasiran	7.356,68	5,75%
5	Breksi Tufaan	7.352,35	5,75%
6	Formasi Cimandiri	6.756,87	5,28%
7	Anggota Batupasir-Batulanau	6.374,54	4,98%
8	Produk Gunungapi tua tak teruaraikan	5.666,21	4,43%
9	Tuff berbatuapung	4.049,57	3,17%
10	Andesite	3.908,39	3,05%
11	Perairan	3.185,65	2,49%
12	Anggota Breksi & Batupasir	2.569,57	2,01%
13	Anggota Sindangkerta	2.224,69	1,74%
14	Tufa batuapung, batupasir tufan	1.548,44	1,21%
15	Anggota lempung, napal, batupasir kuarsa	1.526,20	1,19%
16	Anggota napal dan batupasir kuarsa	1.343,97	1,05%
17	Produk Gunungapi Muda	1.096,38	0,86%
18	Formasi Bentang	959,88	0,75%
19	Produk Gunungapi tua	766,64	0,60%
20	Anggota Batugamping	755,30	0,59%
21	Lava	669,01	0,52%
22	Batuan gunungapi muda	609,09	0,48%
23	Anggota Batupasir	580,49	0,45%

No.	Formasi	Luas (Ha)	Proporsi (%)
24	Alluvial	558,87	0,44%
25	Batupasir Tufaan	436,17	0,34%
26	Anggota Batulempung	398,36	0,31%
27	Andesit hornblende	317,48	0,25%
28	Kubah dan aliran lava	244,04	0,19%
29	Anggota Breksi	222,13	0,17%
30	Endapan Breksi & Lahar Gunung Gede	217,84	0,17%
31	Unit Basal	198,44	0,16%
32	Formasi Cilanang	141,39	0,11%
33	Cantayan	115,30	0,09%
34	Unit lempung tufaan	77,22	0,06%
35	Koluvial	68,15	0,05%
36	Formasi Jampang	53,65	0,04%
37	Sosonite	15,03	0,01%
38	Mangerite	12,45	0,01%
39	Gabro Essexite & Essexite	11,49	0,01%
40	Andesit dan Basalt	1,36	0,00%
41	**Total**	**127.940,88**	**100,00%**

Sumber: Data Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Skala 1:250.000 tahun 1983 dengan analisis lanjutan tahun 2024

Formasi geologi dengan proporsi lebih kecil termasuk "Tufa Pasiran" dan "Breksi Tufaan," masing-masing mencakup sekitar 5,75% dari total area, serta "Formasi Cimandiri" dengan 5,28%. Formasi-formasi ini berada di tengah-tengah dalam hal dominasi area, namun masih memiliki luas yang signifikan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih jauh lagi, formasi dengan proporsi lebih rendah, seperti "Tuff Berbatuapung" dan "Andesit," masing-masing mencakup 3,17% dan 3,05% dari total wilayah. Di samping itu, formasi seperti "Perairan," "Anggota Breksi & Batupasir," dan "Anggota Sindangkerta" memiliki proporsi yang lebih kecil namun tetap penting dalam komposisi geologi kabupaten.

Sebagian besar formasi lainnya, seperti "Produk Gunungapi Muda," "Formasi Bentang," dan formasi-formasi minor lainnya, mencakup kurang dari 1% dari total

wilayah. Formasi dengan luas paling kecil mencakup formasi-formasi seperti "Sosonite," "Mangerite," dan "Gabro Essexite & Essexite," yang masing-masing mencakup sekitar 0,01% atau kurang dari total area. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keberagaman dalam formasi geologi, beberapa formasi lebih dominan secara signifikan dibandingkan dengan yang lain.

4.1.3.2 Kondisi Jenis Tanah

Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam jenis tanah, antara lain: alluvial coklat kelabu; alluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan alluvial; glei humus dan alluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah dengan cakupan terluas adalah glei humus dan alluvial, yang mencakup sekitar 28.938,40 hektar atau 23,84% dari total area Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, jenis tanah dengan luas terkecil adalah alluvial kelabu dan merah, yang mencakup sekitar 612,64 hektar atau 0,50% dari keseluruhan wilayah.

Tabel 4. 5 Luas dan Proporsi Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol	2.663,05	2,16%
2	Andosol Coklat	8.562,34	6,93%
3	Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat	14.985,30	12,13%
4	Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol	3.162,38	2,56%
5	Latosol Coklat	17.739,37	14,36%
6	Latosol Coklat Kemerahan	40,13	0,03%
7	Latosol Coklat Tua Kemerahan	10.905,82	8,83%
8	Alluvial Coklat Kekelabuan	7.756,54	6,28%
9	Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	17.615,19	14,26%
10	Podsolik Kuning	1.018,34	0,82%

No.	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
11	Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol	37.202,11	30,11%
12	Asosiasi Alluvial Kelabu dan Alluvial Coklat Kekelabuan	1.883,11	1,52%
13	Asosiasi Glei Humus Rendah dan Alluvial Kelabu	6.748,13	5,46%
14	**Total**	**123.533,68**	**100%**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung-Kajian Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2021 dengan analisis lanjutan

Secara umum, distribusi jenis tanah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan dominasi jenis tanah “Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning, dan Regosol" dengan luas 37.202,11 hektar atau 30,11% dari total area, diikuti oleh "Latosol Coklat" dan "Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan," yang masing-masing mencakup 14,36% dan 14,26%. Selain itu, "Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat" menempati 12,13% wilayah, sementara "Latosol Coklat Tua Kemerahan" dan "Andosol Coklat" masing-masing mencakup 8,83% dan 6,93%. Di sisi lain, jenis tanah dengan luas lebih kecil, seperti "Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol" dan "Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol," masing-masing mencakup 2,16% dan 2,56% dari wilayah, sedangkan tanah dengan proporsi sangat kecil, seperti "Latosol Coklat Kemerahan" dan "Podsolik Kuning," hanya mencakup 0,03% dan 0,82%. Keberagaman jenis tanah ini menunjukkan variasi geologis di Kabupaten Bandung Barat yang dapat mempengaruhi pola pemanfaatan lahan di berbagai wilayahnya.

4.2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Bandung Barat

4.2.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Pada tahun 2023, Kabupaten Bandung Barat memiliki 1.859.700 penduduk di 16 kecamatan. Lembang adalah kecamatan terpadat dengan 203,2 ribu jiwa (10,93%),

disusul oleh Padalarang dengan 187,7 ribu jiwa (10,09%). Saguling memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 35,6 ribu jiwa (1,92%). Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan tertinggi, mencapai 5.142 jiwa per km², menunjukkan konsentrasi populasi di wilayah strategis.

Tabel 4. 6 Kecamatan Dan Penduduk Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/per km²)
1	Rongga	63,0	3,39	559
2	Gunung Halu	81,8	4,40	526
3	Sindangkerta	76,6	4,12	721
4	Cililin	99,4	5,34	1.277
5	Cihampelas	141,5	7,61	3.009
6	Cipongkor	104,9	5,64	1.309
7	Batujajar	113,6	6,11	3.652
8	Saguling	35,6	1,92	691
9	Cipatat	145,6	7,83	1.155
10	Padalarang	187,7	10,09	3.636
11	Ngamprah	183,3	9,86	5.142
12	Parongpong	116,7	6,27	2.592
13	Lembang	203,2	10,93	2.069
14	Cisarua	82,3	4,43	1.479
15	Cikalong Wetan	133,1	7,16	1.200
16	Cipeundeuy	91,4	4,91	894
17	**Total**	1.859,7	100	1.869

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2024

4.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat mendorong peningkatan migrasi masuk, yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk naik, terutama di kecamatan perkotaan sebagai pusat bisnis dan pendidikan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 2020 hingga 2023 adalah 1,43% per tahun.

Tabel 4. 7 **Laju Pertumbuhan Penduduk Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020–2023 (%)
1	Rongga	1,36
2	Gunung Halu	1,17
3	Sindangkerta	1,55
4	Cililin	1,48
5	Cihampelas	2,38
6	Cipongkor	1,76
7	Batujajar	1,92
8	Saguling	1,92
9	Cipatat	1,34
10	Padalarang	1,26
11	Ngamprah	1,14
12	Parongpong	1,17
13	Lembang	1,02
14	Cisarua	1,43
15	Cikalong Wetan	1,4
16	Cipeundeuy	1,36
17	**Rata-rata**	**1,43**

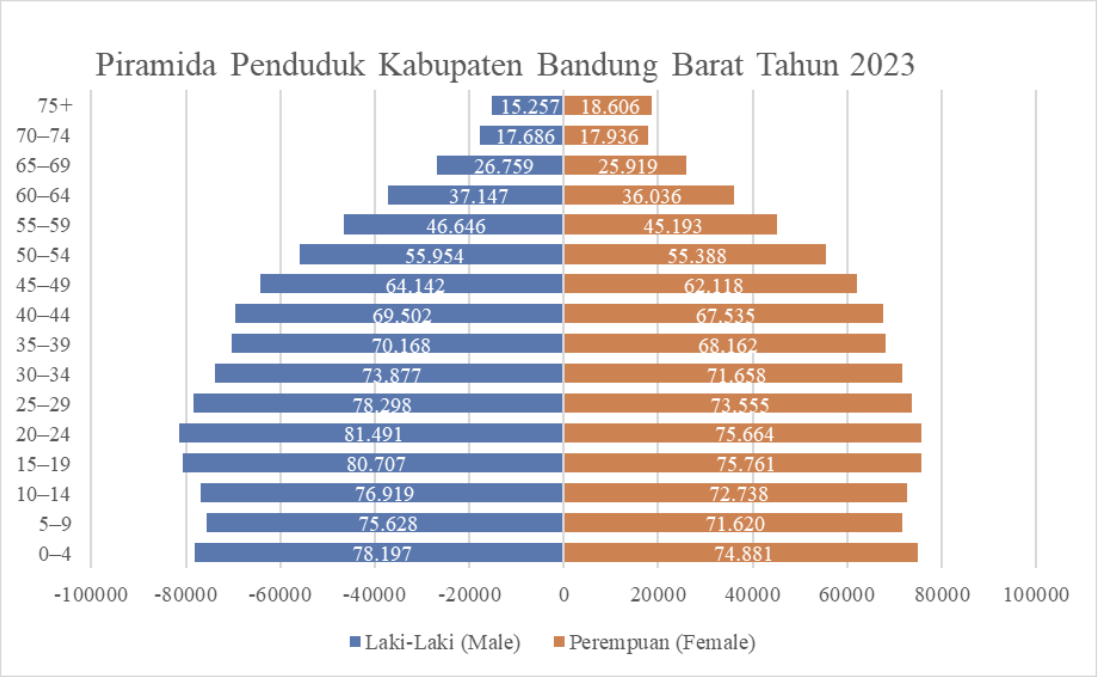
Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2024

Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Cihampelas, mencapai 2,38%, diikuti oleh Batujajar dan Saguling dengan masing-masing sebesar 1,92%. Sebaliknya, Kecamatan Lembang memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar 1,02%, yang dapat mengindikasikan tingkat urbanisasi yang lebih stabil atau kapasitas hunian yang sudah jenuh. Kecamatan lain dengan laju pertumbuhan rendah adalah Ngamprah dan Parongpong, dengan pertumbuhan sebesar 1,14% dan 1,17%.

4.2.3. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Piramida penduduk dianggap sebagai metode yang sangat efektif untuk menampilkan usia dan distribusi jenis kelamin penduduk dalam bentuk grafis. Melalui piramida penduduk, kita dapat melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di

setiap kelompok umur, yang memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan penduduk di masa lalu serta potensi perkembangan di masa mendatang. Struktur umur penduduk saat ini mencerminkan hasil dari pola kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya, komposisi usia penduduk yang ada saat ini juga akan berpengaruh besar terhadap pola perkembangan demografis di masa depan, menunjukkan bagaimana kondisi saat ini dapat membentuk tren penduduk ke depannya.



Gambar 4. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Sumber: *BPS Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2024, diolah*

Piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukkan komposisi usia dan jenis kelamin yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di hampir semua kelompok umur. Kelompok usia muda, terutama pada rentang 0–4 hingga 24 tahun, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, mencerminkan

populasi yang masih didominasi oleh generasi muda. Hal ini menandakan potensi angkatan kerja yang besar dalam beberapa dekade mendatang.

Pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), puncak jumlah penduduk berada di usia 20–24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dominasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki tenaga kerja melimpah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif kecil, menandakan proporsi lansia rendah. Struktur piramida usia ini mengindikasikan fase transisi demografis dengan penurunan angka kelahiran, yang dapat menyebabkan piramida penduduk semakin meruncing di bagian bawah jika tren ini terus berlanjut.

Meskipun jumlah penduduk usia produktif tinggi, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja yang melimpah tidak selalu didukung oleh lapangan pekerjaan memadai, menyebabkan pengangguran atau pekerja tidak tetap. Masalah ini berasal dari terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta kurangnya investasi di sektor-sektor penyerap banyak tenaga kerja seperti industri manufaktur, pariwisata, dan perdagangan.

Tabel 4. 8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Rongga	106
2	Gunung Halu	106
3	Sindangkerta	103
4	Cililin	105
5	Cihampelas	105
6	Cipongkor	104
7	Batujajar	103
8	Saguling	104
9	Cipatat	104
10	Padalarang	103

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
11	Ngamprah	103
12	Parongpong	103
13	Lembang	104
14	Cisarua	104
15	Cikalong Wetan	104
16	Cipeundeuy	104
17	**Bandung Barat**	**104**

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bandung Barat, rasio secara keseluruhan berada pada angka 104,0, yang menunjukkan bahwa terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio jenis kelamin ini bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan dengan rasio tertinggi adalah Rongga dan Gunung Halu, masing-masing dengan rasio 106,0, dimana jumlah laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Kecamatan Cililin dan Cihampelas juga memiliki rasio yang relatif tinggi, yaitu 105,0. Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Sindangkerta, Batujajar, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong memiliki rasio yang lebih rendah, yaitu 103,0. Variasi rasio jenis kelamin ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat migrasi laki-laki yang lebih tinggi di kecamatan tertentu atau perbedaan dalam struktur demografis masing-masing wilayah. Secara umum, rasio yang mendekati angka 100 menunjukkan keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan, namun angka di atas 100 menunjukkan dominasi jumlah laki-laki di Kabupaten Bandung Barat.

4.2.4 Ketenagakerjaan

Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak besar terhadap tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. Begitu pula, berbagai aktivitas ekonomi yang berjalan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur atau menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah

tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terserap dalam pekerjaan. Tingginya angka angkatan kerja di suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam penyerapan tenaga kerja dapat menimbulkan permasalahan sosial. Informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan, seperti persentase tenaga kerja yang aktif bekerja dan distribusi lapangan kerja, sangat bermanfaat untuk menilai prospek ekonomi suatu wilayah.

Data penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 1.413.347 orang, mayoritas termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu sebanyak 947.124 orang atau sekitar 67% dari populasi. Dari jumlah tersebut, 870.269 orang (92%) aktif bekerja, sementara 76.855 orang (8%) berada dalam status pengangguran terbuka. Di sisi lain, sebanyak 466.223 orang atau sekitar 33% dari populasi berumur 15 tahun ke atas termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Kelompok ini terdiri dari 99.816 orang yang masih sekolah, 318.929 orang yang mengurus rumah tangga, dan 47.478 orang dalam kategori lain-lain. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, meskipun masih ada sejumlah yang belum terserap ke dalam pekerjaan atau masih berada dalam status non-angkatan kerja.

4.3. Karakteristik Perekonomian

4.3.1. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Klasifikasi sektor usaha didasari pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan, sekaligus sebagai bagian dari pembentukan modal bruto (PMB). PMTB sendiri didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas. Berdasarkan konsep dari *System of National Accounts* (SNA) 1993 dalam Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional

Bruto Kabupaten/Kota (Badan Pusat Statistik, 2009), PMTB dibagi berdasarkan jenis barang, sektor penguasa/pemilik (*holder*), dan menurut institusi. PMTB yang dianalisis di dalam Produk Domestik Regiontal Bruto (PDRB) merupakan PMTB Menurut Sektor/Lapangan Usaha.

PMTB menurut sektor/lapangan usaha adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor-sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tersier ini secara rinci terdiri atas sektor-sektor: pertanian; pertambangan & penggalian; industri pengolahan; listrik, gas & air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel & restoran; pengangkutan & komunikasi; bank & lembaga keuangan; pemerintahan umum serta jasa-jasa. Adapun rincian PMTB berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Sektor pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya;
2. Sektor pertambangan terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam berproduksi di sektor pertambangan;
3. Sektor industri pengolahan/manufaktur adalah semua barang-barang modal seperti gedunggedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya;

4. Sektor listrik, gas dan air bersih mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi serta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
5. Sektor bangunan/konstruksi adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi, termasuk di sini kantor serta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor konstruksi;
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah semua barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha yang meliputi bangunan bukan tempat tinggal serta peralatan produksi yang ada, alat-alat transpor dan mesin-mesin yang dipakai, termasuk juga asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya;
7. Sektor transportasi dan komunikasi modal adalah semua kendaraan yang dioperasikan antara lain: bus, truk, sado, bajay, becak, dan lain-lain, alat-alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor-kantor perusahaan jawatan kereta api serta pembuatan jalan-jalan kereta api, dan stasiun-stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan;
8. Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, real estate dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan serta peralatan yang digunakan;
9. Sektor pemerintahan, terdiri dari barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedung-gedung/kantor-kantor pemerintah, pembelian mobil pemadam kebakaran serta

peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-jalan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumbangan tersebut, misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperluas pabrik semen maka semua pengeluaran baik untuk pembuatan bangunannya maupun untuk pembelian mesin-mesin adalah merupakan pembentukan modal di sektor industri pengolahan; dan

10. Sektor jasa-jasa, berupa gedung bioskop, ternak sirkus atau taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan sebagainya.

PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 56.945,18 miliar rupiah, meningkat secara nominal sebesar 4.023,89 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 52.921,29 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan produksi di hampir seluruh sektor usaha akibat berkurangnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB juga menunjukkan peningkatan dari 33.393,29 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 35.062,19 miliar rupiah di tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan kasus Covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas produksi di hampir seluruh sektor usaha.

Tabel 4. 9 Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019–2023 (dalam Miliar Rp.)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.362,86	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21
B. Pertambangan dan Penggalian	476,90	476,31	506,84	517,68	535,90
C. Industri Pengolahan	18.816,07	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	390,49	375,83	418,08	441,35	463,10
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,78	19,68	21,60	23,85	24,50
F. Konstruksi	3.613,70	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.404,98	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70
H. Transportasi dan Pergudangan	2.503,97	2.436,36	2.511,57	2.905,25	3.409,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.436,39	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80
J. Informasi dan Komunikasi	786,49	999,36	1.069,60	1.120,75	1.191,52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	414,20	418,93	455,56	490,38	516,24
L. Real Estat	853,13	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94
M,N. Jasa Perusahaan	212,59	199,79	218,83	253,49	283,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan	1.365,49	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Jaminan Sosial Wajib					
P. Jasa Pendidikan	1.742,81	1.942,63	1.983,84	2.078,60	2.248,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259,85	258,02	274,36	290,83	316,87
R,S,T,U. Jasa Lainnya	522,36	501,60	503,53	558,78	614,81
Produk Domestik Regional Bruto	47.180,08	46.478,96	48.764,31	52.921,29	56.945,18

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Peran berbagai lapangan usaha dalam menghasilkan barang dan jasa sangat mempengaruhi struktur ekonomi suatu daerah, menunjukkan tingkat ketergantungan daerah tersebut pada kemampuan produksi dari setiap sektor usaha. Selama lima tahun terakhir (2019–2023), perekonomian Bandung Barat didominasi oleh enam kategori lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Bandung Barat.

Tabel 4. 10 Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,49	13,28	12,59	12,87	12,73
B. Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,02	1,04	0,98	0,94
C. Industri Pengolahan	39,88	40,33	41,40	41,60	41,16

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,83	0,81	0,86	0,83	0,81
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
F. Konstruksi	7,66	7,36	7,55	7,33	7,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,58	12,89	12,69	12,35	12,40
H. Transportasi dan Pergudangan	5,31	5,24	5,15	5,49	5,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	5,17	4,96	5,26	5,38
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	2,15	2,19	2,12	2,09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,90	0,93	0,93	0,91
L. Real Estat	1,81	1,84	1,93	1,92	1,93
M,N. Jasa Perusahaan	0,45	0,43	0,45	0,48	0,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,89	2,73	2,55	2,27	2,19
P. Jasa Pendidikan	3,69	4,18	4,07	3,93	3,95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,56	0,56	0,55	0,56
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,11	1,08	1,03	1,06	1,08
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar terhadap PDRB Bandung Barat berasal dari Industri Pengolahan, yang mencapai 41,16 persen. Disusul oleh sektor Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan dengan 12,73 persen, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,40 persen, sektor Konstruksi sebesar 7,35 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,99 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,38 persen. Sementara itu, kontribusi dari sektor-sektor usaha lainnya berada di bawah 5 persen. Struktur ekonomi ini terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor usaha.

Pada tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bandung Barat adalah Industri Pengolahan dengan porsi sebesar 41,16 persen. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 12,73 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 12,40 persen. Sektor Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 7,35 persen, sementara sektor Transportasi dan Pergudangan menyumbang 5,99 persen, dan Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum sebesar 5,38 persen. Di sisi lain, kontribusi sektor-sektor usaha lainnya tercatat di bawah 5 persen. Struktur ekonomi ini terbentuk dari nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor usaha.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian di suatu daerah secara nyata. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Bandung Barat pada tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022, yang dipengaruhi oleh penurunan pendapatan di sejumlah industri kimia serta penurunan produksi tanaman pangan (terutama padi) akibat bencana kekeringan dan fenomena El Nino. Pada tahun 2023, PDRB Bandung Barat mencapai 35.062,19 miliar rupiah,

naik sebesar 1.668,90 miliar dari 33.393,29 miliar rupiah pada tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen, yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,34 persen.

Tabel 4. 11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,24	-0,62	-1,03	4,11	1,59
B. Pertambangan dan Penggalian	-1,29	-2,18	6,26	-0,11	0,69
C. Industri Pengolahan	6,26	-2,42	4,87	6,43	5,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	-3,08	10,94	4,7	2,32
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,94	10,21	9,58	7,61	2,23
F. Konstruksi	7,38	-5,71	7,38	1,75	4,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,84	-8,15	2,93	3,93	4,03
H. Transportasi dan Pergudangan	4,43	-3,82	1,1	9,95	10,37
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	-4,67	-0,99	10,03	9,2
J. Informasi dan Komunikasi	8,39	27,03	7,79	5,58	6,27
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,44	1,41	5,61	-1,24	3,53
L. Real Estat	8,58	0,21	9,86	8,06	6,23
M,N. Jasa Perusahaan	7,58	-12,11	7,98	10,65	7,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09	2,41
P. Jasa Pendidikan	4,76	6,53	0,04	2,44	3,96

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	-0,28	6,09	5,25	5,74
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,45	-0,38	0,76	6,3	6,78
Produk Domestik Regional Bruto	**5,05**	**-2,41**	**3,46**	**5,34**	**5,00**

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga tampak pada beberapa sektor, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang hanya tumbuh 1,59 persen. Kategori pengadaan air dan pengelolaan sampah serta limbah tumbuh melambat sebesar 2,23 persen, diikuti sektor pengadaan listrik dan gas dengan laju 2,32 persen, serta sektor industri pengolahan dan real estate yang masing-masing bertumbuh 5,30 persen dan 6,23 persen. Perlambatan juga terjadi di sektor jasa perusahaan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang masing-masing tumbuh 7,27 persen dan 9,20 persen. Namun, sepuluh kategori usaha lainnya justru mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2023 dibandingkan 2022. Pertumbuhan tercepat tercatat pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,37 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 6,78 persen dan sektor informasi dan komunikasi dengan laju 6,27 persen. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor juga mengalami percepatan dengan masing-masing tumbuh sebesar 5,74 persen, 4,48 persen, dan 4,03 persen. Pertumbuhan signifikan juga terlihat pada sektor jasa pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,96 persen, 3,53 persen, 2,41 persen, dan 0,69 persen.

4.3.2. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan pembagian antara total nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sementara nilai PDRB sendiri dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai PDRB per individu.

Tabel 4. 12 Tabel Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

PDRB per Kapita (juta Rupiah)					
Uraian	**2019**	**2020**	**2021**	**2022***	**2023****
ADHB	28,21	26,09	26,97	28,85	30,62
ADHK	18,77	17,2	17,53	18,21	18,85
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,75	-8,39	1,93	3,85	3,56
Jumlah Penduduk (ribu orang)	1.672.532	1.781.587	1.808.416	1.834.226	1.859.636
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	-0,66	6,52	1,51	1,43	1,39
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
Uraian	**2019**	**2020**	**2021**	**2022***	**2023****
ADHB	47.180.080,50	46.478.896,60	48.764.313,90	52.921.291,10	56.945.184,00
ADHK	31.398.352,00	30.640.409,50	31.701.785,50	33.393.287,00	35.062.186,40

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Nilai PDRB per kapita di Bandung Barat atas dasar harga berlaku mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 28,21 juta rupiah. Secara nominal, angka ini mengalami fluktuasi hingga

mencapai 30,62 juta rupiah pada tahun 2023 (lihat tabel 3.3). Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 2,12 juta rupiah dibandingkan tahun 2019, dari 28,21 juta rupiah menjadi 26,09 juta rupiah. PDRB per kapita di Bandung Barat terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kenaikan yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

BAB V

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

5.1. Kinerja Perekonomian Perubahan PDRB Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023

Berdasarkan data perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat pada periode 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan di hampir seluruh sektor usaha, meskipun ada variasi dalam tingkat pertumbuhannya. Adapun lapangan usaha dengan peningkatan terbesar adalah sektor Industri Pengolahan yang meningkat signifikan dari Rp 4.455,07 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 6.695,61 miliar pada tahun 2023, menunjukkan kontribusi besar terhadap PDRB. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mencapai Rp 1.044,19 miliar pada tahun 2023 dari Rp 822,22 miliar pada tahun 2019.

Tabel 5. 1 Tabel Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2019 - 2023 (dalam Rp Miliar)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.119,33	4.117,08	4.152,81	4.388,83	4.467,11
2	Pertambangan dan Penggalian	382,99	380,76	380,94	380,66	373,56
3	Industri Pengolahan	4.455,07	4.868,76	5.447,30	6.171,04	6.695,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,39	19,76	22,58	25,17	27,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	12,15	14,34	16,95	19,50	21,27
6	Konstruksi	2.850,00	2.699,49	2.842,51	2.858,90	3.007,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3.621,90	3.403,00	3.504,16	3.642,34	3.816,32
8	Transportasi dan pergudangan	822,22	771,72	767,10	842,09	1.044,19

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	704,75	653,26	644,94	707,64	784,36
10	Informasi dan Komunikasi	897,05	1.183,79	1.267,35	1.336,25	1.400,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	603,05	611,88	631,87	636,32	661,19
12	Real estate	291,97	294,05	318,81	338,55	357,00
13	Jasa Perusahaan	76,31	68,55	70,68	77,47	84,02
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	648,24	622,87	612,57	606,00	621,90
15	Jasa Pendidikan	1.204,87	1.220,91	1.238,97	1.303,36	1.383,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosia;	229,38	235,11	250,70	263,31	275,75
17	Jasa Lainnya	625,05	589,20	618,53	700,67	771,06
18	Total	21.561,72	21.754,54	22.788,75	24.298,10	25.793,24

Sumber: BPS 2024, diolah

Namun, tidak semua sektor menunjukkan peningkatan. Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan dari Rp 382,99 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 373,56 miliar pada tahun 2023. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan produksi atau perubahan regulasi terkait pertambangan. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yang tinggi, dengan kenaikan sebesar 56,10% dari tahun 2019 ke tahun 2023. Di samping itu, sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan yang cukup besar dari Rp 822,22 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 1.044,19 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan nilai Rp 1.400,17 miliar pada tahun 2023, naik dari Rp 897,05 miliar pada tahun 2019. Adapun sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami pertumbuhan, masing-masing mencapai Rp 3.007,94 miliar dan Rp 3.816,32 miliar pada tahun 2023. Namun,

sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial mengalami sedikit fluktuasi dan akhirnya meningkat ke Rp 621,90 miliar pada tahun 2023 setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total PDRB Kabupaten Bandung Barat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meningkat dari Rp 21.561,72 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 25.793,24 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha, meskipun terdapat penurunan pada beberapa sektor seperti Pertambangan dan Penggalian.

Berdasarkan data pertumbuhan lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya variasi kinerja antar sektor. Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pertumbuhannya mengalami fluktuasi, dengan penurunan sebesar -0,62% pada periode 2019-2020 dan -1,03% pada 2020-2021, namun meningkat menjadi 4,11% pada 2021-2022 dan 1,59% pada 2022-2023, menghasilkan total pertumbuhan sebesar 3,87% selama periode ini.

Tabel 5. 2 Tabel Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2019-2023	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,62%	-1,03%	4,11%	1,59%	3,87%	1,01%
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,18%	6,26%	-0,11%	0,69%	4,35%	1,16%
3	Industri Pengolahan	-2,42%	4,87%	6,43%	5,30%	12,80%	3,54%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08%	10,94%	4,69%	2,32%	13,18%	3,72%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	10,26%	9,54%	7,63%	2,21%	24,74%	7,41%
6	Konstruksi	-5,71%	7,38%	1,75%	4,48%	7,09%	1,97%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-8,15%	2,93%	3,93%	4,03%	2,17%	0,68%

No	Lapangan Usaha	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2019-2023	Rata-Rata
8	Transportasi dan pergudangan	-3,82%	1,10%	9,95%	10,37%	15,26%	4,40%
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	-4,68%	-0,97%	10,06%	9,16%	11,82%	3,39%
10	Informasi dan Komunikasi	27,03%	7,79%	5,58%	6,27%	34,91%	11,67%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41%	5,61%	-1,23%	3,53%	8,68%	2,33%
12	Real estate	0,21%	9,87%	8,06%	6,23%	20,87%	6,09%
13	Jasa Perusahaan	-12,10%	7,98%	10,65%	9,04%	12,67%	3,89%
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	-7,68%	-2,56%	-3,09%	2,41%	-12,00%	-2,73%
15	Jasa Pendidikan	6,53%	0,04%	2,44%	3,96%	11,89%	3,24%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosia;	-0,28%	6,09%	58,94%	8,95%	45,42%	18,43%
17	Jasa Lainnya	-0,38%	0,76%	6,31%	6,78%	12,24%	3,37%
18	Total	-2,41%	3,46%	5,34%	5,00%	10,45%	2,85%

Sumber: BPS 2024, diolah

Kemudian, sektor Pertambangan dan Penggalian juga menunjukkan fluktuasi dengan penurunan sebesar -2,18% pada 2019-2020, namun mengalami kenaikan signifikan pada 2020-2021 sebesar 6,26%. Pada periode selanjutnya, sektor ini mengalami sedikit penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,16%. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren positif, dengan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhannya mencapai 12,80% selama periode 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,54%. Sektor ini tetap menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian Bandung Barat. Di sisi lain, sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 13,18% dan 24,74% selama periode 2019-2023. Kedua sektor ini terus mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun dengan fluktuasi.

Pada sektor Informasi dan Komunikasi, terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 27,03% pada periode 2019-2020, yang kemudian melambat tetapi tetap positif pada tahun-tahun berikutnya. Rata-rata pertumbuhan tahunan sektor ini mencapai 11,67%, yang menunjukkan kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dengan total penurunan sebesar -12,00% selama periode ini. Meskipun ada sedikit peningkatan pada 2022-2023, sektor ini tetap menunjukkan tren negatif. Di sisi lain, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami lonjakan signifikan, terutama pada periode 2021-2022 dengan pertumbuhan 58,94%, yang mencerminkan dampak positif dari peningkatan kebutuhan layanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan tahunan sektor ini mencapai 18,43%.

Secara keseluruhan, total pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,85% dan total pertumbuhan 10,45% selama periode 2019-2023. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, meskipun terdapat sektor yang mengalami penurunan seperti Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial.

Tabel 5. 3 Tabel Struktur Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	Persentase Lapangan Usaha (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,89	12,11	11,59	11,45	11,08	-0,81%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,05	1,08	1,03	0,98	-0,07%
3	Industri Pengolahan	40,85	40,85	41,40	41,83	41,95	1,10%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,76	0,75	0,80	0,80	0,78	0,02%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01%
6	Konstruksi	7,48	7,23	7,50	7,25	7,21	-0,27%

No.	Lapangan Usaha	Persentase Lapangan Usaha (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran	13,96	13,14	13,07	12,89	12,77	-1,18%
8	Transportasi dan pergudangan	5,11	5,04	4,92	5,14	5,40	0,29%
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	5,24	5,12	4,90	5,12	5,32	0,08%
10	Informasi dan Komunikasi	2,55	3,32	3,45	3,46	3,50	0,96%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,86	0,88	0,82	0,81	-0,02%
12	Real estate	1,96	2,01	2,14	2,19	2,22	0,26%
13	Jasa Perusahaan	0,49	0,44	0,46	0,48	0,50	0,01%
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	2,44	2,30	2,17	2,00	1,95	-0,49%
15	Jasa Pendidikan	3,71	4,05	3,92	3,81	3,77	0,06%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosia;	0,55	0,56	0,58	0,87	0,90	0,35%
17	Jasa Lainnya	1,10	1,12	1,09	1,10	1,12	0,02%

Sumber: BPS 2024, diolah

Berdasarkan data struktur lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa Industri Pengolahan mendominasi perekonomian dengan kontribusi terbesar yang terus meningkat dari 40,85% pada tahun 2019 menjadi 41,95% pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 1,10%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran sentral dalam perekonomian daerah. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi, dari 11,89% di tahun 2019 menjadi 11,08% pada tahun 2023, turun sebesar 0,81%. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya pergeseran ke sektor-sektor industri yang lebih modern, atau mungkin karena perubahan dalam produktivitas sektor primer. Selanjutnya, sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami penurunan kontribusi dari 13,96% di tahun 2019 menjadi 12,77% di tahun 2023, dengan penurunan sebesar 1,18%. Hal ini bisa mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi atau perubahan dalam kegiatan perdagangan di daerah tersebut.

Sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan tren positif dengan peningkatan kontribusi dari 5,11% pada tahun 2019 menjadi 5,40% di tahun 2023, meningkat sebesar 0,29%. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya

kebutuhan logistik dan transportasi yang sejalan dengan pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah tersebut. Sementara itu, Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan signifikan dalam kontribusi, dari 2,55% pada tahun 2019 menjadi 3,50% pada tahun 2023, naik sebesar 0,96%. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan penetrasi teknologi informasi dan digitalisasi yang makin penting dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, kontribusinya juga meningkat dari 0,55% di tahun 2019 menjadi 0,90% pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 0,35%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan tingginya kebutuhan layanan kesehatan dan sosial, terutama pasca pandemi. Di sisi lain, beberapa sektor seperti Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial mengalami sedikit penurunan kontribusi. Konstruksi turun sebesar 0,27%, sedangkan Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial turun sebesar 0,49%. Penurunan ini mungkin menunjukkan adanya penyesuaian anggaran atau perubahan fokus ekonomi ke sektor-sektor lain yang lebih berkembang. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan dinamika yang menunjukkan pergeseran kontribusi antar sektor, dengan sektor industri dan jasa informasi yang semakin meningkat, sementara beberapa sektor tradisional menunjukkan penurunan dalam kontribusi terhadap PDRB.

Tabel 5. 4 Tabel Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2019 - 2023 (dalam Miliar Rp.)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	104.596,75	107.000,79	108.406,55	113.186,39	113.308,54
2	Pertambangan dan Penggalian	24.791,42	23.771,26	23.966,20	23.880,32	23.857,08
3	Industri Pengolahan	640.760,96	612.799,43	638.689,32	683.420,25	715.806,63

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.373,58	4.964,31	5.543,06	5.843,38	5.854,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	1.168,93	1.295,18	1.419,97	1.456,85	1.495,07
6	Konstruksi	126.612,45	119.062,01	126.767,90	126.184,39	133.549,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran	232.878,84	214.374,85	221.203,99	230.532,56	240.583,83
8	Transportasi dan pergudangan	71.064,36	68.097,41	67.981,50	75.521,57	83.777,20
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	40.928,32	38.634,85	38.620,93	42.972,84	46.721,90
10	Informasi dan Komunikasi	63.861,23	85.632,78	91.882,97	97.480,64	105.146,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	36.498,69	36.914,80	39.014,44	38.743,11	40.184,13
12	Real estate	19.344,12	19.716,06	22.033,68	22.993,05	24.426,12
13	Jasa Perusahaan	6.859,66	5.599,12	6.077,47	6.851,04	7.350,91
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	28.704,06	26.716,83	26.178,25	25.710,27	26.337,53
15	Jasa Pendidikan	42.156,30	44.978,19	44.988,00	46.244,59	48.575,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial;	12.448,02	11.777,49	12.666,86	13.404,19	14.189,42
17	Jasa Lainnya	32.912,01	32.045,37	32.305,31	35.559,49	38.253,41
	Total	490.959,70	1.453.380,73	1.507.746,40	1.589.984,93	1.669.416,87

Sumber: BPS 2024, diolah

Berdasarkan data perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat menurut lapangan usaha dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan pada mayoritas sektor ekonomi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan yang konsisten, dengan nilai PDRB mencapai Rp. 113.308,54 miliar pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020, sektor ini pulih dan menunjukkan kenaikan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Pada sektor Pertambangan dan

Penggalian, terdapat sedikit fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020 dan 2023. Walaupun tidak ada peningkatan besar, sektor ini tetap memberikan kontribusi yang stabil dengan nilai PDRB sekitar Rp. 23.857,08 miliar pada 2023.

Industri Pengolahan menjadi sektor dominan yang mengalami peningkatan signifikan dari Rp. 640.760,96 miliar pada 2019 hingga mencapai Rp. 715.806,63 miliar pada 2023. Pertumbuhan ini menandakan pentingnya sektor ini sebagai penggerak utama perekonomian di Jawa Barat. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami sedikit fluktuasi namun tetap mencatatkan pertumbuhan, dengan peningkatan mencapai Rp. 5.854,08 miliar pada 2023. Sementara itu, sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah terus meningkat setiap tahun, menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan atas layanan ini di masyarakat.

Sektor Konstruksi juga menunjukkan peningkatan stabil setelah penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2023, sektor ini mencatat nilai PDRB sebesar Rp. 133.549,61 miliar, yang mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan dalam industri konstruksi di Jawa Barat. Di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, terdapat penurunan pada 2020, namun sektor ini pulih dan mencatat peningkatan berturut-turut hingga mencapai Rp. 240.583,83 miliar pada 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan kembali bergerak aktif setelah periode ketidakstabilan.

Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan signifikan, terutama setelah pemulihan dari dampak pandemi. Kedua sektor ini meningkat dengan nilai PDRB masing-masing mencapai Rp. 83.777,20 miliar dan Rp. 46.721,90 miliar pada 2023, mengindikasikan peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dan logistik. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, dengan peningkatan substansial dari Rp. 63.861,23 miliar pada 2019 menjadi Rp. 105.146,00 miliar pada 2023. Hal ini mencerminkan tingginya permintaan akan layanan komunikasi dan informasi di era digital. Secara umum, total PDRB Jawa Barat terus meningkat, mencapai

Rp. 1.669.416,87 miliar pada 2023, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di provinsi ini. Sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Perdagangan Besar dan Eceran menjadi pendorong utama pertumbuhan ini.

Tabel 5. 5. Tabel Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2019-2023	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,30%	1,31%	4,41%	0,11%	8,33%	2,03%
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,11%	0,82%	-0,36%	-0,10%	-3,77%	-1,17%
3	Industri Pengolahan	-4,36%	4,22%	7,00%	4,74%	11,71%	4,45%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,62%	11,66%	5,42%	0,18%	8,94%	0,68%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	10,80%	9,63%	2,60%	2,62%	27,90%	5,95%
6	Konstruksi	-5,96%	6,47%	-0,46%	5,84%	5,48%	4,71%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-7,95%	3,19%	4,22%	4,36%	3,31%	3,34%
8	Transportasi dan pergudangan	-4,18%	-0,17%	11,09%	10,93%	17,89%	5,75%
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	-5,60%	-0,04%	11,27%	8,72%	14,16%	6,03%
10	Informasi dan Komunikasi	34,09%	7,30%	6,09%	7,86%	64,65%	12,98%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,14%	5,69%	-0,70%	3,72%	10,10%	5,10%
12	Real estate	1,92%	11,75%	4,35%	6,23%	26,27%	6,78%
13	Jasa Perusahaan	-18,38%	8,54%	12,73%	7,30%	7,16%	6,13%
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	-6,92%	-2,02%	-1,79%	2,44%	-8,24%	0,95%
15	Jasa Pendidikan	6,69%	0,02%	2,79%	5,04%	15,23%	6,84%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosia;	-5,39%	7,55%	5,82%	5,86%	13,99%	7,78%
17	Jasa Lainnya	-2,63%	0,81%	10,07%	7,58%	16,23%	6,71%
18	Total	-2,52%	3,74%	5,45%	5,00%	11,97%	4,53%

Sumber: BPS 2024, diolah

Berdasarkan data pertumbuhan lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat variasi signifikan pada sektor-sektor tertentu. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan peningkatan stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,03%. Namun, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami tren negatif dengan penurunan rata-rata sebesar -1,17%, menunjukkan ketergantungan yang mungkin berkurang terhadap sektor ini. Sektor Industri Pengolahan menjadi salah satu pendorong utama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,45%, mencerminkan peran penting sektor ini dalam perekonomian Jawa Barat. Begitu pula sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh rata-rata 0,68%, meskipun ada penurunan tajam pada tahun 2019-2020.

Pada sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah, terjadi peningkatan substansial sebesar 27,90% selama periode ini, dengan rata-rata pertumbuhan 5,95%. Ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan positif dengan rata-rata 4,71%, sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh stabil sebesar 3,34%. Kedua sektor ini menunjukkan kontribusi penting dalam kegiatan ekonomi Jawa Barat.Selain itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan mengalami peningkatan yang signifikan dengan masing-masing rata-rata 5,75% dan 6,03%, mengindikasikan pemulihan dan pertumbuhan pada sektor-sektor yang terdampak pandemi.

Sektor Informasi dan Komunikasi menonjol dengan pertumbuhan luar biasa sebesar 64,65% selama periode tersebut, hal ini mencerminkan peningkatan pesat dalam adopsi teknologi informasi. Diikuti oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan rata-rata 5,10%, mengindikasikan permintaan yang kuat untuk layanan finansial. Apabila kita melihat pada Sektor Real Estate dan Jasa Perusahaan, sektor ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan masing-masing 6,78% dan 6,13%, sementara Administrasi Pemerintahan mencatat pertumbuhan rata-rata

yang negatif, sebesar 0,95%. Secara gambaran besar, total pertumbuhan PDRB untuk Jawa Barat mencatat kenaikan rata-rata sebesar 4,53%, yang didorong oleh sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Kesehatan serta Kegiatan Sosial.

Tabel 5. 6 Tabel Struktur Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,02%	7,36%	7,19%	7,12%	6,79%	-0,23%
Pertambangan dan Penggalian	1,66%	1,64%	1,59%	1,50%	1,43%	-0,23%
Industri Pengolahan	42,98 %	42,16 %	42,36 %	42,98 %	42,88 %	-0,10%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,36%	0,34%	0,37%	0,37%	0,35%	-0,01%
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%
Konstruksi	8,49%	8,19%	8,41%	7,94%	8,00%	-0,49%
Perdagangan Besar dan Eceran	15,62 %	14,75 %	14,67 %	14,50 %	14,41 %	-1,21%
Transportasi dan pergudangan	4,77%	4,69%	4,51%	4,75%	5,02%	0,25%
Penyedia Akomodasi dan Makan	2,75%	2,66%	2,56%	2,70%	2,80%	0,05%
Informasi dan Komunikasi	4,28%	5,89%	6,09%	6,13%	6,30%	2,02%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45%	2,54%	2,59%	2,44%	2,41%	-0,04%
Real estate	1,30%	1,36%	1,46%	1,45%	1,46%	0,17%
Jasa Perusahaan	0,46%	0,39%	0,40%	0,43%	0,44%	-0,02%
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	1,93%	1,84%	1,74%	1,62%	1,58%	-0,35%
Jasa Pendidikan	2,83%	3,09%	2,98%	2,91%	2,91%	0,08%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial;	0,83%	0,81%	0,84%	0,84%	0,85%	0,02%
Jasa Lainnya	2,21%	2,20%	2,14%	2,24%	2,29%	0,08%

Sumber: BPS 2024, diolah

Berdasarkan data struktur lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023, Industri Pengolahan tetap menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 42,98% pada tahun 2019 menjadi 42,88% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan dominasi sektor manufaktur dalam perekonomian Jawa Barat, meski terdapat fluktuasi kecil. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peranan penting pada awal periode, cenderung menurun kontribusinya sebesar 0,23% hingga mencapai 6,79% pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor yang lebih industrialis.

Selanjutnya, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menunjukkan tren penurunan kontribusi dari 15,62% pada tahun 2019 menjadi 14,41% pada tahun 2023, turun sebesar 1,21%. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika pasar dan kebiasaan konsumen di wilayah Jawa Barat. Sebaliknya, sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan kontribusi signifikan, dari 4,28% pada tahun 2019 menjadi 6,30% pada 2023, naik sebesar 2,02%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat dalam adopsi teknologi dan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, yang memberikan dampak positif pada sektor komunikasi.

Di sisi lain, sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat kenaikan sebesar 0,25% dalam kontribusinya, dari 4,77% pada tahun 2019 menjadi 5,02% pada tahun 2023. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya aktivitas logistik yang terkait dengan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Adapun sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga menunjukkan peningkatan kecil dari 0,83% menjadi 0,85%, yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Adapun kesimpulan yang bisa diambil, tabel di atas menunjukkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi Jawa Barat, dengan

pertumbuhan pesat di sektor teknologi dan komunikasi serta sedikit penurunan pada sektor-sektor tradisional.

5.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Dalam pembangunan daerah, komponen pertumbuhan wilayah memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan sektor usaha. Komponen ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Apabila ketiga komponen tersebut menunjukkan nilai positif, maka laju pertumbuhan pembangunan di daerah tersebut akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PR) sebagai faktor pertama menggambarkan hasil perkalian antara rasio PDRB Provinsi Jawa Barat dengan PDRB sektor i (sektor-sektor ekonomi yang diteliti) di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019.

Tabel 5. 7 Tabel Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), Periode Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Komponen Pertumbuhan Provinsi (PR)	
		%	N (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,97%	446,95
2	Pertambangan dan Penggalian	11,97%	39,46
3	Industri Pengolahan	11,97%	1.535,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,97%	28,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	11,97%	1,38
6	Konstruksi	11,97%	281,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran	11,97%	524,51
8	Transportasi dan pergudangan	11,97%	192,15
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	11,97%	196,99
10	Informasi dan Komunikasi	11,97%	95,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,97%	31,06

No	Lapangan Usaha	Komponen Pertumbuhan Provinsi (PR)	
		%	N (Miliar Rupiah)
12	Real estate	11,97%	73,62
13	Jasa Perusahaan	11,97%	18,45
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	11,97%	91,56
15	Jasa Pendidikan	11,97%	139,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	11,97%	20,70
17	Jasa Lainnya	11,97%	41,32
18	Total	11,97%	3.758,16

Sumber: data diolah Peneliti, 2024

Pengaruh pertumbuhan regional menjelaskan perubahan kebijakan ekonomi regional yang berdampak pada perekonomian semua sektor di Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, persentase komponen PR di setiap sektor sama dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 11,97 persen. Artinya, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2023 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 3.758,16 miliar (11,97%).

Bila dilihat secara keseluruhan, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan proporsional, dengan nilai mencapai Rp 1.535,28 miliar. Ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang besar dalam mendorong perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memberikan kontribusi signifikan dengan nilai masing-masing sebesar Rp 524,51 miliar dan Rp 446,95 miliar. Sektor-sektor lainnya, seperti Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan, dan Pengadaan Air, Pengelolaan, memiliki kontribusi yang lebih kecil dalam komponen pertumbuhan proporsional. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam permintaan produk akhir, sumber daya yang tersedia, serta kebijakan industri yang diterapkan pada masing-masing sektor.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) sebagai pengaruh kedua menggambarkan perbedaan antara rasio pertumbuhan sektor di tingkat kabupaten dan provinsi, yang kemudian dikalikan dengan PDRB Kabupaten Bandung Barat untuk masing-masing sektor pada tahun 2019. Komponen ini menunjukkan adanya variasi dalam permintaan terhadap produk akhir, ketersediaan bahan baku, kebijakan industri, serta diversitas pasar di tiap sektor. Oleh karena itu, PP memperlihatkan perbedaan peningkatan PDRB Jawa Barat pada level regional dibandingkan dengan peningkatan PDRB sektor ekonomi secara nasional. Dengan demikian, persentase komponen pertumbuhan proporsional ini sama untuk seluruh sektor di setiap kabupaten di Jawa Barat, sementara kontribusi masing-masing sektor berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi lokal.

Tabel 5. 8 Tabel Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), Periode Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Komponen Pertumbuhan Proporsional Provinsi (PP)	
		%	N (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3,64%	-135,94
2	Pertambangan dan Penggalian	-15,74%	-51,88
3	Industri Pengolahan	-0,26%	-33,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,03%	-7,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	15,93%	1,83
6	Konstruksi	-6,49%	- 152,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-8,66%	-379,52
8	Transportasi dan pergudangan	5,92%	95,03
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	2,19%	35,98
10	Informasi dan Komunikasi	52,68%	421,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,87%	-4,86
12	Real estate	14,30%	87,97
13	Jasa Perusahaan	-4,81%	-7,41

No	Lapangan Usaha	Komponen Pertumbuhan Proporsional Provinsi (PP)	
		%	N (Miliar Rupiah)
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	-20,21%	-154,63
15	Jasa Pendidikan	3,26%	37,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	2,02%	3,49
17	Jasa Lainnya	4,26%	14,71
	Total		-228,65

Sumber: data diolah Peneliti, 2024

Sektor dengan penurunan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat dalam komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) adalah Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, dengan penurunan sebesar -20,21% atau sekitar Rp -154,63 miliar. Sektor lain yang juga mengalami penurunan signifikan termasuk Perdagangan Besar dan Eceran (-8,66%) dan Konstruksi (-6,49%), yang masing-masing turun sebesar Rp -379,52 miliar dan Rp -152,46 miliar. Di sisi lain, sektor yang menunjukkan nilai PP positif terbesar adalah Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 52,68%, berkontribusi sebesar Rp 421,25 miliar. Sektor ini memiliki potensi pengembangan yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat, mengingat pertumbuhannya yang cepat dan kontribusi yang besar terhadap PDRB daerah. Sektor lain yang juga mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan adalah Real Estate (14,30%) dan Pengadaan Air, Pengelolaan (15,93%), masing-masing dengan kontribusi sebesar Rp 87,97 miliar dan Rp 1,83 miliar.

Secara umum, komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan agregat sebesar Rp -228,65 miliar, menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang cukup besar dalam periode tersebut.

Nilai komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan daya saing sektor ekonomi di daerah tersebut. Apabila nilai PPW

bernilai positif (PPWij > 0), sektor tersebut dianggap memiliki daya saing yang cukup baik dibandingkan dengan sektor serupa di daerah lain. Sebaliknya, jika nilai PPW bernilai negatif (PPWij < 0), sektor tersebut memiliki daya saing yang kurang baik. Berdasarkan data, sektor yang memiliki daya saing rendah di Kabupaten Bandung Barat antara lain Informasi dan Komunikasi dengan nilai -11,03%, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan sebesar -4,30%.

Tabel 5. 9 Tabel Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Periode Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kab. Bandung Barat (PPW)	
		%	N (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4,30%	-160,68
2	Pertambangan dan Penggalian	8,31%	27,40
3	Industri Pengolahan	2,97%	381,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,24%	14,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	4,97%	0,57
6	Konstruksi	2,15%	50,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-1,09%	-47,97
8	Transportasi dan pergudangan	0,12%	1,88
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	-0,75%	-12,32
10	Informasi dan Komunikasi	-11,03%	-88,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,59%	-1,53
12	Real estate	0,11%	0,65
13	Jasa Perusahaan	7,35%	11,33
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	-2,47%	-18,89
15	Jasa Pendidikan	-1,74%	-20,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	69,21%	119,71
17	Jasa Lainnya	-2,28%	-7,89
	Total		**250,43**

Sumber: Peneliti, 2024

Sektor dengan daya saing tertinggi ditunjukkan oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dengan nilai PPW sebesar 69,21% atau berkontribusi sebesar Rp 119,71 miliar. Sektor ini memiliki performa yang sangat baik dibandingkan sektor serupa di wilayah lain di Jawa Barat, menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, sektor Industri Pengolahan juga mencatat nilai PPW positif sebesar 2,97%, dengan kontribusi sebesar Rp 381,20 miliar, yang menandakan daya saing yang relatif kuat di sektor ini. Dengan demikian, Kabupaten Bandung Barat memiliki total kontribusi PPW sebesar Rp 250,43 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa beberapa sektor memiliki daya saing yang kuat, terutama dalam Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Industri Pengolahan, yang secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perlu adanya perhatian terhadap sektor-sektor dengan nilai PPW negatif, seperti Informasi dan Komunikasi, untuk meningkatkan daya saing sektor tersebut di masa mendatang.

5.2.1 Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Periode 2019-2023

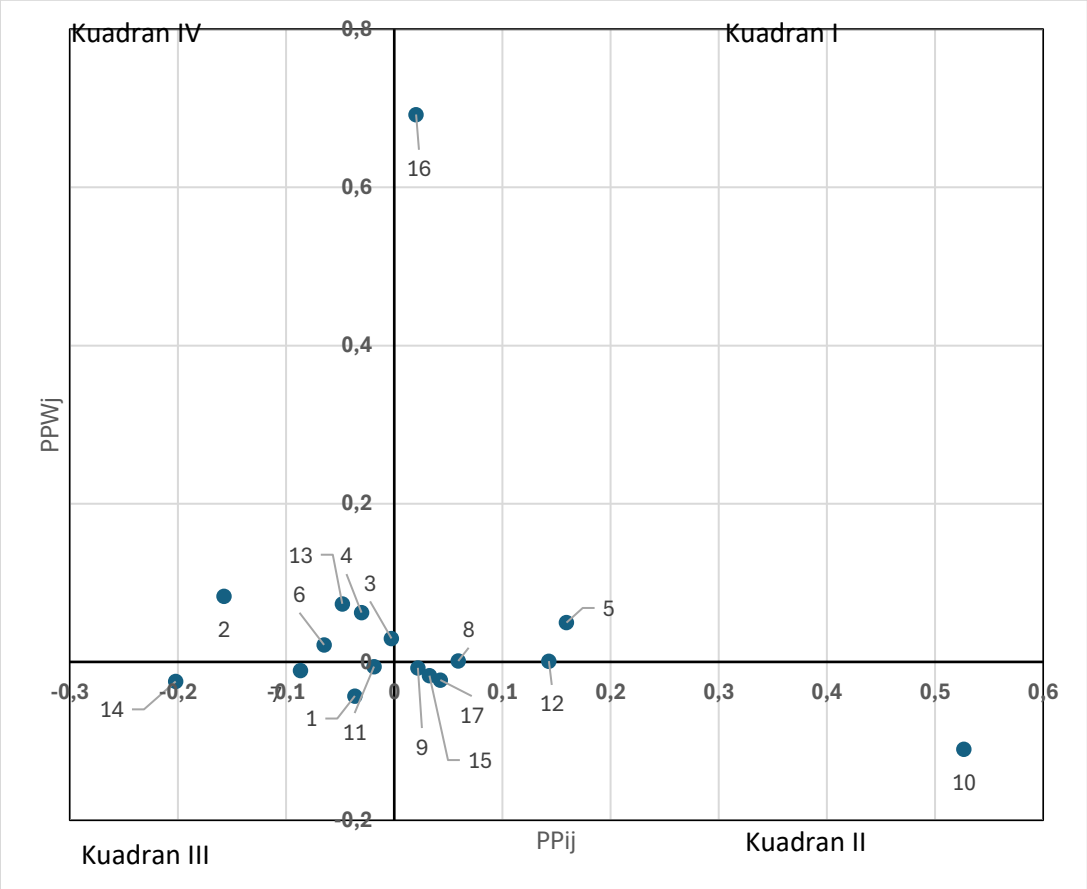
Analisis profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mengidentifikasi pertumbuhan PDRB sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut. Dalam analisis ini, persentase pertumbuhan proporsional setiap sektor ditempatkan pada sumbu vertikal, sementara persentase perubahan pertumbuhan pangsa wilayah ditempatkan pada sumbu horizontal.

Tabel 5. 10 Tabel Analisis profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Komponen Pertumbuhan Proporsional Provinsi (PP) %	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kab. Bandung Barat (PPW) %
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3,64%	-4,30%
2	Pertambangan dan Penggalian	-15,74%	8,31%
3	Industri Pengolahan	-0,26%	2,97%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,03%	6,24%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	15,93%	4,97%
6	Konstruksi	-6,49%	2,15%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-8,66%	-1,09%
8	Transportasi dan pergudangan	5,92%	0,12%
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	2,19%	-0,75%
10	Informasi dan Komunikasi	52,68%	-11,03%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,87%	-0,59%
12	Real estate	14,30%	0,11%
13	Jasa Perusahaan	-4,81%	7,35%
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	-20,21%	-2,47%
15	Jasa Pendidikan	3,26%	-1,74%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	2,02%	69,21%
17	Jasa Lainnya	4,26%	-2,28%

Sumber: Peneliti, 2024

Gambar 5. 1 Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2015-2023



Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang ditampilkan dalam empat kuadran pada grafik di atas, berikut adalah analisis pertumbuhan setiap kuadran.

Kuadran I

Kuadran ini mencakup sektor-sektor dengan nilai PP dan PPW yang positif, yang menunjukkan pertumbuhan dan daya saing yang baik. Sektor-sektor di Kuadran I meliputi:

- **[5] Pengadaan Air, Pengelolaan** (PP 15,93%, PPW 4,97%)
- **[12] Real Estate** (PP 14,30%, PPW 0,11%)
- **[16] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** (PP 2,02%, PPW 69,21%)

Sektor-sektor ini memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang dan bersaing karena pertumbuhannya cepat serta memiliki daya saing yang tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada pengembangan sektor-sektor ini untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Kuadran II

Kuadran ini berisi sektor-sektor dengan nilai PP positif tetapi PPW negatif, yang menunjukkan pertumbuhan cepat namun daya saingnya lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Sektor-sektor dalam Kuadran II adalah:

- **[9] Penyedia Akomodasi dan Makan** (PP 2,19%, PPW -0,75%)
- **[10] Informasi dan Komunikasi** (PP 52,68%, PPW -11,03%)
- **[15] Jasa Pendidikan** (PP 3,26%, PPW -1,74%)

Meskipun sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mereka memerlukan strategi peningkatan daya saing agar dapat sejajar dengan sektor yang sama di daerah lain. Dukungan dalam hal teknologi, pemasaran, dan kebijakan khusus mungkin diperlukan untuk memperkuat daya saing mereka.

Kuadran III

Kuadran III mencakup sektor-sektor dengan nilai PP dan PPW negatif, yang menunjukkan pertumbuhan dan daya saing yang rendah. Sektor-sektor di Kuadran III meliputi:

- **[1] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** (PP -3,64%, PPW -4,30%)
- **[7] Perdagangan Besar dan Eceran** (PP -8,66%, PPW -1,09%)
- **[14] Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial** (PP -20,21%, PPW -2,47%)

Sektor-sektor ini menghadapi tantangan besar, baik dalam hal pertumbuhan maupun daya saing. Langkah-langkah kebijakan yang mendukung restrukturisasi atau

reorientasi sektor ini mungkin diperlukan agar mereka dapat berkontribusi lebih optimal dalam ekonomi lokal.

Kuadran IV

Kuadran ini terdiri dari sektor-sektor dengan nilai PP negatif namun PPW positif, menunjukkan daya saing yang baik meskipun pertumbuhannya lambat. Sektor-sektor di Kuadran IV adalah:

- **[2] Pertambangan dan Penggalian** (PP -15,74%, PPW 8,31%)
- **[3] Industri Pengolahan** (PP -0,26%, PPW 2,97%)
- **[4] Pengadaan Listrik dan Gas** (PP -3,03%, PPW 6,24%)
- **[6] Konstruksi** (PP -6,49%, PPW 2,15%)
- **[13] Jasa Perusahaan** (PP -4,81%, PPW 7,35%)

Sektor-sektor ini menunjukkan daya saing yang cukup kuat meskipun mengalami pertumbuhan yang lambat. Dukungan dalam hal inovasi, efisiensi operasional, dan mungkin insentif untuk meningkatkan investasi dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini agar lebih optimal.

Tabel 5. 11 Tabel Pergeseran Bersih Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Pergeseran Bersih (PB)	
		%	N (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,03%	150,33
2	Pertambangan dan Penggalian	4,54%	14,98
3	Industri Pengolahan	14,68%	1.883,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,18%	35,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	32,87%	3,78
6	Konstruksi	7,63%	179,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2,21%	97,02
8	Transportasi dan pergudangan	18,01%	289,06
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	13,41%	220,65
10	Informasi dan Komunikasi	53,62%	428,80

No	Lapangan Usaha	Pergeseran Bersih (PB)	
		%	N (Miliar Rupiah)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,51%	24,67
12	Real estate	26,38%	162,25
13	Jasa Perusahaan	14,51%	22,37
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	-10,71%	-81,96
15	Jasa Pendidikan	13,49%	157,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	83,20%	143,91
17	Jasa Lainnya	13,95%	48,14
	Total	3,17	3.779,94

Sumber: Peneliti, 2024

Nilai pergeseran bersih (PB) yang diperoleh dari penjumlahan komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan pangsa wilayah (PPW) memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang memiliki kinerja positif atau negatif di Kabupaten Bandung Barat.

- Sektor dengan Pergeseran Bersih Tinggi: Sektor dengan nilai pergeseran bersih tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi dengan persentase 53,62% dan nilai sebesar Rp 428,80 miliar. Sektor ini menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki daya saing yang baik di tingkat wilayah. Selain itu, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga memiliki PB yang sangat tinggi sebesar 83,20%, yang mencerminkan pertumbuhan pesat dalam pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial dengan kontribusi sebesar Rp 143,91 miliar.
- Sektor dengan Pertumbuhan Stabil: Sektor Industri Pengolahan dengan PB sebesar 14,68% dan nilai Rp 1.883,47 miliar juga menunjukkan pertumbuhan yang baik dan stabil, menjadi salah satu kontributor utama bagi ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dengan nilai tambah yang tinggi. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga

mencatat PB yang kuat dengan persentase 18,01% dan nilai Rp 289,06 miliar, yang mencerminkan peningkatan dalam logistik dan distribusi barang.

- Sektor dengan Pergeseran Bersih Negatif: Di sisi lain, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial mencatat PB negatif sebesar -10,71%, yang berarti sektor ini mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB daerah dengan nilai -Rp 81,96 miliar. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam sektor administrasi dan jaminan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya di tingkat regional.

Secara keseluruhan, total pergeseran bersih di Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp 3.779,94 miliar dengan persentase rata-rata 3,17%, menunjukkan adanya pertumbuhan positif di sebagian besar sektor ekonomi, meskipun ada beberapa sektor yang masih memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan daya saing dan kontribusi terhadap ekonomi daerah.

5.2.2 Analisis Sektor Unggulan

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) adalah dua metode penting dalam mengidentifikasi dan memahami sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat. LQ digunakan untuk mengukur konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah ini, dengan membandingkan peran suatu sektor di Kabupaten Bandung Barat terhadap peran yang sama di tingkat provinsi atau nasional. Melalui LQ, dapat diketahui sektor-sektor yang berfungsi sebagai basis ekonomi atau sektor dengan kapasitas ekspor tinggi. Sektor basis ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor barang atau jasa ke wilayah lain. Menurut Tarigan (2005), LQ merupakan alat untuk memahami bagaimana suatu sektor memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam konteks wilayah yang lebih besar, sehingga sektor dengan nilai LQ > 1 dianggap sebagai sektor unggulan atau basis.

Di sisi lain, *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dengan melihat perubahan daya saing sektor dari waktu ke waktu. Sementara LQ memberikan gambaran statis, DLQ menyoroti apakah suatu sektor di Kabupaten Bandung Barat cenderung berkembang atau menurun dalam perannya secara relatif terhadap pertumbuhan sektor tersebut di wilayah yang lebih luas, seperti Jawa Barat atau nasional. DLQ yang bernilai lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan menjadi lebih dominan, sedangkan DLQ kurang dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut mungkin kurang kompetitif dibandingkan sektor serupa di tingkat provinsi atau nasional.

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, kombinasi analisis LQ dan DLQ memberikan pemahaman yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang tidak hanya kuat secara struktural tetapi juga memiliki potensi perkembangan di masa depan. Misalnya, sektor dengan LQ tinggi dan DLQ > 1 tidak hanya menunjukkan peran ekonomi yang kuat saat ini tetapi juga prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Hal ini penting bagi perencanaan ekonomi lokal, dimana sektor-sektor dengan nilai LQ dan DLQ positif dapat difokuskan untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Sementara itu, sektor-sektor dengan LQ rendah tetapi DLQ tinggi menunjukkan potensi untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan di masa depan.

Tabel 5. 12 Tabel Analisis LQ Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023

No	PDRB Kab. Bandung Barat (Konstan) dalam Miliar Rupiah	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata LQ	2019 - 2023	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,70	1,65	1,61	1,61	1,63	1,64	-0,06	Basis tapi mengalami penurunan

No	PDRB Kab. Bandung Barat (Konstan) dalam Miliar Rupiah	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata LQ	2019 - 2023	Keterangan
2	Pertambangan dan Penggalian	0,63	0,64	0,68	0,68	0,69	0,67	0,06	Non Basis cenderung turun
3	Industri Pengolahan	0,95	0,97	0,98	0,97	0,98	0,97	0,03	Non Basis stagnan
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,10	2,20	2,19	2,18	2,22	2,18	0,13	Basis Cenderung Naik
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,47	0,46	0,47	0,49	0,49	0,47	0,02	Non Basis cenderung turun
6	Konstruksi	0,88	0,88	0,89	0,91	0,90	0,89	0,02	Non Basis stagnan
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	-0,01	Non Basis stagnan
8	Transportasi dan pergudangan	1,07	1,08	1,09	1,08	1,08	1,08	0,00	Basis tapi mengalami penurunan
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	1,91	1,93	1,91	1,89	1,90	1,91	-0,01	Basis tapi mengalami penurunan
10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,56	0,57	0,56	0,56	0,57	-0,04	Non Basis cenderung turun
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	Non Basis stagnan
12	Real estate	1,51	1,48	1,46	1,52	1,52	1,50	0,01	Basis tapi mengalami penurunan
13	Jasa Perusahaan	1,07	1,15	1,14	1,13	1,14	1,13	0,08	Basis tapi mengalami penurunan
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	1,27	1,25	1,25	1,24	1,23	1,25	-0,03	Basis tapi mengalami penurunan
15	Jasa Pendidikan	1,31	1,31	1,31	1,31	1,30	1,31	-0,02	Basis tapi mengalami penurunan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,66	0,69	0,69	1,03	1,06	0,83	0,40	Menjadi basis dan cenderung naik

No	PDRB Kab. Bandung Barat (Konstan) dalam Miliar Rupiah	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata LQ	2019 - 2023	Keterangan
17	Jasa Lainnya	0,50	0,51	0,51	0,49	0,49	0,50	-0,01	Non Basis cenderung turun

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat selama periode 2019-2023, terlihat adanya variasi kinerja sektor ekonomi baik dalam kontribusi sebagai sektor basis maupun non-basis.

1. **Sektor Basis**: Sektor-sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ > 1, yang menunjukkan kontribusi sebagai sektor basis di Kabupaten Bandung Barat, meliputi:
    - **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** (1,64): Meskipun menjadi sektor basis, sektor ini mengalami tren penurunan (Δ LQ = -0,06), yang menunjukkan daya saing yang menurun.
    - **Pengadaan Listrik dan Gas** (2,18): Sektor ini merupakan sektor basis dan menunjukkan tren peningkatan (Δ LQ = 0,13), menandakan potensi yang baik dalam jangka panjang.
    - **Transportasi dan Pergudangan** (1,08): Meskipun menjadi basis, sektor ini mengalami penurunan dalam daya saing, dengan LQ cenderung stagnan.
    - **Penyedia Akomodasi dan Makan** (1,91): Sektor ini juga menunjukkan peran sebagai basis, namun dengan penurunan kecil dalam LQ (-0,01), menunjukkan sedikit penurunan daya saing.
    - **Real Estate** (1,50): Sektor ini mengalami sedikit penurunan (Δ LQ = 0,01), tetapi tetap menjadi basis.
    - **Jasa Perusahaan** (1,13): Sektor ini merupakan basis dengan sedikit penurunan daya saing, meskipun menunjukkan sedikit peningkatan LQ (0,08).

- **Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial** (1,25) dan **Jasa Pendidikan** (1,31): Kedua sektor ini adalah basis namun mengalami sedikit penurunan daya saing (Δ LQ masing-masing -0,03 dan -0,02).
- **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** (0,83): Sektor ini awalnya non-basis namun cenderung naik menjadi basis dengan peningkatan yang signifikan (Δ LQ = 0,40).

2. **Sektor Non-Basis dengan Potensi Stagnan atau Penurunan**: Sektor-sektor dengan rata-rata LQ < 1 dan menunjukkan stagnasi atau kecenderungan menurun, yaitu:
   - **Pertambangan dan Penggalian** (0,67): Non-basis dengan kecenderungan turun walaupun terdapat sedikit peningkatan LQ (Δ LQ = 0,06).
   - **Industri Pengolahan** (0,97): Non-basis yang cenderung stagnan dengan sedikit peningkatan LQ (0,03).
   - **Pengadaan Air, Pengelolaan** (0,47): Non-basis dengan tren penurunan (Δ LQ = 0,02).
   - **Perdagangan Besar dan Eceran** (0,89), **Jasa Keuangan dan Asuransi** (0,34), **Informasi dan Komunikasi** (0,57): Semua sektor ini adalah non-basis dengan tren stagnan atau menurun.
3. **Perubahan Menjadi Sektor Basis**: **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** yang awalnya non-basis berhasil menjadi sektor basis dengan peningkatan signifikan dalam LQ (Δ LQ = 0,40), menunjukkan adanya pertumbuhan dan potensi ekspansi sektor ini di masa mendatang.

Secara keseluruhan, sektor-sektor seperti **Pengadaan Listrik dan Gas** serta **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** menunjukkan peningkatan daya saing dan peran ekonomi yang semakin kuat di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, sektor-sektor tradisional seperti **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** serta **Transportasi dan Pergudangan** masih mempertahankan status sebagai sektor basis, namun cenderung menunjukkan penurunan dalam LQ, menandakan perlunya kebijakan atau intervensi untuk mempertahankan daya saingnya. Sektor-sektor yang stagnan dan

non-basis dapat menjadi area perhatian untuk diversifikasi ekonomi atau upaya peningkatan daya saing.

Tabel 5. 13 Tabel Analisis DLQ Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023

No	PDRB Kab. Bandung Barat (Konstan) dalam Miliar Rupiah	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata DLQ	2019 - 2023	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,95	0,83	0,87	1,07	1,28	1,00	0,33	Berpotensi
2	Pertambangan dan Penggalian	0,81	0,97	1,34	0,81	0,86	0,96	0,04	Kurang Berpotensi
3	Industri Pengolahan	1,44	1,33	1,16	1,03	1,15	1,22	-0,29	Berpotensi
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,15	1,20	0,70	0,69	0,92	0,93	-0,23	Kurang Berpotensi
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,87	0,83	0,86	1,41	0,84	0,96	-0,03	Kurang Berpotensi
6	Konstruksi	1,08	1,34	1,42	1,62	1,14	1,32	0,06	Berpotensi
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,92	1,27	1,26	1,26	1,26	1,19	0,34	Berpotensi
8	Transportasi dan pergudangan	1,08	1,18	1,29	1,03	1,08	1,13	0,00	Berpotensi
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	1,18	1,42	1,17	1,15	1,34	1,25	0,16	Berpotensi
10	Informasi dan Komunikasi	1,03	0,65	1,18	1,07	0,97	0,98	-0,06	Kurang Berpotensi
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,34	1,30	1,24	1,28	1,33	-0,20	Berpotensi
12	Real estate	0,98	0,90	0,90	1,51	1,07	1,07	0,09	Berpotensi
13	Jasa Perusahaan	1,07	2,59	1,17	1,03	1,45	1,46	0,38	Berpotensi
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	0,89	1,34	1,37	1,27	1,45	1,26	0,55	Berpotensi

No	PDRB Kab. Bandung Barat (Konstan) dalam Miliar Rupiah	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata DLQ	2019 - 2023	Keterangan
15	Jasa Pendidikan	1,35	1,39	1,41	1,36	1,27	1,36	-0,08	Berpotensi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,33	0,66	0,34	22,79	0,52	4,93	0,19	Berpotensi
17	Jasa Lainnya	1,29	1,73	1,37	0,97	1,28	1,33	-0,01	Berpotensi

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2019 hingga 2023, dapat diidentifikasi potensi pertumbuhan sektor ekonomi daerah. Analisis DLQ ini membantu melihat potensi sektor untuk tumbuh lebih cepat daripada sektor yang sama di wilayah lain. Berikut adalah hasil dan interpretasi per sekto.

1. **Sektor Berpotensi**:
   - **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** (DLQ rata-rata 1,00): Meskipun sektor ini memiliki DLQ yang fluktuatif, dengan nilai akhir yang tinggi pada 2023, sektor ini menunjukkan potensi untuk berkembang dengan tren yang menguat.
   - **Industri Pengolahan** (DLQ rata-rata 1,22): Sektor ini menunjukkan potensi walaupun terdapat sedikit penurunan DLQ (-0,29), yang menunjukkan sektor ini masih lebih unggul dibandingkan sektor sejenis di daerah lain.
   - **Konstruksi** (DLQ rata-rata 1,32): Sektor konstruksi memiliki nilai DLQ yang meningkat, menunjukkan sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik di Kabupaten Bandung Barat.
   - **Perdagangan Besar dan Eceran** (DLQ rata-rata 1,19): Meskipun sektor ini berada di atas nilai 1, potensi pertumbuhannya stabil, mencerminkan daya tarik untuk terus berkembang.

- **Transportasi dan Pergudangan** (DLQ rata-rata 1,13): Sektor ini menunjukkan stabilitas dengan nilai DLQ yang tidak berubah, yang menandakan sektor ini berpotensi mempertahankan kinerjanya yang positif.
- **Penyedia Akomodasi dan Makan** (DLQ rata-rata 1,25): Sektor ini memiliki nilai DLQ yang menunjukkan potensi pertumbuhan, sesuai dengan peningkatan pariwisata dan perhotelan.
- **Jasa Keuangan dan Asuransi** (DLQ rata-rata 1,33): Sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik, walaupun terdapat sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
- **Real Estate** (DLQ rata-rata 1,07): Sektor ini menunjukkan potensi pertumbuhan, terutama dengan peningkatan nilai di tahun terakhir.
- **Jasa Perusahaan** (DLQ rata-rata 1,46): Sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan memiliki nilai DLQ yang signifikan di atas 1, menjadikannya salah satu sektor berpotensi tinggi.
- **Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial** (DLQ rata-rata 1,26): Sektor ini memiliki pertumbuhan stabil dengan DLQ yang terus meningkat, menunjukkan peran penting dalam ekonomi daerah.
- **Jasa Pendidikan** (DLQ rata-rata 1,36): Sektor pendidikan juga menunjukkan potensi meskipun ada sedikit fluktuasi, sektor ini tetap berperan penting.
- **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** (DLQ rata-rata 4,93): Meskipun memiliki fluktuasi, sektor ini menunjukkan peningkatan drastis pada tahun 2022, menjadi sektor yang sangat berpotensi untuk berkembang lebih cepat di masa depan.
- **Jasa Lainnya** (DLQ rata-rata 1,33): Sektor ini stabil dengan potensi pertumbuhan yang baik.

2. **Sektor Kurang Berpotensi**:

- **Pertambangan dan Penggalian** (DLQ rata-rata 0,96): Meskipun ada fluktuasi kecil, sektor ini tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berada di bawah nilai 1, menandakan kurangnya potensi dibandingkan sektor lain.
- **Pengadaan Listrik dan Gas** (DLQ rata-rata 0,93): Sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa sektor ini kurang berpotensi dalam konteks wilayah ini.
- **Pengadaan Air dan Pengelolaan** (DLQ rata-rata 0,96): Sektor ini tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan cenderung menurun, sehingga dianggap kurang berpotensi.
- **Informasi dan Komunikasi** (DLQ rata-rata 0,98): Meskipun sektor ini penting, pertumbuhannya cenderung turun, menunjukkan potensi yang kurang kuat dalam perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, sektor yang memiliki nilai DLQ di atas 1 menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik, terutama sektor *Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial*, *Jasa Perusahaan*, dan *Jasa Pendidikan*, yang dapat menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, sektor dengan nilai DLQ di bawah 1 perlu diperhatikan lebih lanjut karena menunjukkan kurangnya daya saing dan pertumbuhan relatif lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di wilayah lain.

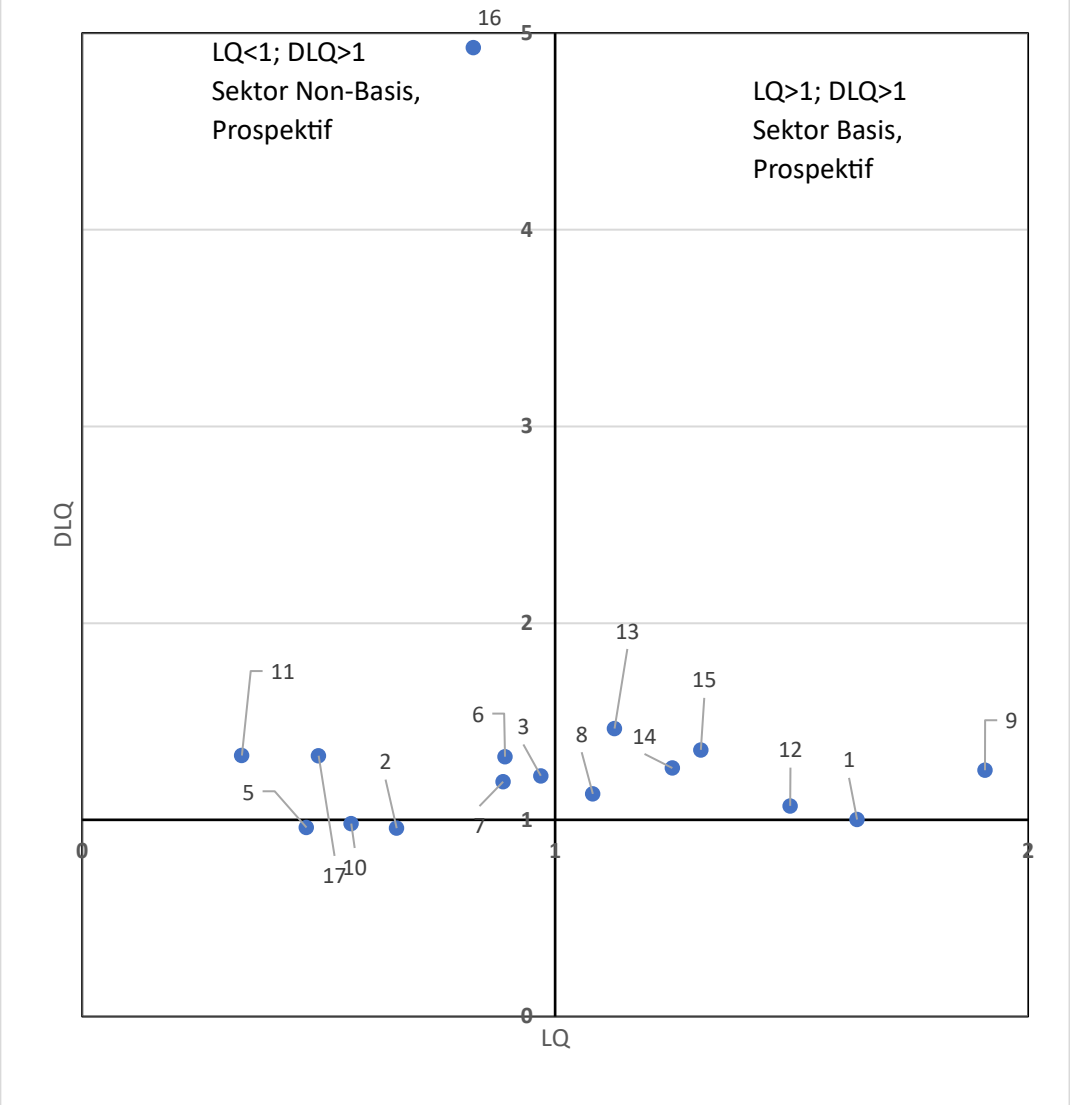
Tabel 5. 14 Tabel rata-rata LQ dan DLQ

No	Sektor PDRB	Rata-rata LQ	Rata-rata DLQ
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,64	1,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,96
3	Industri Pengolahan	0,97	1,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	0,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,47	0,96
6	Bangunan	0,89	1,32

No	Sektor PDRB	Rata-rata LQ	Rata-rata DLQ
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,89	1,19
8	Transportasi dan pergudangan	1,08	1,13
9	Penyedia Akomodasi dan Makan	1,91	1,25
10	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,34	1,33
12	Real estate	1,50	1,07
13	Jasa Perusahaan	1,13	1,46
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	1,25	1,26
15	Jasa Pendidikan	1,31	1,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,83	4,93
17	Jasa Lainnya	0,50	1,33

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel rata-rata LQ dan DLQ untuk sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, berikut adalah analisis tipologi Klassen yang membagi sektor-sektor ke dalam empat kuadran, yaitu Kuadran I, II, III, dan IV, berdasarkan potensi dan keunggulan sektoralnya.



Gambar 5. 2. Tipologi Klassen LQ dan DLQ Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2019-2023

Sumber: Peneliti, 2024

1. **Kuadran I (LQ > 1; DLQ > 1 - Sektor Basis dan Prospektif)**:
    - Sektor-sektor dalam kuadran ini adalah sektor basis yang juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik.
    - Sektor yang berada dalam kuadran ini:
        - Transportasi dan Pergudangan (No. 8)

- Penyedia Akomodasi dan Makan (No. 9)
- Real Estate (No. 12)
- Jasa Perusahaan (No. 13)
- Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial (No. 14)
- Jasa Pendidikan (No. 15)

  - Sektor-sektor ini dapat dikategorikan sebagai sektor andalan yang memiliki daya saing dan potensi pertumbuhan di Kabupaten Bandung Barat.

2. **Kuadran II (LQ < 1; DLQ > 1 - Sektor Non-Basis dan Prospektif)**:
   - Sektor dalam kuadran ini bukan merupakan sektor basis, namun memiliki prospek pertumbuhan yang baik.
   - Sektor-sektor yang berada dalam kuadran ini:
     - **Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial (No. 16)**
     - **Industri Pengolahan (No. 3)**
     - **Konstruksi (No. 6)**
     - **Perdagangan Besar dan Eceran (No. 7)**
     - **Jasa Keuangan dan Asuransi (No. 11)**
     - **Jasa Lainnya (No. 17)**
   - Meskipun bukan sektor utama saat ini, sektor-sektor ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi sektor penting di masa depan dengan strategi pengembangan yang tepat. Khusus untuk sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial, saat ini sudah menjadi basis dan sangat baik prospeknya.
3. **Kuadran III (LQ < 1; DLQ < 1 - Sektor Non-Basis dan Non-Prospektif)**:
   - Sektor-sektor ini bukan sektor basis dan juga tidak menunjukkan prospek pertumbuhan yang signifikan.
   - Sektor-sektor di kuadran ini antara lain:
     - **Pertambangan dan Penggalian (No. 2)**
     - **Pengadaan Air, Pengelolaan (No. 5)**

- **Informasi dan Komunikasi (No. 10)**

  - Sektor-sektor ini memiliki daya saing dan pertumbuhan yang rendah, sehingga mungkin memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan atau mungkin bisa diprioritaskan lebih rendah dalam strategi pembangunan.

4. **Kuadran IV (LQ > 1; DLQ < 1 - Sektor Basis namun Non-Prospektif)**:
   - Sektor-sektor dalam kuadran ini adalah sektor basis namun tidak memiliki prospek pertumbuhan yang baik.
   - Sektor-sektor yang berada dalam kuadran ini:
   - **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (No. 1)**
   - **Pengadaan Listrik dan Gas (No. 4)**
   - Meskipun sektor ini penting dan menjadi basis ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, mereka menunjukkan pertumbuhan yang stagnan atau cenderung menurun, sehingga perlu adanya inovasi atau diversifikasi untuk mempertahankan daya saingnya.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki sektor-sektor andalan yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut di kuadran I, sementara sektor-sektor di kuadran II juga layak untuk diberi perhatian dalam strategi pembangunan karena menunjukkan prospek pertumbuhan. Adapun sektor di kuadran III memerlukan pertimbangan khusus, sedangkan sektor di kuadran IV dapat dipertahankan dengan upaya untuk meningkatkan daya saingnya.

BAB VI

NILAI DEPLESI DAN DEGRADASI SUMBER DAYA ALAM

6.1. Perkembangan Deplesi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat

6.1.1. Pengertian dan Perhitungan Deplesi

Deplesi merupakan metode pengukuran penyusutan sumber daya alam (*natural resources*) sebagai komponen biaya akibat pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan. Deplesi sumber daya alam dan lingkungan merujuk pada serangkaian proses produksi, pengambilan, pengurasan, pengurangan volume atau jumlah sumber daya alam (Santoso & Astuti, 2019). Adapun nilai sumber daya alam yang menyusut tadi dikategorikan sebagai aset seperti sumber daya air, lahan, dan lain sebagainya.

Di dalam metode perhitungan penyusutan/deplesi, terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek apa saja yang dapat menyusut.Penting juga untuk memperhatikan harga perolehan sumber daya alam, yang meliputi setiap siklus atau proses mulai dari pengeluaran izin hingga dengan bagaimana sumber daya alam tersebut dapat diambil luaran hasilnya dalam rangka menentukan basis deplesi dari sumber daya alam yang akan diekstrasi. Dengan demikain, perhitungan deplesi secara sederhana dapat diilustrasikan dengan cara berikut:

Diilustrasikan sebuah lahan pertambangan ditaksir memiliki harga sebesar Rp. 100.000.000,00. Menurut hasil pengamatan terhadap lahan tersebut, diperkirakan lahan tersebut memiliki kandungan tambang sebesar 100.000 ton. Kemudian, setelah dieksploitasi pada tahun pertama, ternyata hasil dari nilai taksirannya sebesar Rp. 20.000.000. Maka, rumus perhitungan nilai deplesinya adalah sebagai berikut:

Deplesi : (Rp.100.000.000 – Rp.20.000.000) / 100.000 = Rp. 800.

Berdasarkan hal tersebut, penyusutan lahan tambang atau nilai deplesinya adalah sebesar Rp. 800 per ton. Apabila pada eksploitasi berikutnya ternyata lahan tersebut dapat memproduksi 30.000 ton, maka nilai deplesi pada tahun tersebut:

Rp. 800 x 30.000 = Rp. 24.000.000

Perhitungan nilai deplesi sumber daya alam di Kabupaten Bandung Barat sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016, 2017, 2020, dan 2022. Untuk mengisi kekosongan pada tahun 2023, maka dilakukan perhitungan dengan mencari nilai rata-rata perkembangan deplesi yang dihasilkan dengan menggunakan persamaan berikut:

Rata-Rata Deplesi =

$$\text{Rata-Rata Deplesi} = \frac{\Delta\ PDRB}{\Delta\ Deplesi}$$

Untuk memperkirakan Biaya Deplesi Tahun 2023, Berdasarkan simplifikasi rata-rata koefesien deplesi series dan menggunakan koefisien deplesi terbaru series. Koefisien Deplesi (Kd). Koefisien Deplesi (Kd) → Persentasi perubahan deplesi atau penyusutan sumber daya alam yang digunakan sebagai input produksi yang disebabkan adanya persentasi perubahan kegiatan produksi.

Sehingga:

$$Kd = \frac{Persentase\ perubahan\ deplesi \quad \Delta\ D\ /\ D}{Persentase\ perubahan\ produksi \quad \Delta\ Y\ /\ Y}$$

Kd : Koefisien Dasar
Δ D/D : Persentase Perubahan Deplesi
Δ Y/Y : Persentase Perubahan PDRB

Tabel 6. 1. Perkembangan Nilai Deplesi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2022 (dalam Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA		DEPLESI KABUPATEN BANDUNG BARAT						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	**Primer**	**10,73**	**15,58**	**17,08**	**18,72**	**20,52**	**22,49**	**24,66**
	Pertanian	10,73	15,58	17,08	18,72	20,52	22,49	24,66
	Pertambangan dan Penggalian							
2	**Sekunder**	**69,29**	**73,86**	**80,96**	**88,74**	**97,28**	**100,85**	**110,55**
	Industri	11,87	12,21	13,38	14,67	16,08	10,06	11,03
	Listrik dan Gas	57,42	61,65	67,58	74,07	81,20	89,00	97,56
	Pengadaan Air						1,79	1,96
	Bangunan							
3	**Tersier**	**351,07**	**335,55**	**367,81**	**403,18**	**441,95**	**499,51**	**547,52**
	Perdagangan Besar dan Eceran						5,03	5,51
	Penyediaan Akomodasi	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
	Pengangkutan/Telekomunikasi	349,84	334,28	366,42	401,65	440,27	482,59	528,99
	Keuangan/Perse waan/Jasa Perusahaan	1,06	1,09	1,19	1,31	1,44	1,57	1,72
	Administrasi Pemerintahan						5,03	5,51
	Pelayanan Umum Kesehatan						5,03	5,51
		431,09	424,99	465,85	510,64	559,75	622,85	682,73

Sumber:BPS Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2016-2017, Bapelitbangda Kajian PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 dan 2018, Laporan Akhir Kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, Analisis 2024.

Tabel 6.2. Perkembangan Tingkat Deplesi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2022

Tahun	PDRB ADHB	Deplesi	Δ PDRB HB	Δ Deplesi
2016	37.043,36	431,08		
2017	40.204,40	424,98	8,53%	-1,42%
2018	43.807,71	465,85	8,96%	9,62%
2019	47.180,08	510,64	7,70%	9,61%
2020	46.478,90	559,75	-1,49%	9,62%
2021	48.764,31	621,06	4,92%	10,95%
2022	52.921,29	682,65	8,52%	9,92%
Rata-rata			6,19%	8,05%
Koefisien				130,02%

Sumber : Bapelitbangda Kajian PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 dan 2018, Laporan Akhir Kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, Analisis 2024.

Keterangan : Analisis koefisien deplesi dilakukan dengan berdasarkan simplifikasi rata-rata koefesien deplesi series dan menggunakan koefisien deplesi terbaru series tiap tahun sehingga *forecasting* koefisien deplesinya dinamis.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Indonesia No.19/M/I/1986, industri diklasifikasikan berdasarkan produktivitas perorangan. Pada level atas, industri seringkali dibagi menjadi tiga bagian, yaitu primer (ekstraktif), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Seiring berjalannya waktu, perpecahan industri masyarakat pada masing-masing sektor mengalami perubahan.

1. Industri primer, merupakan industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
2. Industri sekunder, adalah industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya pemintalan benang sutra, komponen elektronik, daging kaleng, dan sebagainya.

3. Industri tersier, adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Deplesi Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kabupaten Bandung Barat

Untuk memproduksi air bersih diperlukan sarana untuk memproduksi air bersih, antara lain: air baku, bangunan pengolahan, pupa transmisi, jaringan pipa distribusi dan perlengkapan lainnya. Di samping itu juga diperlukan organisasi dan tenaga pelaksana untuk mengelola sistem penyediaan air bersih. Mengingat kebutuhan air bersih dari tahun ketahun yang terus meningkat, maka sarana/sistem penyediaan air bersih yang sudah ada mungkin tidak dapat melayani kebutuhan air pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk merencanakan dan membangun sarana penyediaan air bersih memerlukan waktu yang cukup lama.

Kebutuhan air bersih dimasa mendatang perlu diperkirakan, sehingga dapat dipersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproduksi air bersih sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Di samping dengan mengetahui kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang, dapat diperkirakan kebutuhan tenaga dan biaya untuk mengelola sistem penyediaan air bersih pada masa yang akan datang. Kebutuhan air merupakan jumlah air yang diperlukan bagi kebutuhan dasar/suatu unit konsumsi air, dimana kehilangan air dan kebutuhan air untuk pemadam kebakaran juga diperhitungkan. Besarnya air yang dipergunakan untuk berbagai jenis penggunaan tersebut juga dikenal dengan pemakaian air. Besarnya konsumsi air yang dipergunakan dipengaruhi oleh faktor, seperti:

1. Ketersediaan air baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
2. Kebiasaan penduduk setempat;
3. Pola dan tingkat kehidupan;

4. Harga air;
5. Teknis ketersediaan air seperti fasilitas distribusi, fasilitas pembuangan limbah yang dapat mempengaruhi kualitas air bersih dan kemudahan dalam mendapatkannya;
6. Keadaan sosial ekonomi penduduk setempat.

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, namun demikian air yang dikonsumsi manusia harus memenuhi syarat kesehatan. Dalam suatu pembangunan, air bersih merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam setiap kegiatannya. Untuk menunjang kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung Barat, pelayanan kebutuhan air bersih menjadi sangat penting dan mutlak pengadaannya, baik untuk pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga (Domestik) maupun kegiatan penunjang lainnya (Non Domestik).

Dari data dan fakta di lapangan bahwa ketersediaan sumber air di Kabupaten Bandung Barat bersumber dari air tanah, sumur, sumur pompa, mata air, serta sebagian yang sudah dilayani dengan sistem perpipaan dan lainnya. Kebutuhan air ini meliputi potensi daerah pelayanan air minum dan proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk menunjang kegiatan pembangunan dan perumahan yang telah ada di Kabupaten Bandung Barat, pelayanan kebutuhan air minum menjadi sangat penting dan mutlak pengadaannya, baik untuk pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga (domestik) maupun kegiatan penunjang lainnya (non domestik). Agar kebutuhan air minum di masa datang dapat terakomodir, baik menyangkut wilayah pelayanan maupun kapasitasnya, maka perhitungan perlu dilakukan secara cermat dan matang.

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 dapat diperkirakan kebutuhan air bersih akan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

→ Kebutuhan Domestik, Kubutuhan domestik akan dilayani dengan Sambungan Rumah (SR) dan Kran Umum (KU) dengan perbandingan pelayanan SR: KU adalah 70: 30 sampai tahun 2019 dan layanan SR: KU sebesar 80: 20 sampai tahun 2023;

→ Kebutuhan Non Domestik: 30% dari kebutuhan Domestik;

→ Kehilangan Air, Kehilangan air ditetapkan 30% dari kebutuhan total;

→ Kapasitas produksi, diperkirakan 10% kebutuhan harian rata-rata.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bandung Barat dilayani oleh PDAM Tirta Raharja dimana untuk saat ini pemanfaatan sumber daya air bersih domestik (rumah tangga) di Kabupaten Bandung Barat tercatat sebanyak 11.542 SR (Sambungan Rumah).

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, standar kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan ditetapkan sebesar 60 liter per jiwa per hari. Dengan asumsi bahwa satu sambungan rumah (SR) mencakup lima jiwa, maka total penduduk yang dilayani oleh PDAM Tirta Raharja di Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki cakupan 11.725 SR, adalah 56.492 jiwa. Dari perhitungan ini, total kebutuhan air bersih di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan mencapai 1.283.887,5 m^3 per tahun atau sekitar 1,28 juta m^3 per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi PDAM Tirta Raharja untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat mencapai 132,50 liter per detik, yang berasal dari sembilan unit produksi air bersih, yaitu: Cisarua, Cikole, Pasir Ipis, Padalarang 1, Padalarang 2, Padalarang 3, Cikalong Wetan, Batujajar, dan Cililin. meskipun kebutuhan air di Kabupaten Bandung Barat cukup besar, ketersediaan sumber daya air di wilayah ini masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan domestik dan non-domestik. Namun, perlu ada pengelolaan yang lebih efisien guna memastikan ketersediaan air di masa depan.

Daya Dukung Air

Kebutuhan air tergolong besar ditemukan di Kecamatan Cikalongwetan, dan Gununghalu dengan nilai masing-masing mencapai 323 juta m3/tahun dan 295 juta m3/thn. Ketersediaan air di Kabupaten Bandung Barat dianalisis melalui pendekatan metode rasional dengan basis wilayah DAS sebagai tangakapan air dan jasa eksosistem penyedia air dalam sisem grid. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Batujajar sebesar 915 juta m3/tahun. Selanjutnya perbandingan antara kebutuhan air total dan ketersediaan air bersih untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Tabel. Berdasarkan tabel tersebut ditemukan seluruh kecamatan secara total berada pada daya dukung air yang belum terlampaui.

Tabel 6. 3. Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m3/Thn)	Ketersediaan Air (m3/Thn)	Selisih Ketersediaan Kebutuhan	Status DDT Air
1	Kec. Batujajar	114.920.000	915.021.766	800.101.766	Belum Terlampaui
2	Kec. Cihampelas	176.305.600	263.001.743	86.696.143	Belum Terlampaui
3	Kec. Cikalongwetan	323.084.800	499.767.925	176.683.125	Belum Terlampaui
4	Kec. Cililin	177.128.000	400.574.388	223.446.388	Belum Terlampaui
5	Kec. Cipatat	289.004.800	580.039.233	291.034.433	Belum Terlampaui
8	Kec. Cisarua	138.528.000	266.890.203	128.362.203	Belum Terlampaui
9	Kec. Gununghalu	295.366.400	633.991.372	338.624.972	Belum Terlampaui
11	Kec. Ngamprah	111.564.800	325.607.801	214.043.001	Belum Terlampaui
12	Kec. Padalarang	178.100.800	507.977.609	329.876.809	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m3/Thn)	Ketersediaan Air (m3/Thn)	Selisih Ketersediaan Kebutuhan	Status DDT Air
13	Kec. Parongpong	107.875.200	179.548.757	71.673.557	Belum Terlampaui
14	Kec. Rongga	146.011.200	466.009.056	319.997.856	Belum Terlampaui
15	Kec. Saguling	178.254.400	799.321.939	621.067.539	Belum Terlampaui
16	Kec. Sindangkerta	149.654.400	406.795.915	257.141.515	Belum Terlampaui
	Total	2.993.056.000	7.708.419.500	4.715.363.500	Belum Terlampaui

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2024-2044

Tabel 6. 4. Cakupan Pelayanan Perumda Tirta Raharja 2023

No	Wilayah	Jumlah SR	Total Penduduk (Jiwa)	Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Jiwa Terlayani pada TW IV (Jiwa)	Jiwa Terlayani Tahun 2023 (Jiwa)
1	Kabupaten Bandung	88.490	3.718.584	3.321.402	410.976	419.172
2	Kota Cimahi	14.559	575.240	287.620	68.820	69.260
3	Kabupaten Bandung Barat	11.725	1.846.969	698.529	56.004	56.492
	Total	114.774	6.140.793	4.307.551	535.800	544.924

Sumber: Perumda Tirta Raharja, 2023

Dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, perhitungan nilai deplesi yang dihitung dengan koefisien dengan basis data tahun 2016-2017 memerlukan pendekatan kuantitatif yang mempertimbangkan cadangan awal sumber daya alam (SDA), tingkat pemanfaatan, dan regenerasi yang terjadi selama periode tersebut. Meskipun begitu, nilai tersebut bisa didapatkan dari analisis dan kajian pada tahun

2022 sebagai basis data periode sebelumnya. Koefisien deplesi, yang mencerminkan tingkat eksploitasi atau pemanfaatan tahunan, digunakan sebagai faktor pengali untuk menentukan jumlah SDA yang digunakan. Berdasarkan Tabel 6.2, koefisien deplesi yang didasari pada perhitungan konstan selama lima tahun terakhir, didapatkan nilai koefisien deplesi sebesar 1,300236.

Dengan mempertimbangkan dinamisnya perubahan pemanfaatan sumber daya alam serta kompleksitas perhitungan tiap sektor, peramalan (*forecasting*) yang dilakukan dalam menghitung deplesi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *time series* sehingga koefisien yang digunakan dihitung berdasarkan rata-rata sejak 2016-2022 untuk menemukan nilai deplesi 2023.

Tabel 6. 5. Besaran Nilai Deplesi Sumber Daya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2023 (dalam Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA		DEPLESI KABUPATEN BANDUNG BARAT							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Primer**	**10,73**	**15,58**	**17,08**	**18,72**	**20,52**	**22,49**	**24,66**	**32,06**
	Pertanian	10,73	15,58	17,08	18,72	20,52	22,49	24,66	32,06
	Pertambangan dan Penggalian								-
2	**Sekunder**	**69,29**	**73,86**	**80,96**	**88,74**	**97,28**	**100,85**	**110,55**	**143,74**
	Industri	11,87	12,21	13,38	14,67	16,08	10,06	11,03	14,34
	Listrik dan Gas	57,42	61,65	67,58	74,07	81,20	89,00	97,56	126,85
	Pengadaan Air						1,79	1,96	2,55
	Bangunan								-
3	**Tersier**	**351,07**	**335,55**	**367,81**	**403,18**	**441,95**	**499,51**	**547,52**	**711,91**
	Perdagangan Besar dan Eceran						5,03	5,51	7,16
	Penyediaan Akomodasi	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,36
	Pengangkutan/ Telekomunikasi	349,84	334,28	366,42	401,65	440,27	482,59	528,99	687,81

LAPANGAN USAHA		DEPLESI KABUPATEN BANDUNG BARAT							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Keuangan/ Persewaan/ Jasa Perusahaan	1,06	1,09	1,19	1,31	1,44	1,57	1,72	2,24
	Administrasi Pemerintahan						5,03	5,51	7,16
	Pelayanan Umum Kesehatan						5,03	5,51	7,16
		431,09	424,99	465,85	510,64	559,75	622,85	682,73	887,71

Sumber : Bapelitbangda Kajian PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 dan 2018, Laporan Akhir Kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, Analisis 2024.

Perkembangan Degradasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah.

Bentuk degradasi yang sering ditemui adalah degradasi lahan. Degradasi lahan tersebut terjadi akibat erosi, angin, mekanis (disebabkan oleh manusia). Sebenarnya ada banyak bentuk atau jenis degradasi lahan yang dilakukan oleh manusia, namun bentuk degradasi lain yang telah muncul saat ini antara lain;

1. Pencemaran akibat aktivitas pertanian, industri, pertambangan maupun aktivitas komersial;
2. Hilangnya lahan yang dapat ditanami karena pembangunan permukiman atau habitat manusia;
3. Radioaktif antropogenik (umumnya tidak sengaja);
4. Cekaman lahan akibat konflik bersenjata;

5. Dan lain-lain.

Penyebab degradasi lahan sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pertanian. Penyebab utama terjadinya degradasi lahan antara lain;

1. Pembersihan lahan;
2. pengembalaan hewan yang berlebihan;
3. Irigasi yang tidak baik dan pengambilan air yang berlebihan;
4. Pembajakan tanah yang berlebihan;
5. dan masih banyak yang lain.

Degradasi lingkungan juga dapat terjadi pada lingkungan fisik dan sosial, degradasi lingkungan fisik dapat disebabkan oleh pencemaran seperti pencemaran udara, air dan suara. Sedangkan degradasi lingkungan sosial seperti Kepadatan lalu lintas kendaraan dijalan yang menyebabkan macet, Tumpukan sampah dibanyak tempat, berkembangnya sikap hidup materialistis dan individualistis yang semakin meningkat dan lain sebagainya.

Data Degradasi dalam kurun waktu 2016-2022 digunakan sebagai basis data untuk mengestimasi nilai Degradasi. Koefisien Degradasi (Kdg) → Suatu angka indeks yang menggambarkan persentase perubahan/kenaikan nilai degradasi rata-rata per tahun yang disebabkan oleh persentase perubahan/kenaikan rata-rata produksi per tahun.

Sehingga, koefisien Degradasi (Kdg) adalah

$$Kdg = \frac{\%\ \text{kenaikan degradasi rata-rata}}{\%\ \text{kenaikan produksi rata-rata}}$$

Tabel 6. 6. Perkembangan Nilai Degradasi SDA di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA		PERKEMBANGAN NILAI DEGRADASI SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT 2016-2020 (Miliar Rp.)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Primer	137,81	132,76	129,11	126,53	124	121,52
	Pertanian						
	Pertambangan dan Penggalian	137,81	132,76	129,11	126,53	124	121,52
2	Sekunder	129,67	133,84	135,26			
	Industri	129,67	133,84	135,26	136,61	137,98	139,36
	Listrik, Gas dan Air						
	Bangunan						
3	Tersier	2,89	2,97	2,99	3,02	3,05	3,08
	Perdagangan/Hotel/Restoran						
	Keuangan/Persewaan/Jasa Perusahaan						
	Jasa - Jasa	2,89	2,97	2,99	3,02	3,05	3,08
		270,37	269,57	267,36	129,55	127,05	124,6

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat dalam Angka, Bapelitbangda Kajian PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat 2022)

Tabel 6. 7. Koefisien Degradasi PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Bandung Barat

TAHUN	PDRB ADHB (Miliar Rp.)	DEGRADASI (Miliar Rp.)	Δ PDRB ADHB (%)	ΔDEGRADASI (%)
2015	30.191,73	270,37		
2015	30.191,73	270,37		
2016	37.043,36	269,57	22,69	-0,3
2017	40.204,40	267,36	8,53	-0,81
2018	43.807,71	129,55	8,96	-13,78
2019	47.180,08	127,05	7,7	-1,93
2020	46.478,90	124,6	-1,49	-1,93
2021	48.764,31	122,2	4,92	-1,93
2022	52.921,29	121,705	8,52	-0,403
Rata-rata			8,549	-3,011
Koefisien				-0,35
2023	56.945,2**	121,2788		

Sumber: BPS Kab. Bandung Barat, 2024; Bapelitbangda Kajian PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat, 2022; Analisis, 2024)

Keterangan**: Tahun 2023 data sangat sementara

Berdasarkan data dari periode 2015 hingga 2022, terjadi peningkatan rata-rata tahunan sebesar 8,55% dalam ekstraksi sumber daya alam. Peningkatan ini diiringi dengan penurunan nilai degradasi rata-rata tahunan sebesar (-0,35 x 8,549%) = -3,011% dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Tabel 6. 8. Besaran Nilai Degradasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung Barat 2016-2023 (dalam Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA		DEGRADASI KABUPATEN BANDUNG BARAT							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Primer	132,8	129,1	126,53	124	121,52	119,09	114,98	112,01
	Pertanian								
	Pertambangan dan Penggalian	132,8	129,1	126,53	124	121,52	119,09	114,98	112,01
2	Sekunder	133,8	135,3	136,61	136,61	139,36	140,75	135,89	136,24
	Industri	133,8	135,3	136,61	136,61	139,36	140,75	135,89	136,24
	Listri, Gas, dan Air								
	Bangunan								
3	Tersier	2,97	2,99	3,02	3,05	3,08	3,11	3	3,005
	Perdagangan/ Hotel/ Restoran								
	Pengangkutan/ Telekomunikasi								
	Keuangan/ Persewaan/ Jasa Perusahaan								
	Jasa-Jasa	2,97	2,99	3,02	3,05	3,08	3,11	3	3,005
		269,6	267,4	266,16	265,03	263,96	262,95	253,87	251,25

Sumber: BPS,2024; Bapelitbangda, 2022; Analisis, 2024

BAB VII

PDRB COKLAT, PDRB SEMI HIJAU, DAN PDRB HIJAU KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

PDRB Hijau adalah pengembangan dari PDRB Konvensional (sering disebut sebagai PDRB Coklat), dengan memasukkan komponen deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan ke dalam perhitungan PDRB. PDRB sendiri merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah selama satu tahun. Nilai tambah ini dihitung sebagai selisih antara nilai total produksi dengan biaya input antara (intermediate inputs). Nilai tersebut mencerminkan pendapatan atau balas jasa bagi pemilik faktor produksi. Tinggi atau rendahnya PDRB suatu daerah menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah (Samuelson & Nordhaus, 1995).

Di Indonesia, perhitungan PDRB Konvensional (PDRB Coklat) baru dimulai pada pertengahan tahun 1970. Pada masa itu, sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Andalas, bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan LIPI untuk mengembangkan PDRB di beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.

Hingga kini, PDRB di banyak daerah di Indonesia umumnya hanya mencerminkan nilai kontribusi produk yang dipasarkan di berbagai sektor ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan ini dikenal sebagai PDRB Konvensional atau PDRB Coklat, yang cenderung berfokus pada kepentingan jangka pendek. Sebagai respons, PDRB Hijau diperkenalkan sebagai bentuk yang lebih ramah lingkungan, dengan memasukkan dimensi lingkungan, seperti depresiasi sumber daya alam, ke dalam perhitungan PDRB.

Depresiasi sumber daya alam sendiri terdiri dari dua komponen utama: deplesi sumber daya alam (pengambilan yang mengurangi ketersediaan) dan degradasi lingkungan

(kerusakan yang terjadi akibat aktivitas ekonomi). Keduanya dapat dilihat sebagai "scarcity rent," yakni nilai yang hilang akibat penggunaan dan perusakan sumber daya tersebut.

Tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan PDRB Coklat (Konvensional) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2023.

Tabel 7. 1. Estimasi perkembangan PDRB Coklat (Konvensional) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.362,86	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21
B. Pertambangan dan Penggalian	476,90	476,31	506,84	517,68	535,90
C. Industri Pengolahan	18.816,07	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	390,49	375,83	418,08	441,35	463,10
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,78	19,68	21,60	23,85	24,50
F. Konstruksi	3.613,70	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.404,98	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70
H. Transportasi dan Pergudangan	2.503,97	2.436,36	2.511,57	2.905,25	3.409,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.436,39	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80
J. Informasi dan Komunikasi	786,49	999,36	1.069,60	1.120,75	1.191,52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	414,20	418,93	455,56	490,38	516,24
L. Real Estat	853,13	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94
M,N. Jasa Perusahaan	212,59	199,79	218,83	253,49	283,21
O. Administrasi Pemerintahan,	1.365,49	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
P. Jasa Pendidikan	1.742,81	1.942,63	1.983,84	2.078,60	2.248,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259,85	258,02	274,36	290,83	316,87
R,S,T,U. Jasa Lainnya	522,36	501,60	503,53	558,78	614,81
Produk Domestik Regional Bruto	47.180,08	46.478,96	48.764,31	52.921,29	56.945,18

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat *(2024)*

Sedangkan tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan PDRB Coklat (Konvensional) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2023.

Tabel 7. 2. Perkembangan PDRB Coklat (Konvensional) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.734,13	3.711,11	3.672,83	3.823,82	3.884,46
B	Pertambangan dan Penggalian	329,67	322,49	342,68	342,29	344,65
C	Industri Pengolahan	12.826,82	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	237,13	229,82	254,96	266,93	273,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	11,50	12,68	13,89	14,95	15,28
F	Konstruksi	2.349,05	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran	4.382,11	4.024,97	4.142,79	4.305,72	4.479,13
H	Transportasi dan pergudangan	1.605,32	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38
I	Penyedia Akomodasi dan Makan	1.645,77	1.568,69	1.553,41	1.709,75	1.866,42
J	Informasi dan Komunikasi	799,67	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	259,49	263,15	277,91	274,48	284,16
L	Real estate	615,11	616,38	677,19	731,75	777,36
M,N	Jasa Perusahaan	154,16	135,50	146,31	161,89	176,53
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial	764,96	706,20	688,15	666,91	683,00
P	Jasa Pendidikan	1.165,30	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial;	172,96	172,47	182,98	290,83	316,87
R,S,T, U	Jasa Lainnya	345,21	343,91	346,54	368,39	393,35
	Total	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Bara, dianalisis *(2024)*

Tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan PDRB Semi Hijau dimana PDRB sebelumnya telah dikurangi dengan nilai deplesi dari beberapa sektor atau lapangan usaha. Berikut merupakan tabel estimasi besaran PDRB Semi Hijau atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2020-2023.

Tabel 7. 3. Estimasi Besaran PDRB Semi Hijau Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bandung Barat 2020-2023 **(dalam Miliar Rp.)**

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.173,59	6.117,73	6.032,92	7215,15
B	Pertambangan dan Penggalian	476,31	506,84	485,22	535,9
C	Industri Pengolahan	18.738,19	20.082,05	18.706,38	23426,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	375,83	329,08	286,56	336,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,68	19,81	17,04	21,95
F	Konstruksi	3.421,28	3.683,20	3.486,43	4184,36

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.997,68	6.189,37	6.097,42	7053,54
H	Transportasi dan Pergudangan	2.436,30	2.511,43	2.425,60	2721,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.401,86	2.511,97	2.367,89	3063,44
J	Informasi dan Komunikasi	999,36	587,37	382,76	1191,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	451,44	415,37	514
L	Real Estat	855,11	939,98	852,46	1096,94
M.N	Jasa Perusahaan	192,79	217,26	202,44	283,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.269,76	1.237,40	1.265,09	1240,64
P	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.983,84	1.808,01	2248,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258,02	269,33	249,46	309,71
R,S,	Jasa Lainnya	501,60	503,35	493,54	614,81
	PDRB	46.478,90	48.141,44	45.574,57	56.057,50

Sumber: BPS 2024, Analisis 2024

Tabel berikut di bawah memperlihatkan estimasi perkembangan PDRB Semi Hijau Atas Dasar Harga Konstan, yaitu PDRB sebelumnya yang telah dikurangi besaran nilai deplesi dari beberapa sektor lapangan usaha.

Tabel 7. 4. Estimasi Perkembangan PDRB Semi Hijau Atas Dasar Harga Konstan 2020 – 2023 (dalam Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.711,11	3.650,34	3.658,35	3.852,40
B	Pertambangan dan Penggalian	322,49	342,68	333,68	344,65

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
C	Industri Pengolahan	12.517,13	13.118,15	12.569,47	14.695,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	229,82	165,96	141,85	146,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,68	12,10	10,46	12,73
F	Konstruksi	2.214,82	2.378,25	2.274,63	2.528,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.024,97	4.137,76	4.167,02	4.471,97
H	Transportasi dan Pergudangan	1.544,01	1.561,04	1.551,15	1.206,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.568,89	1.553,15	1.558,21	1.866,06
J	Informasi dan Komunikasi	1.015,82	612,32	390,44	1.228,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	277,91	263,08	281,92
L	Real Estat	616,03	676,51	617,52	777,36
M.N	Jasa Perusahaan	135,50	144,74	142,07	176,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	706,20	683,12	720,45	675,84
P	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.241,87	1.185,30	1.322,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,47	176,49	165,72	309,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	343,91	346,54	337,26	393,35
	PDRB	30.640,41	31.078,92	30.086,64	34.290,61

Sumber: BPS 2024, Analisis 2024

Tabel berikut menunjukkan estimasi perkembangan PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku dimana PDRB sebelumnya telah dikurangi dengan besaran nilai deplesi dan degradasi SDA dari beberapa sektor/ lapangan usaha.

Tabel 7. 5. PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2020 – 2023 (dalam Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.173,59	6.032,92	6.032,92	7215,15
B	Pertambangan dan Penggalian	476,31	387,75	368,51	423,89
C	Industri Pengolahan	18.783,19	19.941,30	18.564,22	23290,052
D	Pengadaan Listrik dan Gas	375,83	286,56	286,56	336,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,68	17,04	17,04	21,95
F	Konstruksi	3.421,28	3.487,43	3.488,43	4184,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.997,68	6.097,42	6.097,42	7053,54
H	Transportasi dan Pergudangan	2.436,30	2.426,60	2.427,60	2721,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.401,86	2.367,89	2.367,89	3063,44
J	Informasi dan Komunikasi	999,36	382,76	382,76	1191,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	415,37	415,37	514
L	Real Estat	855,11	852,46	852,46	1096,94
M,N	Jasa Perusahaan	192,79	202,44	202,44	283,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.269,76	1.265,09	1.265,09	1240,64
P	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.809,01	1.810,01	2248,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258,02	249,46	249,46	309,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	501,60	500,24	490,40	611,81
	PDRB	46.478,90	46.721,72	45.318,56	55.806,25

Sumber: BPS (2024), data dianalisis Peneliti (2024)

Tabel berikut menunjukkan estimasi perkembangan PDRB Hijau Atas Dasar Harga Konstan, setelah disesuaikan dengan deplesi dan degradasi sumber daya alam dari beberapa sektor usaha.

Tabel 7. 6. PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 -2023 (dalam Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.711,11	3.658,35	3.658,35	3.852,40
B	Pertambangan dan Penggalian	322,49	223,59	216,97	232,64
C	Industri Pengolahan	12.517,13	12.977,40	12.427,31	14.559,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	229,82	141,85	141,85	146,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,68	10,46	10,46	12,73
F	Konstruksi	2.214,82	2.275,63	2.276,63	2.528,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.024,97	4.167,02	4.167,02	4.471,97
H	Transportasi dan Pergudangan	1.544,01	1.552,15	1.553,15	1.206,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.568,89	1.558,21	1.558,21	1.866,06
J	Informasi dan Komunikasi	1.015,82	390,44	390,44	1.228,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	263,08	263,08	281,92
L	Real Estat	616,03	617,52	617,52	777,36
M, N	Jasa Perusahaan	135,50	142,07	142,07	176,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	706,20	720,45	720,45	675,84
P	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.186,30	1.187,30	1.322,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,47	165,72	165,72	309,71
R,S, T,U	Jasa Lainnya	343,91	343,43	334,12	390,35
	PDRB	30.640,41	30.393,65	29.830,63	34.039,36

Sumber: BPS 2024, Analisis 2024

BAB VIII

KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan

1. Nilai deplesi sumber daya di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 sebesar Rp. 887,71 miliar (Tabel 6.5), yang terdiri dari deplesi sumber daya alam seperti air dan vegetasi akibat aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut.
2. Nilai degradasi lingkungan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 121,2788 miliar, yang dipengaruhi oleh aktivitas industri, pertambangan, serta pengelolaan sampah yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Kecamatan Cipatat.
3. PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 sebesar Rp. 55.806,25 miliar. Dimana nilai PDRB Konvensional menjadi PDRB Semi Lingkungan Hidup turun sebesar 1,6%, dan nilai PDRB Konvensional menjadi PDRB Lingkungan Hidup turun sebesar 2%.

8.1.1. Sisi Produksi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Absolut (PDRB Atas Harga Berlaku)

   Selama lima tahun terakhir (2019–2023), perekonomian Bandung Barat didominasi oleh enam kategori lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
2. Laju Pertumbuhan Nyata (PDRB Atas Harga Konstan)
   a. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tampak pada beberapa sektor, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang hanya tumbuh 1,59 persen pada tahun 2023. Kategori pengadaan air dan pengelolaan sampah serta limbah tumbuh melambat sebesar 2,23 persen, diikuti sektor pengadaan listrik dan gas

dengan laju 2,32 persen, serta sektor industri pengolahan dan real estate yang masing-masing bertumbuh 5,30 persen dan 6,23 persen pada tahun 2023.

b. Pertumbuhan signifikan juga terlihat pada sektor jasa pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,96 persen, 3,53 persen, 2,41 persen, dan 0,69 persen pada tahun 2023.

3. Sektor Basis

Sektor-sektor tradisional seperti **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** serta Transportasi **dan Pergudangan** masih mempertahankan status sebagai sektor basis, namun cenderung menunjukkan penurunan dalam *Location Quotient* (LQ), menandakan perlunya kebijakan atau intervensi untuk mempertahankan daya saingnya. Sektor-sektor yang stagnan dan non-basis dapat menjadi area perhatian untuk diversifikasi ekonomi atau upaya peningkatan daya saing.

Pada tahun 2023, terdapat 8 sektor atau lapangan usaha yang termasuk ke dalam kategori sebagai sektor basis dengan LQ > 1 atau dengan pertumbuhan yang signifikan, diantaranya:

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,64): Meskipun menjadi sektor basis, sektor ini mengalami tren penurunan (Δ LQ = -0,06), yang menunjukkan daya saing yang menurun.
b. Pengadaan Listrik dan Gas (2,18): Sektor ini merupakan sektor basis dan menunjukkan tren peningkatan (Δ LQ = 0,13), menandakan potensi yang baik dalam jangka panjang.
c. Transportasi dan Pergudangan (1,08): Meskipun menjadi basis, sektor ini mengalami penurunan dalam daya saing, dengan LQ cenderung stagnan.
d. Penyedia Akomodasi dan Makan (1,91): Sektor ini juga menunjukkan peran sebagai basis, namun dengan penurunan kecil dalam LQ (-0,01), menunjukkan sedikit penurunan daya saing.

e. Real Estate (1,50): Sektor ini mengalami sedikit penurunan (Δ LQ = 0,01), tetapi tetap menjadi basis.
f. Jasa Perusahaan (1,13): Sektor ini merupakan basis dengan sedikit penurunan daya saing, meskipun menunjukkan sedikit peningkatan LQ (0,08).
g. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial (1,25) dan Jasa Pendidikan (1,31): Kedua sektor ini adalah basis namun mengalami sedikit penurunan daya saing (Δ LQ masing-masing -0,03 dan -0,02).
h. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,83): Sektor ini awalnya non-basis namun cenderung naik menjadi basis dengan peningkatan yang signifikan (Δ LQ = 0,40).

4. Ketimpangan dan Dominasi Sektor

   Pada tahun 2023, terdapat 3 sektor yang dominan hingga melampaui 10% yang berkontribusi terhadap *share* perekonomian Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

   a. Industri Pengolahan (41,95%);
   b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (12,77%); dan
   c. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,08%).

5. Pendapatan Per Kapita

   Nilai PDRB per kapita di Bandung Barat atas dasar harga berlaku mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 28,21 juta rupiah. Secara nominal, angka ini mengalami fluktuasi hingga mencapai 30,62 juta rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 2,12 juta rupiah dibandingkan tahun 2019, dari 28,21 juta rupiah menjadi 26,09 juta rupiah. PDRB per kapita di Bandung Barat terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kenaikan yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

6. Daya Serap Tenaga Kerja

   Belum tersedianya data tentang daya serap tenaga kerja pada tiap lapangan usaha sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana kondisi penyerapan dan distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha.

7. Deplesi dan Degradasi

   Belum adanya batasan definisi yang mengikat tentang deplesi dan degradasi lingkungan sehingga penetapan basis deplesi dan degradasi belum terdapat acuan standar.

8.1.2. Sisi Pengeluaran/Penggunaan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan Kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kabupaten Bandung Barat

1. Tingkat konsumsi masyarakat cukup baik, tetapi kecenderungan untuk menambah konsumsi dari setiap kenaikan pendapatannya (MPC) masih relatif rendah sehingga angka pengganda ekonomi (*mulitipler effect*) relatif rendah.
2. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8.2. Saran dan Rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Kajian PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dominasi 3 sektor yang menyumbang lebih dari 65% perekonomian Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PDRB Kabupaten Bandung Barat 2023, yaitu sektor Industri Pengolahan (41,95%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran (12,77%), dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,08%) memperlihatkan terjadinya pergeseran dibandingkan tahun sebelumnya meskipun belum terlalu signifikan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan intervensi untuk menghadirkan diversifikasi terhadap 14 sektor/lapangan usaha lainnya

untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mendatang;

2. Dalam rangka mengurangi ketimpangan distribusi pendapatn per sektor, direkomendasikan agar secara berkala meng-update data tentang daya serap tenaga kerja setiap lapangan usaha guna membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan strategis pembangunan eknomi dengan basis data yang dapat dipercaya;
3. Sehubungan dengan belum jelasnya definisi deplesi dan degradasi dalam konteks perhitungan PDRB Hijau, maka perlu dibuat batasan yang jelas tentang pengertian tersebut sebagai dasar untuk menentukan basis deplesi dan degradasi, sehingga dengan demikian dapat dibuat konsep standar valuasi/penilaian penyusutan SDA dan kerusakan lingkungan; Mengingat masih rendahnya pembentukan modal tetap bruto per tahun, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang pro terhadap ketertarikan para investor/dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung Barat, baik berupa kemudahan mendapatkan perijinan usaha maupun infrastruktur pendukung yang menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa;
4. Seluruh dinas yang terkait dengan ke-17 lapangan usaha sebagai dasar perhitungan PDRB, sebaiknya memilki data runtut waktu yang *up to date* dan relevan dengan kebutuhan pelaporan berkala tentang PDRB, yang dapat diakses oleh Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat;
5. Dengan basis pendekatan ekonomi kewilayahan/regional, Bapelitbangda dapat menggunakan pendekatan wilayah dan konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*), sebagai bahan konsiderasi dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah;
6. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan fasilitas umum yang dapat menghasilkan dengan cara berkolaborasi dengan pihak swasta dengan

skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi dunia usaha sehingga menjadi daya tarik bagi mereka untuk menentukan lokasi usahanya di Kabupaten Bandung Barat;

7. Diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tentang batas-batas kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pengelolaan hutan dan perkebunan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat agar wilayah kewenangannnya dapat didefinisikan secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). *Sistem Terintegrasi Neraca Ekonomi dan Lingkungan Indonesia (SINERLING) 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): Konsep, Pengukuran, dan Aplikasi. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2009). Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan. Jakarta: CV. Chandra Abadi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Kabupaten Bandung Barat : BPS Kabupaten Bandung Barat.

Berkhout, F., & Hertin, J. (2002). "Foresight Future Scenarios for Sustainability." Futures, 34(10), 887–909.

Djijono, S. (2002). Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .

Irawan, M. (2013). PDRB Hijau sebagai Indikator Keberlanjutan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 107-118.

Kementerian Dalam Negeri. (2023, 9 11). https://www.slideshare.net/ilusiDigulSelatan/lusiartisosialisasipermendagri86tahun2017pptx#10. Retrieved from https://www.slideshare.net: https://www.slideshare.net/ilusiDigulSelatan/ilusiarti sosialisasi permendagri86tahun2017pptx#10

Pearce, D., & Turner, R.K. (1992). Economics of Natural Resources and the Environment. London: Harvester Wheatsheaf.

Sachs, J. D. (2015). *Sustainable Development: The Framework and Its Application*. New York: Columbia University Press.

Samuelson, P.A., & Nordhaus, W.D. (1995). Economics. 16th Edition. New York: McGraw-Hill.

Santoso, D. H., & Astuti, F. A. (2019). Valuasi Deplesi Sumber daya Air dalam Rangka Penghitungan PDRB Semi Hijau di Kota Malang, Jawa Timur. *Lingkungan Kebumian, 2*(1), 1-12.

Sjafrizal. (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma, 3, 27-38.

Soeharto, D., & Prasetyo, R. (2016). Mengukur Kinerja Ekonomi dengan Pendekatan PDRB Hijau. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 45-60.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. (2014). *System of Environmental-Economic Accounting 2012: Central Framework*. United Nations.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP.

World Bank. (2005). *Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century*. World Bank.

Zhao, Y., & Zeng, H. (2014). Green GDP as an Indicator for Sustainable Development. *Environmental Economics and Policy Studies*, 16(2), 237-254.